



TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA: STRATEGI MENAVIGASI POLIKRISIS

**Evaluasi Kebijakan Luar Negeri
Tahun 2023-2024**

**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)**

2024

TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA: STRATEGI MENAVIGASI POLIKRISIS

TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA: STRATEGI MENAVIGASI POLIKRISIS

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JENIS BAHAN	Monograf
PENANGGUNG JAWAB	Wisnu Utomo (penulis); Tri Azmi Khairunnisa (penulis); Adzraa Shaffa Adira (penulis); Yulius P Hermawan (penulis); Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Transformasi Ekonomi Indonesia : Strategi Menavigasi Polikrisis / Wisnu Utomo, Tri Azmi Khairunnisa, Adzraa Shaffa Adira, Yulius P Hermawan
EDISI	Cetakan 1, 2025
PUBLIKASI	Jakarta Pusat : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2025
DESKRIPSI FISIK	150 halaman : ilustrasi ; 21 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7023-05-6
SUBJEK	Ekonomi – Indonesia
KLASIFIKASI	330.959 8 [23]

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Hendra Wahanu Prabandani

Penulis:

Wisnu Utomo
Tri Azmi Khairunnisa
Adzraa Shaffa Andira
Yulius P Hermawan

Desain Sampul:

Wisnu Utomo

Diterbitkan oleh:

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Dikeluarkan oleh:

Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional

Cetakan I, 2025



SAMBUTAN

Deputi Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan



Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan rasa bangga dan apresiasi yang mendalam atas terbitnya buku *Transformasi Ekonomi Indonesia: Strategi Menavigasi Polikrisis*. Buku ini merupakan hasil kerja keras yang sangat bernilai, yang tidak hanya menjadi alat ukur capaian pembangunan nasional, tetapi juga memberikan wawasan yang luas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia selama periode 2023-2024.

Buku ini menyajikan hasil evaluasi dan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai tantangan global yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan kebijakan luar negeri tahun 2023-2024.

Berlanjutnya konflik Ukraina-Rusia, perang antara Israel dan Hamas, fenomena *friendshoring* dan deglobalisasi, krisis iklim, serta rivalitas geopolitik antara Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, semuanya memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan dan pembangunan Indonesia. Dinamika kawasan Asia Tenggara juga membawa tantangan tersendiri, dengan perubahan politik dan ekonomi yang harus dihadapi dengan penuh kehati-hatian. Salah satu hal yang sangat relevan dalam konteks evaluasi ini adalah fenomena *poly-crisis*, yaitu krisis yang saling terkait dan mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan kita. Dalam menghadapi berbagai krisis tersebut, kita perlu lebih adaptif dan inovatif dalam merancang kebijakan pembangunan dalam menghadapi

ketidakpastian global, sekaligus mempercepat transformasi ekonomi Indonesia.

Melalui buku ini, kita dapat melihat bagaimana Indonesia berusaha mengatasi tantangan-tantangan besar tersebut, dengan tetap fokus pada tujuan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kesejahteraan rakyat. Evaluasi yang dilakukan dalam buku ini juga memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana Indonesia perlu terus beradaptasi dengan perubahan global, serta mendorong sinergi antar berbagai sektor untuk mencapai pembangunan yang lebih resilien dan berdampak positif.

Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik, lebih responsif terhadap dinamika global, dan dapat memberikan solusi atas tantangan-tantangan yang ada. Semoga buku ini juga dapat memperkaya pemahaman kita dalam merancang pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi bangsa Indonesia.

Akhir kata, terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini menjadi salah satu kontribusi penting dalam memajukan Indonesia ke depan.

Jakarta, November 2024

Bogat Widyatmoko

PENGANTAR

**Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja
Sama Pembangunan Internasional**



Indonesia menghadapi tantangan besar dalam era polikrisis, yaitu kombinasi berbagai krisis global seperti pandemi, perubahan iklim, ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi. Kondisi ini menuntut transformasi ekonomi yang lebih terstruktur dan inklusif untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan. Transformasi ekonomi menjadi langkah strategis sekaligus sarana bagi Indonesia untuk dapat terus tumbuh dalam kondisi polikrisis yang disertai dengan berbagai tantangan global tersebut. Dengan kebijakan adaptif, inovatif, dan kolaborasi lintas sektor, transformasi ekonomi tidak hanya menjadi respons terhadap krisis, tetapi juga landasan untuk pertumbuhan inklusif dan berkeadilan di masa depan.

Buku ini menyajikan hasil evaluasi atas capaian target diplomasi ekonomi dalam mendukung upaya Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di tengah polikrisis global.

Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka penulisan buku ini. Studi referensi terkait metodologi telah dilakukan untuk menentukan alat analisis terhadap data-data capaian kinerja dan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja tersebut. Adapun Focus Group Discussion dilakukan untuk mendalami analisis akademis terkait kinerja diplomasi ekonomi, serta evaluasi kinerja diplomasi perlindungan warga negara Indonesia di luar

negeri dan perundingan perbatasan. Diskusi terbatas dilakukan untuk menggali perkembangan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), serta mengevaluasi kinerja kerja sama pembangunan internasional. Baik FGD maupun studi dokumen juga dilakukan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan strategis guna merumuskan strategi kebijakan dalam upaya mencapai tujuan dan target yang telah direncanakan.

Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Didin Wahyudin (Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Diplomasi Ekonomi, Kemenlu), Bapak Yayan G. Mulyana (Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri, Kemenlu), Bapak Denny Abdi (Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh untuk Republik Sosialis Vietnam), Bapak Judha Nugraha (Direktur Pelindungan WNI, Kemenlu), Bapak Andreano Erwin (Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, Kemenlu), Ibu Rina Setyawati (Direktur Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kemenlu), Ibu Noviyanti (Kepala Biro Kerja Sama Teknik, Kemensetneg), Bapak Shadiq Akasya (Direktur Produksi, PT Biofarma), Bapak Batara Silaban (Direktur Produksi, PT Dirgantara Indonesia), Bapak Yulius Purwadi (Ketua Pusat Studi Hubungan Internasional, Unpar), Bapak Irman G. Lanti (Departemen Hubungan Internasional, Unpad), Bapak Andrias Darmayadi (dosen Program Studi HI, Universitas Komputer Indonesia) yang telah berperan serta dalam diskusi-diskusi tematik untuk menggali, mengidentifikasi, dan mencari solusi strategi transformasi ekonomi dalam upaya pencapaian target pembangunan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu masukan dan saran perbaikan sangat kami harapkan.

Jakarta, November 2024

Hendra Wahanu Prabandani

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
PENGANTAR EDITOR	1
SEBUAH METODOLOGI	9
PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS	21
▪ Peran <i>Emerging Power</i> dalam Politik dan Ekonomi Global	23
▪ Lingkungan Strategis 2023 dan 2024	30
CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL	51
▪ Kinerja Diplomasi Ekonomi Indonesia	53
▪ Kinerja Pelindungan Warga Negara Indonesia	58
▪ Kinerja Perundingan Perbatasan Darat dan Maritim	64
▪ Kinerja Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	67
▪ Kinerja Peningkatan Citra Indonesia di Luar Negeri	73
▪ Kinerja Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Regional dan Global	78

PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL DI TENGAH POLIKRISIS	83
▪ Mewujudkan Transformasi Indonesia menjadi Negara Maju pada Tahun 2045	85
▪ Penguatan Pelindungan WNI di Luar Negeri	94
▪ Percepatan Penyelesaian Perundingan Perbatasan	102
▪ Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional	109
▪ Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional	117
▪ Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	121
 PENUTUP	 127
▪ Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global	129
- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	129
- Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik ...	130
▪ Isu dan Tantangan Peningkatan Kinerja	133
▪ Rekomendasi	134
- Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	129
- Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Pelayanan Publik ...	130
 DAFTAR PUSTAKA	 143
BIODATA PENULIS	149

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Identifikasi Capaian Kinerja atas Target yang telah Ditetapkan di RKP 2023	17
Tabel 2.	Proses Negosiasi Isu Perbatasan Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara	42
Tabel 3.	Proses Negosiasi dengan Papua Nugini dan Palau	46
Tabel 4.	Target Output Strategis Dukungan Kebijakan Luar Negeri terhadap PN 1	54
Tabel 5.	Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Diplomasi Ekonomi 2022-2023	55
Tabel 6.	Target Output Strategis, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pelindungan WNI di Luar Negeri (RKP TA 2023)	59
Tabel 7.	Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan	61
Tabel 8.	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim	65
Tabel 9.	Jumlah Perundingan Perbatasan Batas Maritim dan Batas Darat 2023	66
Tabel 10.	Jumlah Kegiatan KSST per K/L 2023 dan 2024	71
Tabel 11.	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	80
Tabel 12.	Kepemimpinan Indonesia pada Forum Regional dan Multilatera	80
Tabel 13	Prakarsa dan Rekomendasi yang Disampaikan dan Diterima pada Pertemuan Tingkat ASEAN dan Multilateral Tahun 2023	81

Tabel 14.	Signifikansi Dampak Kinerja Diplomasi Ekonomi terhadap Prioritas Nasional 1	87
Tabel 15.	Signifikansi Dampak Perlindungan WNI di Luar Negeri terhadap Prioritas Nasional 7	96
Tabel 16.	Tabel Tantangan Perlindungan WNI	97
Tabel 17.	Signifikansi Dampak Kinerja Perundingan Perbatasan pada Prioritas Nasional 7	104
Tabel 18.	Tantangan Perundingan Perbatasan	105
Tabel 19.	Signifikansi Kegiatan KSST bagi Prioritas Nasional Indonesia	112
Tabel 20.	Tantangan Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Internasional	114
Tabel 21.	Dampak Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional pada Prioritas Nasional	118
Tabel 22.	Signifikansi Dampak Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Regional dan Global pada Prioritas Nasional	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Isu-isu Strategis Prioritas Polugri 2020-2024	6
Gambar 2.	Ruang Lingkup Prioritas Nasional 1 dan 7 yang Didukung Kebijakan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	9
Gambar 3.	Gambar 3. Alur Pelaksanaan Evaluasi Dukungan Kebijakan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional	14
Gambar 4.	Spektrum Penilaian Dampak Capaian Kinerja	19
Gambar 5.	Prototipe Negara Emerging Power	26
Gambar 6.	Ringkasan Lingkungan Strategies 2023-2024	49
Gambar 7.	Negara Asal Wisata Mancanegara Terbanyak	77
Gambar 8.	Peran Pemangku Kepentingan dalam Diplomasi Ekonomi	92
Gambar 9.	Peta Negara-negara Yang Rentan Terjadi Konflik (2024)	99
Gambar 10.	Strategi Perlindungan WNI di luar negeri	101
Gambar 11.	Batas Darat dan Maritim Indonesia	103
Gambar 12.	Penguatan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular	116

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Perkembangan Literatur tentang <i>Emerging Markets</i> dan <i>Emerging Power</i>	24
Grafik 2.	Tingkat Ekspor-Impor UE-Indonesia (dalam EUR) ..	37
Grafik 3.	Indeks Harga Batubara	38
Grafik 4.	Tren Capaian Kinerja Perlindungan WNI di Luar Negeri 2020-2023	62
Grafik 5.	Jumlah Kegiatan KSST 2018-2023	69
Grafik 6.	Indikasi Jumlah Anggaran Kegiatan KSST 2018-2024 (dalam Rp miliar)	70
Grafik 7.	Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional	74
Grafik 8.	Rata-rata Indeks per Dimensi di Perwakilan RI	75
Grafik 9.	Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020-2024 ...	76
Grafik 10.	Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya	81
Grafik 11.	Capaian Perlindungan WNI 2019-2023	95
Grafik 12.	Jumlah Kegiatan KSST Kementerian/ Lembaga 2020-2023	110
Grafik 13.	Klasifikasi Kegiatan KSST dalam Jumlah dan Persentase (2023)	111

DAFTAR SINGKATAN

AIPF	: ASEAN Indo-Pacific Forum
AIS	: Archipelagic and Islands States
AMEROP	: Amerika dan Eropa
Aspasaf	: Asia Pasifik and Ameerika Serikat
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: Association of Southeast Asian Nations
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BHI	: Badan Hukum Indonesia
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
BTA	: Border Trade Agreement
CEPA	: Comprehensive Economic Partnership Agreement
CoE	: Center of Excellences
COP	: Center of Parties
CPTPP	: Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership
CSO	: Civil Society Organisation
EGD	: EU Green Deal
FGD	: Focus Group Discussion
GDDE	: Grand Design Diplomasi Ekonomi
GPEDC	: Global Partnership for Effective Development Co-operation
EIU	: Economist Intelligence Unit
EUDR	: European Union Deforestation Regulation
FDI	: Foreign Direct Investment
FTA	: Free Trade Agreement
IKU	: Indeks Kinerja Utama

IMF	: International Monetary Fund
IPEF	: Indo-Pacific Economic Framework
ITWG	: Intersessional Technical Working Group
K/L	: Kementerian/Lembaga
KLN	: Kebijakan Luar Negeri
Kemenkominfo	: Kementerian Komunikasi dan Informasi
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
KemenPPN	: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
KPI	: Kerjasama Pembangunan Nasional
KSST	: Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LDKPI	: Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
LNG	: Liquefied Natural Gas
MIKTA	: Meksiko Indonesia Korea Turki dan Australia
MOU	: Memorandum of Understanding
NATO	: North Atlantic Treaty Organization
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
OI	: Organisasi Internasional
PERHEPI	: Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia
PN	: Prioritas Nasional
Polugri	: Politik Luar Negeri
PTA	: Preferential Trade Agreement
TPPE	: Tim Penguatan Pemulihan Ekonomi
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
PDB	: Produk Domestik Bruto
PDNS	: Pusat Data Nasional Sementara
PIF	: Pasific Islands Forum
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
PNB	: Pendapatan Nasional Bruto

PTDI	: Perseroan Terbatas Dirgantara Indonesia
RCEP	: Regional Comprehensive Economic Partnership
RI	: Republik Indonesia
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
ROP	: Rule of Procedure
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RRT	: Republik Rakyat Tiongkok
Satker	: Satuan Kerja
SDM	: Sumber Daya Manusia
SG	: Singapura
SOP	: Standard Operational Procedure
STM	: Special Technical Meeting
TTI	: Trade, Tourism and Investment
Tim Kornas KSS	: Tim Koordinasi Nasional Kerjasama Selatan-Selatan
UE	: Uni Eropa
UMKM	: Usaha Mikro Kecil dan Menengah
USD	: United States Dollar
WNI	: Warga Negara Indonesia
WTO	: World Trade Organisation
ZEE	: Zone Ekonomi Eksklusif



PENGANTAR EDITOR





Setelah pandemi COVID-19 mereda di akhir tahun 2022, dunia mengalami polikrisis selama tahun 2023-2024. World Economic Forum (2023) menggunakan istilah polikrisis untuk menyebut suatu kluster risiko global yang saling terkait dengan efek yang berlipat ganda - menghadirkan dampak yang sangat serius dengan cakupan yang lebih besar dan meluas. Risiko-risiko tersebut berakar baik dari berbagai peristiwa di masa lalu yang belum terselesaikan, maupun berbagai risiko-risiko masa depan yang mulai mencuri perhatian dunia di masa kini.

Perang Rusia-Ukraina yang telah terjadi sejak Februari 2022 belum menunjukkan tanda-tanda resolusi. Bahkan, dalam periode 2023-2024, masih terjadi eskalasi perang di antara kedua negara tersebut. Konflik antara Ukraina dan Rusia tersebut telah terbukti memicu krisis berskala global dan bersifat multisektoral - mendisrupsi

berbagai sektor seperti energi, pangan, dan rantai pasok di berbagai negara. Ketegangan geopolitik semakin meningkat sejak 7 Oktober 2023 dengan meletusnya perang Israel-Hamas di Gaza yang berpotensi mengganggu pasokan minyak, menyebabkan kenaikan harga komoditas secara drastis, mengguncang pasar, meningkatkan ketegangan di wilayah Timur Tengah, dan berdampak negatif pada perekonomian nasional Indonesia. Konflik-konflik tersebut telah memicu berbagai negara untuk melakukan tindakan *friendshoring* dan juga memunculkan krisis pengungsi yang menjadi tantangan bagi perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI).

Selain itu, perubahan iklim juga merupakan tantangan serius lain yang mengancam ketahanan ekonomi berbagai negara. Fenomena alam seperti kekeringan menyebabkan banyak negara kesulitan memenuhi kebutuhan pangan mereka dan berpotensi mengurangi PDB dunia sebanyak 18% per tahun 2050. Perubahan iklim juga menimbulkan berbagai peraturan yang dapat mengganggu operasionalisasi ekspor Indonesia di berbagai pasar global.

Perkembangan teknologi, terutama digitalisasi, juga terbukti membawa tantangan bagi pergerakan manusia. Maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan basis operasional daring menimbulkan area baru dalam ranah perlindungan WNI.

Dalam konteks multi-krisis ini, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional. Indonesia terus berupaya mewujudkan visi luar negerinya menjadi “**negara yang berpengaruh dan mandiri di Indo-Pasifik**.” Untuk itu, Indonesia terus mengembangkan kebijakan luar negeri yang tangguh dalam menghadapi berbagai krisis global tersebut, dan berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien. Komitmen ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadikan Indonesia sebagai negara nusantara yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan, dengan harapan Indonesia dapat segera keluar dari *middle income trap*.

Pemerintah Indonesia telah meletakkan fondasi pengembangan pembangunan politik luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam dokumen RPJMN tersebut, telah dirumuskan Arah Kebijakan dan Strategi untuk mewujudkan arah tersebut. Kinerja pelaksanaan Kebijakan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 7, yaitu Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, serta Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik yang mencakup:

1. Memperkuat integritas wilayah NKRI dan perlindungan WNI di luar negeri melalui:
 - Peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara;
 - Penegakan norma dan hukum internasional dalam melindungi kedaulatan Indonesia;
 - Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional;
 - Penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, dan multilateral serta meningkatkan upaya pencegahan terjadinya masalah WNI di luar negeri;
 - Penguatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam melakukan perlindungan kepada WNI.
2. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional melalui:
 - Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru;
 - Penciptaan lingkungan yang mendukung peningkatan partisipasi swasta dalam kerja sama pembangunan internasional;
 - Penguatan KSST untuk mendukung perdagangan dan investasi;
 - Penguatan lembaga pemberi bantuan dan kerja sama pembangunan internasional.

3. Meningkatkan citra positif Indonesia di dunia internasional melalui:
 - Penyusunan kebijakan diplomasi publik Indonesia untuk meningkatkan koordinasi di tingkat nasional;
 - Peningkatan peran-serta aktor non-pemerintah dalam diplomasi publik yang inklusif.
4. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat regional dan global melalui:
 - Peningkatan inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global;
 - Peningkatan peran aktif Indonesia dalam perdamaian dunia;
 - Peningkatan harmonisasi dan koordinasi di dalam negeri untuk melaksanakan komitmen internasional;
 - Penataan peran, struktur, SDM, dan fungsi K/L dalam melaksanakan kebijakan luar negeri Indonesia.

Gambar 1. Isu-isu Strategis Prioritas Polugri 2020-2024



Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sebagai penjuror dan garda terdepan pelaksanaan kebijakan luar negeri berkomitmen untuk mewujudkan arah dan strategi yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri, Kemenlu juga berkomitmen untuk mendukung perwujudan Prioritas Nasional 1 (PN 1), dengan menekankan diplomasi ekonomi, sebagai Prioritas 1 dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Prioritas Politik Luar Negeri Kemenlu bertumpu pada “Prioritas 4+1” yakni: (1) Penguatan Diplomasi Ekonomi; (2) Diplomasi Pelindungan; (3) Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan; (4) Peningkatan Kontribusi dan Kepemimpinan Indonesia di Kawasan dan Dunia; dan (5) Penguatan Infrastruktur Diplomasi.

Penekanan pada PN 1 melalui diplomasi ekonomi ini menjadi semakin penting, seperti yang tercermin melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023, yang mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,” serta Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, yang mengusung tema: “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”

Pengembangan inisiatif strategis untuk mendukung pencapaian RKP Tahun 2023, khususnya terkait pemulihan ekonomi nasional secara inklusif dan berkelanjutan dan penguatan ekonomi dengan mengoptimalkan pemberdayaan perangkat diplomatik di Pusat dan perwakilan RI di luar negeri dilakukan untuk memfasilitasi para pelaku usaha melalui Tim Penguatan Pemulihan Ekonomi (TPPE). Ruang lingkup upayanya di antaranya:

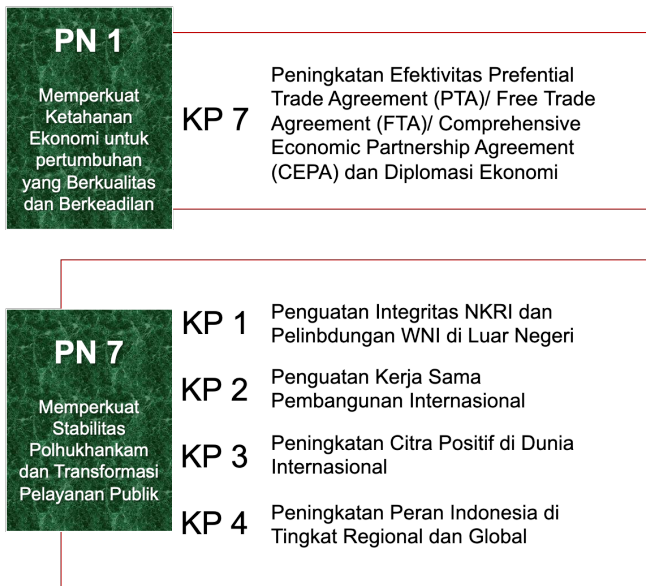
- Diplomasi untuk mendukung peningkatan kapasitas usaha BUMN dan/atau anak perusahaannya.
- Diplomasi untuk mendukung penguatan perdagangan dan fasilitasi penanaman modal/investasi *inbound* dan *outbound*.
- **Diplomasi** untuk mendukung pemulihan sektor pariwisata dan memfasilitasi perjalanan lintas batas yang terdampak pandemi.

Diplomasi terkait lainnya yang mendukung penguatan pemulihan dan ketahanan ekonomi nasional, seperti pengembangan Ekonomi Digital dan Kreatif, Ketahanan Pangan dan Alternatif Sumber Daya, Industri Strategis, Ekonomi Hijau, dan ekspor komoditas unggulan.

Mempertimbangkan komitmen untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut, maka uraian dalam buku ini juga akan menyampaikan hasil evaluasi atas dukungan kebijakan luar negeri terhadap Prioritas Pembangunan Nasional tahun 2023-2024, termasuk indikator PN 1, terutama melihat kinerja perwakilan luar negeri terhadap penguatan perdagangan dan investasi Indonesia, serta kesepakatan-kesepakatan internasional untuk mendukung diplomasi ekonomi Indonesia. Diantaranya:

- Indikator capaian kinerja kebijakan luar negeri dalam mendukung Prioritas Nasional 7, yaitu Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, utamanya pada Program Prioritas Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri dan turunannya yang tertuang pada RPJMN 2020-2024 dan RKP 2023.
- Indikator capaian kinerja kebijakan luar negeri dalam mendukung Prioritas Nasional 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
- Identifikasi tantangan-tantangan masa kini yang akan dievaluasi demi mempertimbangkan dampaknya terhadap progres pembangunan nasional secara umum di tengah dunia yang sedang menghadapi poli krisis.
- Rekomendasi kebijakan dan arah dan strategi dukungan kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP tahunan berikutnya.

Gambar 2. Ruang Lingkup Prioritas Nasional 1 dan 7 yang Didukung Kebijakan Luar Negeri Dan Kerjasama Pembangunan Internasional



Selanjutnya, buku ini memberikan gambaran terkait dengan:

- Capaian kinerja kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, terutama dalam mendukung Prioritas Nasional 1 dan 7. Capaian ini dapat dievaluasi melalui data dan informasi terkait indikator kinerja masing-masing arah kebijakan dan strategi.
- Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam meningkatkan kinerja dan capaian pembangunan nasional Indonesia dalam mendukung Prioritas Nasional, sehingga dapat dijadikan refleksi di masa yang akan datang.





Metode Analisa Data

Metode evaluasi terhadap dukungan kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan yang digunakan dalam buku ini adalah analisis kesenjangan (*gap analysis*) dan analisis dampak (*policy impact analysis*). *Gap analysis* digunakan untuk menemukan perbedaan antara keadaan saat ini dengan keadaan yang ingin dicapai. Dengan melakukan komparasi di antara keduanya, maka dapat ditemukan celah yang menghalangi tercapainya target awal perencanaan. Dengan menggunakan metode tersebut, analisis ini mempunyai tujuan untuk mengubah situasi saat ini demi mencapai situasi yang dianggap ideal, atau dalam hal ini, berarti sesuai dengan RPJMN dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Metode ini juga bermanfaat dalam aspek evaluasi lainnya, terutama:

- Mengidentifikasi target-target yang menghadapi tantangan yang signifikan dalam pengerjaannya.
- Jika dipadukan dengan *policy impact analysis* yang digunakan untuk merumuskan kebijakan yang efektif serta mengevaluasi dampaknya terhadap pemangku kepentingan, hal ini dapat digunakan untuk merumuskan berbagai strategi alternatif pembangunan sebagai upaya adaptasi terhadap perubahan situasi dan kondisi lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Kedua metode ini digunakan untuk menggali relasi antar indikator kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan dampak yang diharapkan dari pelaksanaan kebijakan tersebut, pengaruhnya

terhadap status quo, serta jenis dampak yang dihasilkan, baik positif maupun negatif.

Alur Pelaksanaan Evaluasi

Alur pelaksanaan evaluasi dukungan kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional dilakukan dalam beberapa tahap sebagaimana divisualisasikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. Alur Pelaksanaan Evaluasi Dukungan Kebijakan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional



¹ Sora Kim dan Yingru Ji. "Gap Analysis." The International Encyclopedia of Strategic Communication. 2018.

https://www.researchgate.net/publication/327879112_Gap_Analysis

² "Policy Impact Analysis resources to support new policy development."

Australian Public Service Academy. Juli 5, 2024.

<https://www.apsacademy.gov.au/policy-impact-analysis-resources-support-new-policy-development#:~:text=Impact%20analysis%20is%20a%20tool,complete%20various%20impact%20analysis%20requirements.>

Langkah-langkah dalam *Gap Analysis*

Gap Analysis dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh capaian kinerja berada di bawah atau justru di atas target yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2024-2029 dan RKP Tahun 2023 yang telah diturunkan dalam rencana strategis Kementerian terkait.

Berikut adalah langkah-langkah umum dalam menjalankan *gap analysis*:

1. **Penentuan Tujuan Evaluasi:** Menentukan hasil yang ingin diketahui dari hasil evaluasi. Hal ini dapat berupa rencana strategis, indikator kinerja, dan lainnya.
2. **Identifikasi Capaian Kinerja:** Mengidentifikasi dan mendokumentasikan capaian ataupun situasi eksisting. Hal ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang.
3. **Identifikasi Target Kinerja:** Menentukan kondisi atau target ideal yang diinginkan sebagai parameter pembandingan.
4. ***Gap Analysis*:** Membandingkan antara target dan capaian demi menemukan celah di antara keduanya dalam aspek proses, pengetahuan, kebijakan, hingga sumber daya.
5. **Identifikasi Faktor Penyebab:** Setelah perbedaan telah diidentifikasi, maka faktor utama penyebab dari celah tersebut harus ditentukan.
6. **Tindak Lanjut dan Mitigasi:** Penyusunan mekanisme alternatif dalam mencapai target ataupun mitigasi skenario apabila target yang ditetapkan melebihi apa yang mungkin dicapai saat ini. Jika terdapat celah yang positif maka dapat dirumuskan skenario

perencanaan untuk mengembangkan kebijakan secara komprehensif.

- 7. Implementasi dan Pemantauan:** Implementasi tindak lanjut sebagai tindakan perbaikan harus diterapkan dan terus dipantau perkembangannya. Skenario cadangan harus dipersiapkan sebagai tindakan korektif apabila terdapat kendala yang kembali muncul.

Untuk memudahkan evaluasi terhadap dukungan kebijakan luar negeri ini, pengukuran capaian kinerja ini juga memperhatikan:

- 1) Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2023. Laporan ini menyajikan hasil evaluasi, khususnya dukungan kebijakan luar negeri pada PN 1 yang terkait dengan indikator diplomasi ekonomi, dan PN 7 yang terkait dengan indikator Pelindungan WNI, Perundingan Perbatasan, Peningkatan Citra Indonesia dan Peran Kepemimpinan Indonesia di forum internasional dan regional - termasuk prakarsa Indonesia yang telah diterima di forum-forum multilateral baik di tingkat global maupun regional.
- 2) Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang disampaikan pada awal tahun 2024.
- 3) Narasumber-narasumber terkait yang menyampaikan hasil evaluasi capaian kuantitatif dan kualitatif terkait kinerja diplomasi ekonomi, pelindungan WNI dan perundingan perbatasan pada *Focus Group Discussion* yang telah diselenggarakan Direktorat Polugri dan KPI, Kementerian PPN/Bappenas.
- 4) Khusus terkait KP 2 berkenaan Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional, evaluasi didasarkan pada hasil penilaian dan diskusi reflektif yang dilaksanakan Tim Koordinasi Nasional Kerja sama Selatan-Selatan (Tim Kornas KSS) dengan melibatkan K/L yang melaksanakan program Kerja sama Selatan-selatan dan Triangular. Sumber data primer yang digunakan adalah data-data kegiatan KSST yang telah dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga.

Tabel 1. Identifikasi Capaian Kinerja atas Target yang telah Ditetapkan di RKP 2023

Prioritas Nasional (PN) dan Kinerja Prioritas (KP)	Indikator Capaian Kinerja	Sumber data dan penilaian evaluasi (Persentase dan Indeks Capaian)
PN 7		
KP 1 Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perundingan dan kesepakatan perbatasan • Jumlah penyelesaian kasus WNI di luar negeri • Jumlah Pemulangan WNI dari Luar negeri (evakuasi akibat konflik, TPPO, dokumentasi, dll) 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 • Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2024 • Paparan Narasumber pada FGD Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI
KP 2 Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah kegiatan KSST yang telah dilaksanakan oleh K/L di 2023 dan 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • Data yang dilaporkan K/L pelaksana kegiatan KSST • Paparan perwakilan K/L pada FGD Evaluasi KSST
KP 3 Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	Persentase pemberitaan positif media massa internasional terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 • Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2024
KP 4 Peningkatan Peran Indonesia di tingkat regional dan global	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah keketuaan Indonesia dalam forum internasional • Jumlah prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam forum regional dan global 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 • Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2024
PN 1		
KP 7 Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perjanjian perdagangan dan investasi • Jumlah penetrasi pelaku usaha Indonesia pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2023 • Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2024

Prioritas Nasional (PN) dan Kinerja Prioritas (KP)	Indikator Capaian Kinerja	Sumber data dan penilaian evaluasi (Persentase dan Indeks Capaian)
Agreement (FTA)/ Comprehensive Economic Partnership Agreement dan diplomasi ekonomi	pasar global <ul style="list-style-type: none"> ● Volume ekspor-impor ● Jumlah investasi ke dalam negeri (<i>inbound investment</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> ● Paparan Narasumber pada FGD Diplomasi Ekonomi

Langkah-langkah dalam Analisis Dampak Kebijakan

Analisis Dampak Kebijakan dimaksudkan untuk melihat dukungan capaian kinerja kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan pada perwujudan Prioritas Nasional, terutama untuk melihat apakah dampak kebijakan sesuai dengan tujuan yang direncanakan dan rencana kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Langkah-langkah analisis dampak kebijakan (*policy impact analysis*) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. **Penentuan Kebijakan:** Mengidentifikasi dan mendefinisikan kebijakan yang akan dievaluasi, seperti UU, peraturan pemerintah, program-program sosial, dan lainnya.
2. **Identifikasi Dampak:** Mengidentifikasi dan mendefinisikan potensi atau kondisi riil yang dapat timbul dari pelaksanaan kebijakan tersebut.
3. **Penentuan Indikator:** Dampak-dampak yang telah teridentifikasi akan diturunkan dalam bentuk indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur dampak tersebut secara kuantitatif.

4. **Pengumpulan Data:** Data akan dikumpulkan secara primer dan sekunder, mencakup data historis, data teritorial, dan lainnya.
5. **Analisis Dampak:** Membangun analisis dan hipotesis terhadap data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan indikator yang telah ditentukan.
6. **Evaluasi Dampak:** Hasil analisis kemudian dievaluasi untuk menilai apakah dampak kebijakan sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan rencana kebijakan yang telah ditetapkan.
7. **Rekomendasi:** Perumusan rekomendasi kebijakan untuk membantu para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan yang lebih komprehensif berdasarkan hasil evaluasi yang empiris.

Untuk menyederhanakan analisis dampak kebijakan, terutama pada langkah kedua dan ketiga, digunakan spektrum penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Penilaian ini menggunakan sejumlah indikator relevan, dengan skala dari 1 (sangat rendah) hingga 5 (sangat tinggi). Spektrum ini memungkinkan analisis dampak untuk mengidentifikasi efektivitas kebijakan yang diimplementasikan dan menentukan apakah diperlukan intensifikasi strategi, diversifikasi kebijakan, atau perubahan arah strategi dan kebijakan untuk mencapai hasil yang ditargetkan.

Spektrum penilaian ini dapat dilihat pada Gambar berikut.

Gambar 4. Spektrum Penilaian Dampak Capaian Kinerja




Penggunaan metode *gap analysis* dan analisis dampak kebijakan bermanfaat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi yang diharapkan dapat lebih efektif untuk memastikan capaian kinerja betul-betul dapat mewujudkan capaian Prioritas Nasional yang ditetapkan.

Perumusan Rekomendasi Kebijakan

Rekomendasi kebijakan pertama-tama dilakukan dengan mempertimbangkan analisis capaian atas target yang telah ditetapkan, namun dengan tetap melihat secara holistik, termasuk mempertimbangkan tantangan-tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan dukungan pelaksanaan kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional pada pencapaian Prioritas Nasional.

Selain memperhatikan hasil analisis capaian, perumusan rekomendasi juga melihat rekomendasi-rekomendasi yang telah dipaparkan oleh para narasumber dalam FGD yang telah dilaksanakan dalam rangka evaluasi dukungan KLN dan KPI. Rekomendasi yang telah dituangkan pada dokumen-dokumen seperti Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri juga menjadi bahan masukan yang berharga. Dengan demikian, rumusan rekomendasi mencerminkan temuan hasil analisis kesenjangan dan dampak, pemikiran narasumber yang didasarkan pada temuan di lapangan maupun teoretik, serta dokumen-dokumen resmi. Pendekatan ini dapat menghasilkan sinergi yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk perumusan rekomendasi yang benar-benar mempercepat peningkatan target capaian di masa yang akan datang.



PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Bagian ini mendeskripsikan berbagai fenomena internasional dari seluruh penjuru dunia yang telah mempengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional di tahun 2023-2024, serta berpotensi berpengaruh terhadap kinerja Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Dinamika hubungan internasional di kawasan regional dan global menjadi faktor eksternal yang patut dipertimbangkan dalam perumusan kebijakan luar negeri Indonesia



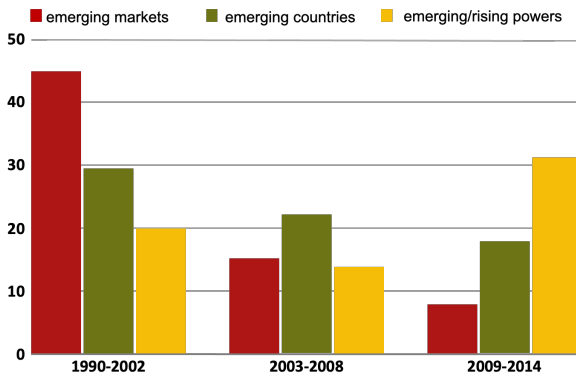


Peran *Emerging Power* dalam Politik dan Ekonomi Global

(Telaah Konseptual)

*I*ndonesia sering disebut sebagai *emerging market* dan *emerging power* yang pengaruhnya patut diperhitungkan oleh negara-negara *major power* dalam konstelasi geopolitik dan geoekonomi. Terdapat banyak peluang yang dapat digunakan Indonesia sebagai momentum untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya. Namun, kedua status tersebut menyiratkan berbagai tantangan tersendiri. Konsepsi *emerging market* dan *emerging power* perlu didalami untuk menggali potensi yang dapat dimaksimalkan oleh Indonesia dalam meningkatkan kinerjanya dalam kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan.

Grafik 1. Perkembangan Literatur tentang *Emerging Markets* dan *Emerging Power*



Sumber: Lucas de Oliveira Paes (2017). *Narratives of Change and Theorisations on Continuity: the Duality of the Concept of Emerging Power in International Relations*. Contexto Internacional, vol. 39(1) Jan/Apr 2017

Konsepsi *emerging market* mulai populer digunakan pada era 1990an. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional menggunakan istilah tersebut dengan maksud yang sama dengan konsep negara-negara berkembang (*developing countries*) yang berhasil meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Nasional Bruto (PNB)-nya. Pada akhir tahun 1990an, terminologi *emerging market* dipakai secara khusus untuk menyebut negara-negara berkembang yang bertumbuh secara signifikan karena pertumbuhan pendapatan serta signifikansinya pada tata kelola ekonomi global. Peran negara-negara *emerging market* dinilai sangat penting - misalnya tercermin saat terjadinya krisis moneter di Asia. Krisis yang melanda Indonesia dan Korea Selatan serta sejumlah negara ternyata membawa dampak sistemik ke negara-negara lain, termasuk perekonomian global secara keseluruhan. Krisis tersebut mendorong negara-negara maju yang tergabung dalam G7 untuk menginisiasi pembentukan G20 agar

negara-negara *emerging market* memiliki dampak sistemik bagi negara-negara lainnya - baik negara berkembang maupun negara maju.

Istilah ini semakin sering dipakai pada tahun 2000an ketika terjadi krisis finansial di Amerika Serikat yang berdampak luas pada krisis finansial global, termasuk di kawasan Eropa. Terminologi *emerging market* dibedakan dengan istilah *developing countries* secara umum di mana *emerging markets* adalah *developing countries* yang memiliki pengaruh signifikan dalam perekonomian regional dan global. Di tahun 2000an diakui bahwa negara-negara *emerging market* memainkan peran baru penting dalam perekonomian global (Kose, 2008). Negara-negara tersebut memiliki kontribusi besar dalam perdagangan global, baik karena memiliki potensi pasar yang besar maupun komoditas unggulan yang dibutuhkan sisi *supply* pasar global. Daya tarik untuk investasi juga diakui cukup penting yang membuat negara-negara tersebut dapat meningkatkan industrialisasi untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan.

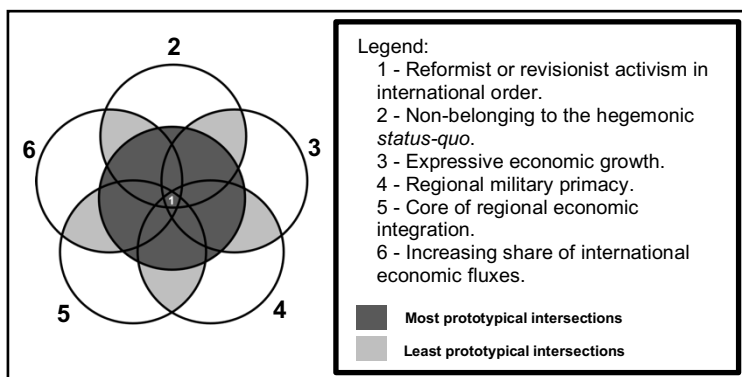
Berbeda dengan konsepsi *emerging market* yang sering dipakai dalam perspektif ekonomi, tidak ada kesepakatan tunggal dalam mendefinisikan konsep *emerging power* dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional. Namun, secara umum, terminologi *emerging power* atau *rising power* digunakan untuk menyebut negara-negara yang pengaruhnya dalam hubungan internasional dipandang meningkat (*countries whose influence in international relations is expected to be currently expanding*). Negara-negara yang disebut sebagai *emerging power* adalah mereka yang memiliki modalitas tertentu dan membuatnya berbeda dengan negara-negara *small power* pada umumnya. Karena modalitas tersebut, peran dan pengaruh mereka harus dipertimbangkan oleh negara-negara yang memiliki status sebagai *major power* maupun *super power*.

Salah satu literatur terkait *emerging power* ditulis oleh Pedro Cezar Dutra Fonseca, et al. (2016) yang mendefinisikan konsep

emerging power sebagai negara-negara yang memiliki perilaku diplomatik yang diarahkan untuk mereformasi atau mereview tatanan internasional, karena mereka memiliki sumber-sumber kekuatan (*power material*) untuk mendukung klaim mereka (*the one whose diplomatic behavior aims to reform or to review the international order, having material support to its claims*).³

Terminologi *emerging power* tidak hanya menitikberatkan atribut *power* yang dimiliki oleh suatu negara, tetapi juga bagaimana *power* tersebut mempengaruhi sikap dan perilaku negara dalam memainkan peran dan pengaruhnya di tingkat regional maupun global. Negara dengan unsur-unsur *power* tersebut melihat dan kemudian terlibat dalam tata kelola internasional, termasuk mengusulkan reformasi dan perbaikan kelembagaan di dalam tata kelola tersebut.

Gambar 5. Prototipe Negara *Emerging Power*



Sumber: Pedro Cezar Dutra Fonseca, et.al (2016), The Concept of Emerging Power in International Politics and Economy, *Brazilian Journal of Political Economy*, vol 36, no1(142), pp 46-69, January-March/2016.

³ Pedro Cezar Dutra Fonseca, et.al (2016), The Concept of Emerging Power in International Politics and Economy, *Brazilian Journal of Political Economy*, vol 36, no1(142), pp 46-69, January-March/2016.

Dalam konteks ini, status sebagai *emerging market* merupakan salah satu atribut *power* yang penting bagi negara untuk memainkan perannya sebagai *emerging power*. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka waktu menengah dan panjang dan besaran kontribusi perekonomian nasional pada perekonomian global. Negara yang disebut *emerging market* adalah mereka yang memiliki kinerja sangat baik dalam ekonomi, seperti besar GDP tahunan, volume perdagangan, arus investasi *inbound* dan *outbound*, inovasi dan teknologi, serta kapasitasnya sebagai pasar global. Modalitas ekonomi sekaligus menjadi instrumen untuk memainkan perannya sebagai negara *emerging power* jika kemudian negara tersebut memiliki intensi untuk menginisiasi reformasi tata kelola global di berbagai bidang.

Para pengkaji Hubungan Internasional telah menganalisis bagaimana *emerging power* memainkan perannya dalam tata kelola perdagangan, keuangan, kapitalisme, pembangunan dan kesehatan global. Kemampuan mereka memainkan peran dipengaruhi oleh tiga karakteristik, yakni kapabilitas material, ambisi diplomatik, dan pengakuan dari negara-negara yang berada pada *level* / status yang sama. Kapabilitas material mencakup sumber-sumber militer dan ekonomi yang terus mengalami peningkatan. Beberapa analisis menekankan kapabilitas ekonomi menjadi sumber kapabilitas absolut yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi, perluasan pasar dan keuntungan demografik (Schwab 2011, Acharya 2014, Chin 2013, Abdenur and Folly 2015; Narlikar 2010b). Sementara itu, integrasi dalam perdagangan dunia, dominasi dalam hubungan ekonomi regional, dan daya tarik bagi investor asing merupakan sumber-sumber penting bagi kapabilitas *emerging power* (Armijo 2007, Jordaan 2003). Namun penulis-penulis lain menekankan pentingnya sumber militer untuk memposisikan negara tersebut dengan kekuatan hegemon ataupun *status quo* dalam politik global.

Laura C. Mahreback (2019) berargumen bahwa negara *emerging power* yang ingin memainkan pengaruhnya juga harus memiliki ambisi

diplomatik.⁴ Ambisi diplomatik mengacu pada upaya *emerging power* untuk mewujudkan keterlibatan dan signifikansi lebih tinggi dalam isu-isu dunia atau untuk memainkan pengaruh yang lebih besar dalam menentukan aturan dan hasil dari tata kelola global. Unsur kedua ambisi diplomatik adalah upaya serius untuk memainkan pengaruh yang lebih besar pada aturan-aturan global dan *outcome*-nya. *Emerging power* harus siap untuk berhadapan dengan negara *major power* seperti Amerika Serikat.

Karakteristik ketiga adalah pengakuan dari negara-negara yang berada pada level yang sama. Hal ini menjadi krusial karena *emerging power* kerap memposisikan dirinya sebagai perwakilan dari mitra-mitra negara berkembang dalam tatanan global (Lima and Hirst 2006). Kesamaan sejarah sebagai bangsa yang marginal dieksploitasi dan disingkirkan dari urusan global (Muhr 2016) dan persamaan masalah domestik yang sama-sama besar (Shaw, Cooper, and Antkiewicz 2007) meningkatkan tendensi solidaritas antar negara-negara berkembang. Banyak negara ini juga sering menyebut dirinya sebagai bagian dari *Global South*.

Pengakuan dari *emerging powers* lain dilihat penting sebagai cara untuk memberikan legitimasi bagi ambisi diplomatik negara tersebut, sekaligus membuka jalan baru bagi peningkatan kapabilitas material *emerging power* tersebut. Ini misalnya dapat dilakukan dengan bergabung dalam rezim internasional yang melibatkan negara-negara dengan pengaruh *power* yang signifikan dengan posisi yang berseberangan dengan negara-negara *major power* yang cenderung mempertahankan *status quo* dan anti perubahan dalam tatanan global. Cara lain yang mungkin adalah dengan memainkan peran kepemimpinan dalam organisasi-organisasi internasional

⁴ Mahrenbach, Laura C. 2019. "Conceptualising Emerging Powers." In *The Palgrave Handbook of Contemporary International Political Economy*, edited by Timothy M. Shaw, Laura C. Mahrenbach, Renu Modi and Yi-chong Xu, 217-232. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

seperti PBB dan WTO di mana negara-negara *major power status quo* terus berupaya untuk memainkan peran dominannya.

Penulis lain menyebut pengakuan dari negara-negara *major power* yang telah memainkan peran dominan penting bagi negara yang ingin menjadi *emerging power* (Lesage et al. 2013, Vestergaard and Wade 2015). Pengakuan ini diakui diperlukan untuk mewujudkan ambisi diplomatik mereka dalam institusi-institusi formal tata kelola global.

Indonesia telah mendapat pengakuan penting sebagai salah satu *emerging market*, salah satunya tercermin dari keanggotaannya di G20. Keanggotaannya di dalam forum utama kerja sama ekonomi global tersebut merupakan pengakuan terhadap keberhasilan Indonesia untuk menjaga pertumbuhan ekonominya dan mewujudkan produk domestik bruto (PDB) yang mencapai peringkat 16 tertinggi diantara perekonomian dunia. Pengakuan sumber material ekonomi ini tentu saja tidak cukup jika Indonesia ingin menjadi *emerging power* yang diakui negara-negara *emerging power* lainnya dan negara-negara *major power* yang terus berupaya memainkan pengaruhnya dalam tata kelola global. Indonesia perlu terus meningkatkan sumber-sumber *power* material, memiliki ambisi diplomatik untuk membentuk tata kelola global dan mendapat pengakuan dari negara-negara *emerging power* lain dan *major power* yang ada.

Telaah konseptual ini melihat pentingnya Indonesia terus mengedepankan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan visi sebagai negara maju di tahun 2045, dan sekaligus menekankan pentingnya Indonesia memainkan peran dan kepemimpinan di tingkat regional dan global sehingga di tahun 2045 Indonesia menjadi salah satu *middle power* yang patut diperhitungkan dalam dinamika tata kelola global.



Lingkungan Strategis 2023 - 2024

*D*inamika politik internasional pada tahun 2023 dan 2024 ditandai terjadinya polikrisis - sebuah fenomena yang timbul akibat bermunculannya berbagai krisis yang bersumber dari berbagai masalah yang saling berkaitan. Di tahun 2023, dunia dihadapkan oleh berbagai krisis. Krisis tradisional seperti inflasi, biaya hidup, perang dagang, dan konfrontasi geopolitik; serta krisis kontemporer seperti fenomena deglobalisasi, lambannya perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia, akselerasi perkembangan teknologi yang tak terkendali, serta krisis iklim menjadi tantangan tersendiri - membentuk lanskap global yang penuh gejolak dan ketidakpastian⁵.

⁵ World Economic Forum, "Global Risks Report 2023" (World Economic Forum, January 2023), <https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/digest/>.

Perang antara Israel dan Hamas

Konflik Israel dan Hamas yang kembali mencuat per Oktober 2023 memiliki dampak yang multisektoral - tak terkecuali ekonomi. Pertama, ditinjau dari dampaknya terhadap arus investasi global, krisis mendorong investor untuk menyalurkan investasinya ke instrumen yang lebih 'stabil' (*safe haven instruments*) seperti Obligasi Pemerintah dan mata uang AS. Alhasil, nilai dolar semakin menguat dan mempengaruhi berbagai harga komoditas impor - yang turut mempengaruhi tingkat harga dalam negeri untuk komoditas tersebut⁶.

Dampak skala global lainnya adalah potensi konflik ini menyebabkan stagnasi ekonomi global. Melihat signifikansi negara-negara Timur Tengah dalam rantai pasok minyak dunia, ketegangan geopolitik ini telah menyebabkan meroketnya harga minyak dunia. Hal ini berpotensi menyebabkan inflasi berskala besar - layaknya apa yang terjadi pada tahun 1973. Per akhir tahun 2023, harga minyak dunia telah mengalami peningkatan sebesar 3-4%, dan diproyeksikan akan terus meningkat seiring naiknya eskalasi hingga akhir 2024⁷. Diiringi dengan ketegangan geopolitik Ukraina-Rusia yang telah mendisrupsi pasokan minyak global - krisis harga semakin terakselerasi.

Selain itu, konflik antara keduanya juga menyebabkan disrupsi di Laut Merah - salah satu rute perdagangan terpenting di dunia. Keterlibatan Kelompok Houthi yang mencoba memberikan tekanan kepada Israel dengan melancarkan serangan di perairan tersebut - menyebabkan terhambatnya arus logistik global. Kapal-kapal yang menghindari Laut Merah harus menempuh rute yang lebih panjang melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, yang meningkatkan biaya

⁶ Chief Investment Office. "Safe-haven Assets in Focus as Israel-Hamas War Continues." UBS Insights, September 2, 2024. <https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2023/latest-16102023.html>.

⁷ Robin Wright, "The Five Global Dangers from the Gaza War," Wilson Center, October 2023, <https://www.wilsoncenter.org/article/five-global-dangers-gaza-war>.

bahan bakar dan mengakibatkan kenaikan harga pengiriman hingga dua kali lipat. Hal ini berdampak pada rantai pasokan global, terutama untuk minyak mentah dan gas alam cair (LNG), karena sekitar 12% perdagangan minyak laut dan 8% LNG global melewati Terusan Suez yang terhubung dengan Laut Merah⁸.

Hingga Oktober 2024, intensitas konflik antara Israel dan Hamas terus meningkat. Laporan menunjukkan bahwa jumlah kematian warga sipil telah mencapai sekitar 27.748 orang. Eskalasi konflik ini juga mulai menimbulkan *spillover* di seluruh wilayah Timur Tengah. Ketegangan meningkat di Lebanon, di mana kelompok Hizbullah mungkin terlibat lebih dalam, sementara ketidakstabilan di Gaza dapat memicu protes dan ketidakpuasan di negara-negara tetangga seperti Yordania dan Mesir, yang sudah menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kelompok-kelompok ekstremis di kawasan ini dapat memanfaatkan ketidakpastian yang dihasilkan dari konflik untuk memperkuat pengaruh mereka⁹.

Berlanjutnya Konflik antara Rusia dan Ukraina

Konflik Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 adalah hasil dari ketegangan yang berkepanjangan antara kedua negara, dipicu oleh ambisi Rusia untuk memperluas pengaruhnya di wilayah bekas Uni Soviet dan kekhawatiran Ukraina tentang kehilangan kedaulatan. Rusia melancarkan invasi skala besar ke Ukraina, mengklaim tujuan untuk melindungi warga berbahasa Rusia di Ukraina Timur dan

⁸ Soni, Paroma, and Giovanna Coi. "By The Numbers: How Conflict in the Red Sea Disrupts Global Trade." Politico, March 5, 2024. <https://www.politico.eu/article/how-conflict-red-sea-disrupts-global-trade-by-the-numbers-houthis-shipping/>.

⁹ Christina Bouri, "The Israel-Hamas War: The Humanitarian Crisis in Gaza," Council on Foreign Relations, February 9, 2024, <https://www.cfr.org/in-brief/israel-hamas-war-humanitarian-crisis-gaza>.

mencegah negara tersebut bergabung dengan NATO¹⁰. Invasi ini memicu reaksi internasional yang kuat, termasuk sanksi ekonomi terhadap Rusia dari negara-negara Barat dan dukungan militer bagi Ukraina. Konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dengan jutaan pengungsi dan peningkatan ketegangan geopolitik di Eropa dan dunia.

Konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina merupakan salah satu ketegangan yang sangat signifikan pada tahun 2022. Walaupun perang diantara keduanya berlangsung di Eropa Timur, namun dampak perang ini dirasakan oleh berbagai belahan dunia – tak terkecuali Indonesia. Konflik ini memperburuk tekanan inflasi di Indonesia melalui lonjakan harga minyak global yang berimplikasi kepada kenaikan biaya transportasi dan produksi, yang berdampak pada ekonomi secara keseluruhan. Inflasi ini menjadi tantangan besar bagi Indonesia, yang masih berusaha pulih dari dampak ekonomi pandemi COVID-19.

Selain itu, baik Rusia maupun Ukraina juga merupakan importir gandum terbesar kedua bagi Indonesia. Per 2023, kedua negara menyumbang hampir 30% dari total impor gandum dalam negeri¹¹. Perang ini tentunya menghambat aktivitas ekspor ini dan menaikkan harga komoditas tersebut di Indonesia. Indonesia juga merupakan pasar terbesar ke-4 bagi komoditas pupuk Rusia, dan menurunnya suplai sedikit-banyak berdampak kepada harga dan produktivitas

¹⁰ Center for Preventive Action, "Global Conflict Tracker: War in Ukraine," Council on Foreign Relations, October 2024, <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>.

¹¹ Agustina Melani, "Jokowi: Indonesia Impor 11 Juta Ton Gandum, Hampir 30 Persen dari Ukraina dan Rusia," *liputan6.com*, September 29, 2023, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5410560/jokowi-indonesia-impor-11-juta-ton-gandum-hampir-30-persen-dari-ukraina-dan-rusia?page=2>.

komoditas agrikultur nasional – terlebih para petani yang bergantung pada pupuk subsidi yang semakin menurun kuantitasnya¹²¹³.

Fenomena *Friendshoring* dan Deglobalisasi

Tantangan lain yang muncul dari perubahan geopolitik ini adalah fenomena *friendshoring*. *Friendshoring* sendiri merupakan suatu frasa yang diperkenalkan pada tahun 2022 untuk menggambarkan perilaku dimana negara-negara lebih memilih untuk menjalin hubungan dagang dengan mereka yang mempunyai prinsip dan ideologi yang sama – mengesampingkan efisiensi biaya dan kualitas komoditas.¹⁴ Alhasil, negara-negara akan menjauhi mitra yang dianggap riskan atau berpotensi mengalami guncangan politik dan ekonomi di masa mendatang.

Tren *friendshoring* menjadi indikasi kuat tergerusnya interdependensi antar negara dan institusi lainnya dalam politik internasional pasca-pandemi, dan hal ini memiliki berbagai implikasi. Fragmentasi perdagangan seiring bermunculannya berbagai blok-blok dagang yang mengeksklusikan negara tertentu, diversifikasi dan peralihan arus investasi berbagai negara, konsentrasi arus ekspor-impor ke beberapa negara tertentu saja, serta dependensi lebih tinggi ke kelompok negara-negara tertentu mengingat negara-negara besar menjadi semakin selektif dalam memilih mitra. Secara keseluruhan, praktik ini berpotensi memperluas polarisasi geopolitik yang telah

¹² Elizabeth Wishnick, "Ukraine's Ripple Effect on Russia's Indo-Pacific Horizon," CNA, January 30, 2023, <https://www.cna.org/our-media/indepth/2023/01/ukraines-ripple-effect-on-russias-indo-pacific-horizon>.

¹³ Novianti Setuningsih, "Jokowi Sebut Pupuk Subsidi Langka Karena Perang Rusia-Ukraina," Kompas, January 4, 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/04/12220811/jokowi-sebut-pupuk-subsidi-langka-karena-perang-rusia-ukraina-ganjar-ada>.

¹⁴ Stefan Ellerbeck, "What's the Difference Between 'Friendshoring' and Other Global Trade Buzzwords?," World Economic Forum, September 10, 2024, <https://www.weforum.org/agenda/2023/02/friendshoring-global-trade-buzzwords/>.

terjadi (terlebih antara ekonomi besar di Negara-negara Utara dan Selatan).

Hal ini dapat membawa ancaman maupun kesempatan tersendiri bagi Indonesia. *Friendshoring* menawarkan Indonesia peluang untuk meningkatkan *foreign direct investment* (FDI) – seperti pada kasus dimana banyak perusahaan tengah mencoba mengurangi ketergantungan dengan Tiongkok (terutama di sektor strategis seperti elektronik, semikonduktor, dan energi), perusahaan ini kerap mencari negara berkembang lain yang potensial guna mendiversifikasi basis operasional/mitra dagangnya. Skema ini disebut dengan *China+1*.¹⁵

Dampak Krisis Iklim

World Meteorological Organization menemukan bahwa per tahun 2023, bumi mencapai suhu normal tertingginya – membuktikan bahwa dampak perubahan iklim semakin nampak. Bermunculannya berbagai inisiatif baru dalam tiap konferensi COP dalam dua tahun terakhir, bersamaan dengan seruan pertanggungjawaban atas komitmen yang lampau, menggambarkan besarnya atensi global atas isu ini. Fakta bahwa masih terdapat kesenjangan yang substansial antara komitmen nasional negara dan tingkat aksi untuk memenuhi komitmen Perjanjian Paris, misalnya, menimbulkan tekanan tersendiri bagi dunia. Alhasil, banyak negara mulai bermanuver untuk mengejar ketertinggalan ini, yang tentunya berdampak pada pola interaksi dengan mitra-mitra mereka, tak terkecuali Indonesia¹⁶.

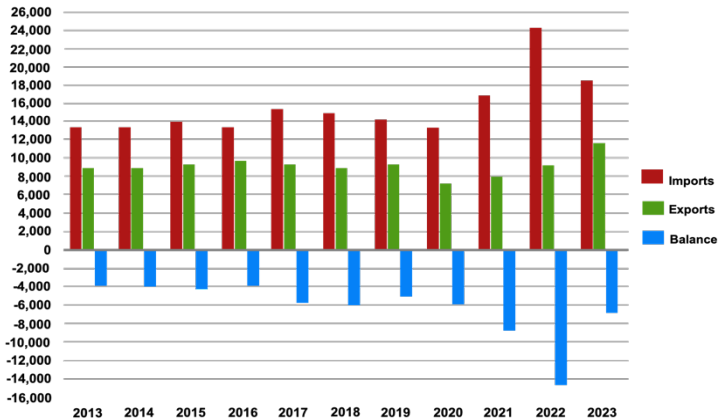
¹⁵ Stuart Witchell and Philippa Symington, "China Plus One," FTI Consulting, January 2013, <https://www.fticonsulting.com/~media/Files/us-files/insights/journal-articles/china-plus-one.pdf>.

¹⁶ Climate Action Tracker. "No Change to Warming as Fossil Fuel Endgame Brings Focus Onto False Solutions," October 2023. <https://climateactiontracker.org/publications/no-change-to-warming-as-fossil-fuel-endgame-brings-focus-onto-false-solutions/>.

Salah satu contoh yang paling signifikan mempengaruhi Indonesia adalah manuver Uni Eropa dalam menerapkan EU Green Deal (EGD) 2050 sebagai upaya untuk mencapai target Emisi Nol Bersih per tahun 2050. Diantar banyak inisiatif turunannya adalah *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), yang meregulasi seleksi komoditas impor yang dapat diterima dan diperdagangkan di Uni Eropa pada produk daging, kakao, kopi, kelapa sawit, kedelai, kayu, dan karet, serta semua produk turunannya berdasarkan apakah komoditas ini diproduksi dengan cara yang sesuai standar ekologis yang baik. Alhasil, bagi negara-negara dengan mekanisme pendataan produksi komoditas yang masih belum mumpuni, serta didominasi oleh industri pertanian skala kecil dan menengah, ekspor Indonesia ke negara-negara UE pun jatuh bebas. Pada tahun 2022, ekspor mencapai 4,13 juta ton. Per tahun 2023, angka ini mengalami penurunan sebesar sekitar 11.6%¹⁷. Indonesia telah mengangkat kasus ini ke panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bersama dengan Malaysia. Tetapi, putusan WTO dianggap tidak membawa perubahan berarti.

¹⁷ Ferry Sandi, "Ekspor Sawit RI ke Eropa Ambruk di 2023, Apa Penyebabnya?," CNBC Indonesia, February 2024, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240227182841-4-518088/parah-eksport-sawit-ri-ke-eropa-ambruk-di-2023-apa-penyebabnya>.

**Grafik 2. Tingkat Ekspor-Impor UE-Indonesia
(dalam EUR)**



Sumber: Directorate-General for Trade of European Commission, "European Union - Trade in Goods With Indonesia."

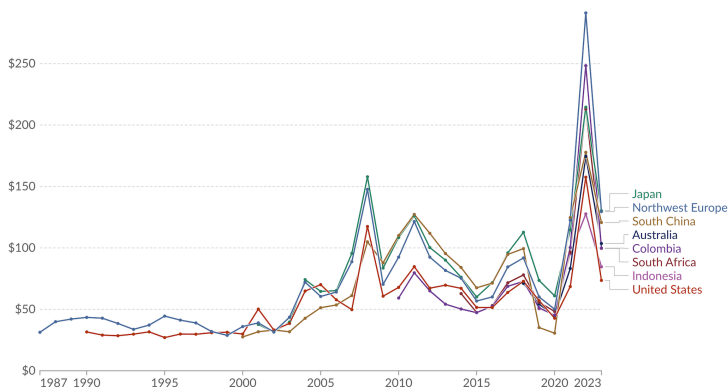
Hal ini tentu merugikan Indonesia, mengingat per 2021 (sebelum diberlakukannya EUDR), UE merupakan mitra dagang kelima terbesar bagi Indonesia, dengan komoditas didominasi oleh produk-produk hasil tani, peternakan, serta mineral. Alhasil, nampak bahwa besaran ekspor Indonesia ke UE (dalam juta Euro) pun menurun drastis, mencapai sekitar 25% pelandaian per tahun 2023¹⁸.

Sementara itu ekspor batubara juga menghadapi rintangannya tersendiri. Sebagai contoh, di tahun 2024, negara-negara G7 telah setuju untuk berhenti menggunakan batu bara di tahun 2035. Walaupun terdapat celah untuk tetap menggunakan bahan bakar fosil setelah tahun 2035, hal ini tentunya mengkhawatirkan bagi Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022, sektor

¹⁸ Directorate-General for Trade of European Commission, "European Union - Trade in Goods With Indonesia," April 16, 2024, https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/details_indonesia_en.pdf

pertambahan dan penggalian berkontribusi sebesar 12,22% terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia¹⁹. Permintaan yang meningkat untuk energi yang lebih hijau tentu berdampak pada semakin menurunnya permintaan terhadap suplai batu bara. International Energy Agency memprediksi bahwa permintaan global terhadap batubara akan turun sebanyak 2,6% jika dibandingkan dengan 2023²⁰. Selain itu, harga batubara pun relatif mempunyai kurva yang menitik tajam semenjak tahun 2022 – dan tren ini terjadi di berbagai negara di seluruh dunia dan diproyeksikan akan terus menurun hingga akhir 2024.

Grafik 3. Indeks Harga Batubara



Sumber: S&P Platts, “Coal Prices in Statistical Review of World Energy.”

¹⁹ Badan Pusat Statistik Indonesia, “Pada Januari 2023, Perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional Tahun Ke Tahun Sebesar 5,59 Persen,” Badan Pusat Statistik Indonesia, February 1, 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/02/01/2004/pada-januari-2023--perubahan-indeks-harga-perdagangan-besar--ihpb--umum-nasional-tahun-ke-tahun-sebesar-5-59-persen.html>.

²⁰ International Energy Agency. “Global Coal Demand Is Set to Remain Broadly Flat Through 2025,” July 24, 2024. <https://www.iea.org/news/global-coal-demand-is-set-to-remain-broadly-flat-through-2025>.

Dampak lainnya dari perubahan iklim adalah pengaruhnya terhadap produktivitas hasil tani. Kekeringan yang dialami Indonesia di kuartal keempat tahun 2023, ditambah berkurangnya ketersediaan pupuk akibat kondisi geopolitik di negara eksportir telah mempengaruhi kapasitas produksi produk tani dalam negeri²¹. Mengingat sektor tani berperan penting dalam menjamin keamanan pangan dalam negeri, serta perannya sebagai salah satu komoditas ekspor, Indonesia menjadi harus bermanuver guna menjamin keberlanjutan keduanya di tengah krisis iklim yang semakin parah.

Salah satu contoh dampaknya terlihat pada produksi komoditas beras di Indonesia. Produksi beras Indonesia sendiri tengah mengalami penurunan. Konsumsi beras untuk konsumsi penduduk di 2023 mengalami penurunan sebesar 439,24 ribu ton dibandingkan tahun 2022²². Produksi padi juga mengalami hal yang serupa, dimana terdapat penurunan 767,98 ribu ton dari 2022. Luas panen padi pun menurun sebanyak 238,97 ribu hektare di tahun yang sama jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini tentunya mengkhawatirkan, terutama dikarenakan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat.

Bahkan fenomena ini pun ditekankan oleh Prof. Dr. Bustanul Arifin Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), mengatakan:

Adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi. Oleh karena itu, impor beras menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar.

²¹ "Menghadapi Ancaman Kehilangan Dan Kerusakan Akibat Perubahan Iklim Pada Sektor Pangan Di Indonesia," Indonesia Research Institute for Decarbonization, August 23, 2024, <https://irid.or.id/en/publication/menghadapi-ancaman-kehilangan-dan-kerusakan-akibat-perubahan-iklim-pada-sektor-pangan-di-indonesia/>.

²² "Laporan Tahun 2023 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan." Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, March 2024, <https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAPORAN%20TAHUNAN%202023.pdf>

Produksi beras yang menurun dapat menyebabkan Indonesia kekurangan pasokan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) dan Rivalitas AS-RRT

Asia Tenggara cukup responsif terhadap pergantian kepemimpinan yang terjadi di AS, mengingat hubungan yang kuat dalam berbagai lini dan sektor kenegaraan. Alhasil, proyeksi kebijakan luar negeri AS sangat penting bagi Indonesia: apakah akan lebih proteksionis atau progresif. Dari aspek ekonomi, pemerintahan AS yang lebih proteksionis berpotensi menyebabkan terjadinya berbagai renegotiasi perjanjian perdagangan²³. Bahkan, dalam beberapa narasi kampanyenya, Donald Trump mengindikasikan penetapan *blanket tariff* untuk komoditas impor di AS sebesar 10% untuk seluruh negara, serta penetapan tarif tambahan kepada Tiongkok dan negara-negara yang dianggap memiliki hubungan yang dekat dengan Beijing²⁴. Hal ini dapat menjadi hambatan bagi perekonomian yang bergantung pada ekspor komoditas tertentu. Tendensi untuk menjalankan hubungan dagang secara bilateral dan menarik diri dari inisiatif multilateral turut menjadi peluang maupun tantangan tersendiri. Di lain sisi, pemerintahan yang lebih terbuka serta mendukung keterlibatan kembali AS dalam lebih banyak perjanjian perdagangan multilateral dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi

²³ Cyril, Melissa. "The 2024 US Presidential Election: Impact on Southeast Asia Markets." ASEAN Business News, October 17, 2024. <https://www.aseanbriefing.com/news/the-us-election-2024-impact-on-southeast-asia-markets/>.

²⁴ Alan Wolff, "Trump's proposed blanket tariffs would risk a global trade war," Peterson Institute for International Economics, May 2024, <https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2024/trumps-proposed-blanket-tariffs-would-risk-global-trade-war>.

kawasan. Berbagai spekulasi terkait keterlibatan kembali AS dalam inisiatif seperti Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP) serta finalisasi negosiasi Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) pun santer bermunculan²⁵. Terlepas dari pandangan yang sama berkenaan dengan penerapan tarif untuk produk Tiongkok, Kamala Harris pernah menyampaikan kritik kuatnya terhadap kebijakan *blanket tariff* – menyuarakan kekhawatiran atas potensi langkah tersebut memperburuk hubungan AS dan negara-negara mitranya.

Dalam isu keamanan, AS yang lebih progresif berpotensi mencoba memperkuat dan memperluas cakupan pengaruhnya yang mulai terdeteriorasi di Indo-Pasifik. Penguatan presensi via *the Quad*, AUKUS, serta berbagai kerja sama '*mini-lateral*' lainnya, serta peningkatan peran di kawasan Asia Tenggara disinyalir akan terjadi²⁶. Sementara itu, kubu lainnya diproyeksikan akan melakukan manuver serupa, tetapi dengan intensitas yang lebih tinggi dan orientasi yang diarahkan untuk menyeimbangkan, bahkan mengalahkan, pengaruh Tiongkok di kawasan²⁷.

Kedua calon pemimpin juga memiliki fokus yang berbeda ketika dihadapkan dengan berbagai isu strategis. Bagi Donald Trump, deregulasi ekonomi (seperti penerapan tarif dan penurunan pajak), prioritas pengembangan sektor militer nasional, pengetatan keamanan perbatasan dan arus imigrasi menjadi prioritas kuat. Sementara itu, Kamala Harris cenderung memiliki presensi kuat pada

²⁵ "Kamala Harris and trade: Better than the alternative, but not much," Lowy Institute, June 2024, <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/kamala-harris-trade-better-alternative-not-much>.

²⁶ "Kamala Harris and the Indo-Pacific: Correcting the attention deficit," Lowy Institute, n.d., <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/kamala-harris-indo-pacific-correcting-attention-deficit>.


²⁷ Ibid,

isu transisi energi, krisis iklim, penguatan NATO, kesehatan, serta restorasi citra AS di berbagai wilayah²⁸.


Dinamika Kawasan Asia Tenggara





Dinamika kawasan di Asia Tenggara juga menjadi determinan performa kebijakan luar negeri Indonesia, terlebih berkenaan dengan isu perbatasan wilayah. Isu perbatasan merupakan salah satu isu yang diprioritaskan pada Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Indonesia 2023. Berikut adalah lanskap perkembangan isu perbatasan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara:

Tabel 2. Proses Negosiasi Isu Perbatasan Indonesia dengan Negara-negara Asia Tenggara

Isu Perbatasan	Proses Negosiasi
 <p>Malaysia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proses negosiasi mengenai laut teritorial di Laut Sulawesi dan Selat Malaka bagian Selatan telah selesai pada pertengahan 2023 atau setelah hampir 18 tahun negosiasi. Beberapa MoU pun diselesaikan, termasuk border crossing agreement dan border trade agreement. • Demarkasi darat: 94,2% (1.943,2 km 2.064 km telah disepakati melalui 22 MoU). Senapat-Sesa dan West Pillar-AA 2 di Kalimantan-Sabah ditargetkan selesai pada tahun 2024 • Demarkasi Maritim: Perjanjian Selat Malaka dan Perjanjian Laut Sulawesi pada 8 Juni 2023 • Batas maritim di <i>Intertidal</i> dan <i>Gap Area</i> di Laut Sulawesi masih terus dinegosiasikan. • Telah dilaksanakannya berbagai pertemuan dengan Malaysia sepanjang 2023 yang terdiri atas

²⁸ "The 2024 Candidates on Foreign Policy," Council on Foreign Relations, 2024, <https://www.cfr.org/election2024/candidate-tracker>.

Isu Perbatasan	Proses Negosiasi
	<p>3 <i>Special Technical Meeting</i> (STM) yang membahas penyelesaian area <i>intertidal</i> dan <i>gap</i> di Laut Sulawesi, 1 <i>Special Intersessional Technical Working Group</i> (ITWG) mengenai transformasi Koordinat/Datum, 1 pertemuan <i>Special Technical Working Group</i> yang berhubungan dengan isu yang dibahas di STM, serta berbagai pertemuan teknis yang diadakan di 10 hari yang berbeda.</p>
 <p>Timor Leste</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Di tahun 2017, kedua negara membentuk Konsultasi Pejabat Senior yang berisikan delegasi kedua negara yang membahas teknis penyelesaian isu perbatasan. Kesepakatan prinsip pun disetujui di tahun 2019, termasuk perihal batas di segmen Subina-Oben, penggunaan garis Tengah di Noel Besi-Citrana, dan penentuan titik ujung serta penarikan garis baru untuk Bidjael Sunan-Oben. Tapi hal ini ditolak Timor Leste, terutama karena perihal Noel-Beli Citrana, sehingga tidak diratifikasi. Terdapat kesepakatan antar pemimpin daerah bahwa Naktuka (Noel Besi-Citrana) adalah milik Kerajaan Amfoang dari Indonesia di 2018 namun tidak dapat dijadikan dasar penentuan batas negara. • Walaupun Menteri Luar Negeri menyatakan di PPTM 2024 bahwa kesepakatan garis batas darat antara di segmen Subina-Oben dan Noel-Besi. Citra direncanakan untuk ditandatangani per Januari 2024, namun proses negosiasi belum mencapai kesepakatan setelah lebih dari dua dekade. Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, membawa agenda perbatasan pada saat kunjungannya ke Indonesia di Januari 2024. Kedua pemimpin negara setuju untuk mendorong penyelesaian negosiasi. • Salah satu alasan mengapa isu perbatasan di Subina-Oben belum selesai adalah adanya penolakan pelaksanaan survey penentuan batas dari WNI yang menganggap bahwa hal ini akan memasukan lahan garapan mereka ke wilayah Timor Leste.

Isu Perbatasan	Proses Negosiasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Diaktifkan Kembali <i>Joint Border Committee</i> di Januari 2024 untuk pengelolaan perbatasan. • Telah selesainya 99% pembahasan tapal batas darat pada 2023 di dalam <i>Technical Subcommittee on Border Demarcation and Regulation</i> (TSC-BDR)
 <p>Vietnam</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kesepakatan batas zona ekonomi eksklusif setelah 12 tahun perundingan pada Desember 2022 • Di tahun 2023, terdapat berbagai pertemuan dengan Vietnam yang diadakan untuk perundingan perbatasan. Hal ini terdiri dari 1 pertemuan teknis mengenai Batas ZEE, 2 pertemuan teknis mengenai area tumpang tindih yurisdiksi, dan 1 konsultasi daring <i>Technical Working Group</i> (TWG) mengenai area tumpang tindih yurisdiksi ZEE dan landas kontinen.
 <p>Thailand</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua negara sepakat untuk meningkatkan perundingan batas zona ekonomi eksklusif (ZEE) pada Juli 2018. • Dimulainya perundingan batas ZEE di Laut Andaman pada tahun 2017.
 <p>Singapura</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertukaran piagam ratifikasi antara Menlu Singapura Vivian Balakrishnan dan Menlu RI Retno Marsudi pada 10 Februari 2017, yang memulai berlakunya perjanjian RI-SG mengenai Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura.
 <p>Filipina</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Prinsip dan Pedoman untuk Batas Landasan Kontinen (Oktober 2022). • Kesepakatan untuk memperkuat Kerjasama perbatasan, terutama untuk mempercepat revisi perjanjian patrol bersama perbatasan, perjanjian lintas batas, dan penyelesaian batas landas kontinen di Januari 2023.

Isu Perbatasan	Proses Negosiasi
	<ul style="list-style-type: none"> • Diadakannya satu informal meeting antara TWG RI dan National Mapping and Resource Information Authority (NAMRIA) di Filipina pada Maret 2023.

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023 serta media massa (c.q. Kompas, BBC, Tempo, CNN, VOA)

Dinamika Kawasan Asia Pasifik

Dinamika kawasan di Asia Pasifik juga harus dipertimbangkan. Salah satu ketegangan yang harus dipertimbangkan adalah ketegangan antara RRT dan Taiwan. RRT sendiri adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan juga investor kedua terbesar di Indonesia²⁹. Maka dari itu, Indonesia pun mendukung *One China Policy*. Namun, Indonesia harus lebih memainkan peran dalam isu ini, dikarenakan terdapat sekitar 400,000 WNI tinggal di Taiwan dan Taiwan juga merupakan negara destinasi terbesar ketiga untuk para pekerja migran Indonesia³⁰.

Selain itu, di tahun ini, tensi di antara RRT dan Filipina pun meningkat, terutama setelah *vessel-vessel* RRT bersikap agresif kepada Filipina, ketika RRT dipercaya memasuki teritori perairan Filipina. Kejadian-kejadian serupa ini telah terjadi di berbagai lokasi, seperti dekat Scarborough Shoal, bagian utara Spratly Islands, Second Thomas Shoal, Sabina Shoal, dan lainnya. RRT juga menguji *intercontinental ballistic missile*-nya di wilayah Samudra Pasifik pada


²⁹ Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "President Jokowi Applauds Indonesia-China Partnership." *setkab.go.id*. Oktober 16, 2023. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-applauds-indonesia-china-partnership/>

³⁰ Noory Okthariza. "Questioning Indonesia's approach to the Taiwan Strait." *indonesiaatmelbourne*. September 10, 2024. <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/questioning-indonesias-approach-to-the-taiwan-strait/>

akhir September 2024, tes yang tidak dilakukan RRT selama sekitar 40 tahun. RRT telah mengklaim mayoritas Laut China Selatan dan mempercayai bahwa mereka harus melindungi teritori. Taktik-taktik yang dilakukan RRT atau *gray zone tactics*³¹, adalah langkah-langkah agresif yang tidak sampai memulai perang terbuka³².


Selain itu, Indonesia juga memiliki isu perbatasan dengan Palau dan Papua Nugini. Berikut adalah tabel yang menjelaskan mengenai proses negosiasi dengan kedua negara:

Tabel 3. Proses Negosiasi dengan Papua Nugini dan Palau

Isu Perbatasan	Proses Negosiasi
 <p data-bbox="255 922 333 975">Papua Nugini</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="418 699 904 751">• Persetujuan Prinsip dan Pedoman untuk Batas Landasan Kontinen (Oktober 2022). <li data-bbox="418 767 860 820">• Ratifikasi perjanjian dasar mengenai pengaturan perbatasan di Maret 2023. <li data-bbox="418 836 882 1054">• Penandatanganan Memorandum of Understanding lintas batas darat untuk angkutan penumpang dan barang saat kedatangan Perdana Menteri James Marape di Juli 2024. Dokumen ini mengatur pergerakan lintas batas untuk transportasi komersial di antara kedua negara dari Jayapura menuju Vanimo.

³¹ Agnes Chang, Camille dan Muye Xiao. "China's Risky Power Play in the South China Sea." *nytimes*. September 15, 2024. <https://www.nytimes.com/interactive/2024/09/15/world/asia/south-china-sea-philippines.html>

³² "China test-fires intercontinental ballistic missile into Pacific Ocean as tensions with US mount." *euronews*. September 25, 2024. <https://www.euronews.com/2024/09/25/china-test-fires-intercontinental-ballistic-missile-into-pacific-ocean-as-tensions-with-us>

Isu Perbatasan	Proses Negosiasi
 <p data-bbox="262 427 327 450">Palau</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="418 264 908 344">• Diadakannya <i>Preliminary Informal Meeting</i> antara Ketua Tim Teknis PBM (Maret 2023) <li data-bbox="418 363 848 416">• Diadakannya TWG Penetapan Batas Maritim (Mei 2023) <li data-bbox="418 435 908 488">• Diadakannya pertemuan teknis penetapan batas maritim (November 2023)

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023 hal. 175-176 serta media massa (c.q. Kompas, BBC, Tempo, CNN, VOA)

Perkembangan Teknologi dan Tantangannya

Perkembangan teknologi, terutama transformasi digital seperti kecerdasan buatan (AI) dan identitas digital memberikan tantangan. Tantangan pertama dari teknologi digital sendiri adalah semakin luasnya ranah perlindungan WNI. Pelindungan WNI tidak hanya harus dilakukan di ranah fisik saja namun juga di ranah *online*. Salah satu contoh dari semakin invasifnya teknologi digital terhadap keamanan data dan identitas WNI adalah Worldcoin. Worldcoin adalah salah satu proyek multinasional (Jerman–AS) yang dikembangkan oleh Sam Altman sebagai salah satu pendiri proyek tersebut. Di Indonesia, Worldcoin sempat hadir di berbagai pedesaan di Jawa Barat untuk mengambil data biometrik berbagai WNI. Sebagai contoh, di Gunungguruh, Worldcoin mencatat alamat email, nomor telepon, dan juga mengambil data biometrik WNI, terutama scan retina. Para WNI pun tertarik dengan Worldcoin dikarenakan uang yang akan diberikan ketika para WNI sudah memberikan scan retina mereka.³³

³³ Aileen Guo dan Adi Renaldi. "Deception, exploited workers, and cash handouts: How Worldcoin recruited its first half a million test users." *MIT Technology Review*.

Tantangan kedua muncul dari semakin maraknya *online scam*. Dari 2020 sampai Maret 2024, Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Indonesia telah menangani 3,703 WNI terlibat dalam *online scam*.³⁴ Sebagai contoh, semakin berkembangnya bisnis online scam di Myawaddy, Myanmar.³⁵ Para korban akan dipaksa untuk menjadi penipu daring untuk menipu pria yang tinggal di negara-negara maju. Para WNI ini awalnya berharap dapat bekerja di Thailand, namun pada akhirnya dibawa ke Myanmar.³⁶

Tantangan ketiga adalah *cybercrime*. Salah satu contoh adalah *ransomware* yang terjadi di Indonesia tahun ini yang terjadi kepada Server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS)³⁷. Hal ini dipercaya dilakukan oleh Lockbit, grup peretas dari Rusia, dan menyebabkan berbagai kendala pada layanan publik dari 200 lebih instansi pemerintah terhambat. Serangan ini juga berhasil dikarenakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) tidak mempunyai pusat data cadangan dan perlindungan terhadap *cyber attack* yang memadai.

April 6, 2022. <https://www.technologyreview.com/2022/04/06/1048981/worldcoin-cryptocurrency-biometrics-web3/>

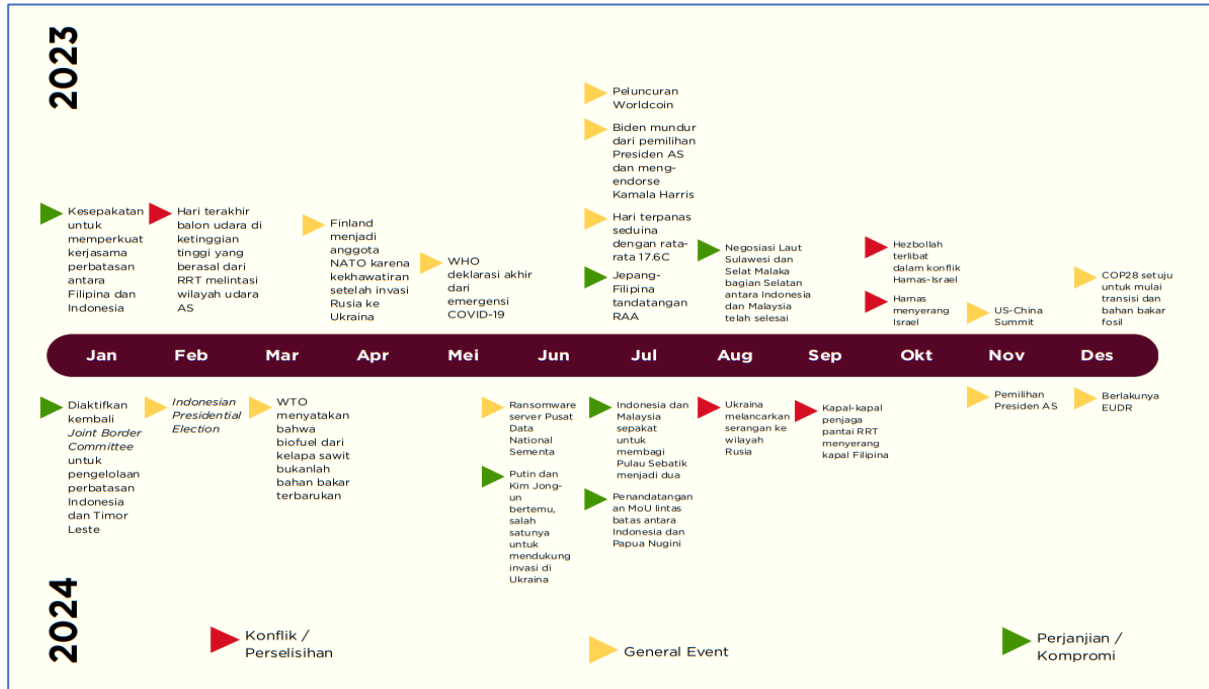
³⁴ Bahan Paparan Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, pada FGD 2, Dit Polugri dan KPI, Kemen PPN/Bappenas, 20 September 2024.

³⁵ Bahan Paparan Judha Nugraha, Direktur Pelindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, pada FGD 2, Dit Polugri dan KPI, Kemen PPN/Bappenas, 20 September 2024.

³⁶ "BSSN Identifikasi Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware." *Kominfo*. Oktober 17, 2024. <https://kominfo.lhokseumawekota.go.id/berita/read/bssn-identifikasi-pusat-data-nasional-sementara-diserang-ransomware-202407051720150165>

³⁷ "Pusat Data Nasional Sementara lumpuh akibat ransomware, mengapa instansi pemerintah masih rentan terhadap serangan siber?." *BBC*. Juni 27, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxee2985jrvo>

Gambar 6. Ringkasan Lingkungan *Strategies* 2023-2024





CAPAIAN KINERJA KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL

Pada bagian ini, akan dipaparkan capaian kinerja kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional, baik dalam upaya memenuhi target capaian yang telah ditetapkan maupun upaya-upaya untuk melaksanakan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan kinerja yang optimal untuk mendukung Prioritas Nasional





Kinerja Diplomasi Ekonomi Indonesia

*P*ada tahun 2023, kinerja kebijakan luar negeri diarahkan salah satunya untuk mendukung transformasi ekonomi dalam rangka memperkuat pemulihan ekonomi pasca Pandemi. Diplomasi Ekonomi Indonesia diperkuat dengan dialog Perdagangan, Turisme, dan Investasi (TTI), serta Indonesia Go-Global yang ditujukan untuk merumuskan strategi kebijakan dan promosi TTI Indonesia di luar negeri. Berbagai kegiatan juga dilakukan termasuk penguatan Investolink dan *Epistemic Forum of Investment Research*.

Pada tahun 2023, kebijakan luar negeri melalui diplomasi ekonomi ditujukan untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Indikator kinerja diplomasi ekonomi dalam mendukung PN 1 tersebut mencakup: (1) Tingkat Efektivitas

Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan dengan target capaian sebesar 92,54%; (2) Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi dengan target capaian 94,40%; dan (3) Tingkat Efektivitas Ekonomi di Sektor Pariwisata dengan target capaian 90,23%.

Tabel 4. Target Output Strategis Dukungan Kebijakan Luar Negeri terhadap PN 1

Indikator Kunci KP 7 Peningkatan Efektivitas PTA/FTA/CEPA Dan Diplomasi Ekonomi	Target RKP 2023 (%)
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan	89,90 (92,54)*
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi	(94,40)*
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata	79,34 (90,23)*

* Indikator dan target baru pasca perubahan di tahun berjalan

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2023, hal. 29.

Diplomasi ekonomi diarahkan untuk meningkatkan ekspor Indonesia di pasar global dalam rangka meningkatkan sisi pendapatan negara melalui perdagangan, peningkatan investasi *inbound* dan *outbound*, serta peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Tabel 5. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Diplomasi Ekonomi 2022-2023

	2022			2023		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Perdagangan	85,52%	149,24%	174,5%	93,35%	131,33%	140,68%
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Investasi	93,35%	131,33%	140,68%	94,40%	118,99%	126,05%
Tingkat Efektivitas Diplomasi Ekonomi di Sektor Pariwisata	77,88%	147,4%	189,26%	90,23%	104,14%	115,42%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2023.

Tabel di atas menunjukkan tingginya tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan, investasi dan pariwisata, sekalipun target rencana *output* di masing-masing sektor telah dinaikkan dari target tahun 2022. Pada tahun 2023, tingkat efektivitas tertinggi adalah di sektor investasi yang mencapai 126,05%, diikuti sektor perdagangan sebesar 140,68% dan sektor pariwisata sebesar 115,42%.

Pada sektor pariwisata, terjadi penurunan capaian kinerja dari 189,26% di tahun 2022 menjadi 115,42%. Penurunan ini di antaranya disebabkan karena dinaikkannya target yang cukup tinggi dari 77,8% di tahun 2022 menjadi 90,23% di tahun 2023. Di tahun 2022,

realisasinya mencapai 147,4%, sementara realisasi di tahun 2022 hanya 104,14%.

Penetrasi pasar global menjadi salah satu sasaran yang diwujudkan melalui diplomasi ekonomi tersebut. Salah satu strateginya adalah melalui pembuatan komitmen perdagangan dengan negara-negara mitra dan para pelaku usaha di negara-negara tersebut. Kementerian Luar Negeri mencatat lebih dari 300 komitmen perdagangan dibuat di tahun 2023 dengan nilai komitmen sebesar USD 15,23 miliar. Kerja sama di bidang investasi juga diupayakan di tahun 2023 dan telah menghasilkan 190 komitmen investasi senilai USD 60,72 miliar.

Untuk meningkatkan akses pasar dan sekaligus mengatasi hambatan perdagangan, diplomasi ekonomi telah berhasil menyepakati 6 (enam) perjanjian dagang. Kesepakatan kerja sama ekonomi tersebut dibuat dengan Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Jepang, dan Selandia Baru. Melalui ASEAN, Indonesia juga menyepakati perubahan ASEAN–Hongkong Free Trade Agreement.

BOX 4.3. Perjanjian Dagang Indonesia dan Negara Mitra

- Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dengan PEA & Kanada.
- Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dengan Korea Selatan.
- Indonesia–Malaysia Border Trade Agreement (BTA).
- Perubahan Protokol Indonesia–Japan Economic Partnership (IJEPA).
- Perubahan ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement (AHKFTA).
- Protokol Kedua Perubahan ASEAN–Australia–New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA).

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2023.

Kebijakan luar negeri melalui diplomasi ekonomi juga diarahkan untuk memperdalam penetrasi pasar produk industri strategis Indonesia. Ini dilakukan dengan melibatkan BUMN Indonesia untuk mengembangkan penjualan produk-produknya atau berinvestasi di negara-negara mitra. Capaian kinerja yang telah dihasilkan di antaranya ekspor produk perkeretaapian, pesawat terbang, investasi pembangunan infrastruktur digital dan eksplorasi sumber daya mineral dan gas.

BOX 4.4. Pendalaman Penetrasi Pasar oleh BUMN Indonesia di Negara Mitra

- Ekspor produk perkeretaapian PT. INKA ke Bangladesh, Selandia Baru, Filipina.
- Ekspor 6 pesawat produksi PT. DI ke Thailand, Filipina, dan Senegal.
- Investasi Pembangunan infrastruktur ekonomi digital Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab.
- Eksplorasi sumber daya mineral dan gas oleh Pertamina di Aljazair dan Mnazi Bay-Tanzania.

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2023

Kinerja diplomasi ekonomi yang sangat baik ini mencerminkan peran penting perwakilan RI di luar negeri yang secara pro-aktif mengembangkan hubungan bilateral dengan negara-negara mitra, termasuk menyelenggarakan promosi perdagangan, investasi dan pariwisata, dan memfasilitasi BUMN dan pelaku usaha Indonesia menjalin kerja sama dengan BUMN dan pelaku usaha di negara mitra.



Kinerja Pelindungan Warga Negara Indonesia

*I*su pelindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri mendapat berbagai tantangan yang cukup sulit di tahun 2023 dan 2024. Munculnya berbagai ketegangan geopolitik telah memunculkan krisis pengungsi, maupun warga negara yang harus dievakuasi dari area konflik. Jumlah warga negara yang menghadapi masalah hukum di luar negeri juga masih membutuhkan perhatian. Terdapat pula Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keterlibatan WNI dalam *cyber crime* lintas batas negara yang tidak mudah diatasi secara tuntas.

Namun, di tengah tantangan yang berat tersebut, kinerja Indonesia masih memenuhi target capaian. Sepanjang tahun 2023, dengan dukungan perwakilan RI di luar negeri, Kemenlu berhasil menyelesaikan 50.348 kasus dari total 53.598 kasus yang sedang

ditangani. Jenis kasus-kasus WNI di luar negeri yang ditangani, antara lain mencakup isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) keimigrasian, WNI sakit dan meninggal dunia, ketenagakerjaan, *online scam*, evakuasi kedaruratan, WNI terancam hukuman mati, *foreign terrorist fighter*, dan penelantaran anak – dengan isu terbanyak adalah keimigrasian, ketenagakerjaan, dan TPPO dan *online scam*.

Dukungan kebijakan luar negeri terkait pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri pada Prioritas Nasional 7 sangatlah positif. Pada Prioritas Nasional 7 di tahun 2023, target jumlah WNI yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan oleh perwakilan RI di luar negeri adalah sebanyak 163.967 orang, sementara realisasinya mencapai 160.892 orang, sehingga persentasenya sebesar 98,2%. Sementara itu, target jumlah WNI yang mendapatkan pelayanan dan perlindungan oleh Kementerian Luar Negeri Pusat adalah 22.430, dengan tingkat ketercapaian 117,9% di mana 26.439 WNI di luar negeri telah mendapatkan pelayanan dan perlindungan di luar negeri.

Tabel 6. Target Output Strategis, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pelindungan WNI di Luar Negeri (RKP TA 2023)

Indikator Kunci	Target Output Strategis pada PN 1 (Jumlah Orang)	Realisasi (Jumlah Orang)	Capaian (%)
Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	163.967	160.892	98,2
Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri (Pusat)	22.430	26.439	117,9

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri RI Tahun 2023

Evaluasi kinerja pada KP Pelindungan WNI di Luar Negeri tahun 2023 menunjukkan disparitas positif antara target dan realisasi di mana realisasinya mencapai 92,02% dari target 83%. Namun demikian jika dibandingkan dengan persentase capaian tahun 2022, terjadi penurunan persentase capaian dari 114,38% di tahun 2022 menjadi 110,87% di 2023. Penurunan persentase capaian ini disebabkan salah satunya karena dilakukan peningkatan target yang signifikan dalam penyelesaian kasus WNI di luar negeri.

Penurunan capaian realisasi khususnya terjadi pada persentase penyelesaian kasus khusus yang ditangani. Capaian penyelesaian kasus khusus yang ditangani menurun dari 132,86% di tahun 2022, menjadi 109,8% di 2023. Selain karena disebabkan oleh dinaikkannya target di tahun 2023, penurunan ini mencerminkan meningkatnya kasus-kasus khusus di tahun 2023.

Kasus Khusus yang ditangani mencakup *high profile case*, seperti hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/ kapal laut, amnesti) serta kasus yang bersifat insidental dan/atau masif yang memiliki ramifikasi cukup luas secara politis, ketertiban masyarakat, dan keselamatan jiwa WNI.

Tabel 7. Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Pelindungan WNI di Luar Negeri yang Diselesaikan

Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023
Persentase kasus WNI di luar negeri yang diselesaikan	Target	73,00%	74,00%	80,00%	83,00%
	Realisasi	83,31%	90,29%	91,50%	92,02%
	Capaian	114,11%	122,01%	114,38%	110,87%
Komponen 1 Persentase kasus khusus yang diselesaikan	Target	62,60%	64,30%	71,85%	82,00%
	Realisasi	94,06%	92,07%	95,46%	90,04%
	Capaian	150,25%	114,16%	132,86%	109,80%
Komponen 2 Persentase kasus umum yang diselesaikan	Target	85,70%	85,85%	89,95%	85,00%
	Realisasi	70,17%	87,35%	86,67%	94,44%
	Capaian	81,88%	101,75%	96,35%	111,11%

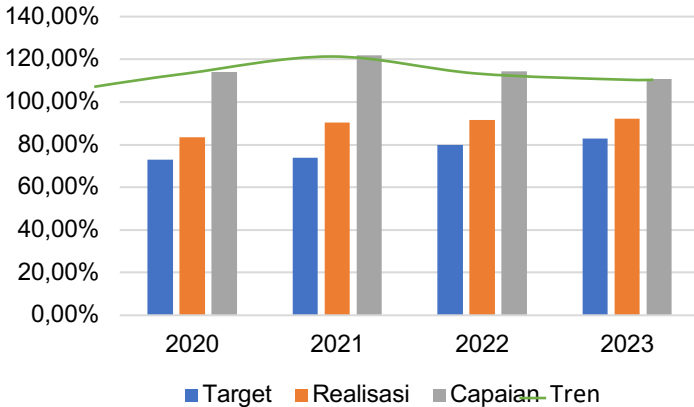
Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023

Persentase penyelesaian kasus umum yang ditangani menunjukkan peningkatan dari 96,3% di 2022 menjadi 111,11% di 2023. Untuk kasus umum, telah dilakukan penurunan target dari 89,95% di 2022 menjadi 85,00% di 2023 dengan realisasi mencapai 94,44%.

Kasus Umum yang ditangani termasuk antara lain kasus perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, pencurian, pencucian uang, pemerkosaan dan pelanggaran hukum. Dalam melakukan penanganan kasus umum tersebut, pemerintah Indonesia mengikuti prosedur/SOP, peraturan nasional, dan peraturan negara setempat, serta memperhatikan ketentuan internasional yang berlaku.

Sepanjang tahun 2023 sejumlah kasus menjadi fokus utama penanganan perlindungan WNI di luar negeri:

Grafik 4. Tren Capaian Kinerja Pelindungan WNI di Luar Negeri 2020-2023



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023, diolah

Sepanjang tahun 2023 sejumlah kasus menjadi fokus utama penanganan perlindungan WNI di luar negeri:

- Evakuasi WNI sebanyak 1.119 dari Sudan, Turki, Palestina, dan Tepi Barat akibat Konflik bersenjata dan invasi teritori di Gaza.
- Sebanyak 8.871 PMI telah dipulangkan dari Malaysia, termasuk kelompok rentan.
- Sejumlah 760 kasus TPPO telah ditangani, dengan total 3.837 kasus online scam.
- Sebanyak 169 ibu dan anak tidak terdokumentasi telah dipulangkan dari Taiwan dan Persatuan Emirat Arab.
- Penanganan kasus 408 WNI anak buah kapal dari 97 kapal perikanan dan Niaga.

- Repatriasi 3 WNI korban perampokan bersenjata di perairan Yaman.
- Fasilitasi pengembalian hak finansal WNI (diyat, asuransi, kompensasi, gaji tidak dibayar) di luar negeri dengan nilai 94 miliar.

Kinerja perlindungan WNI di luar negeri tersebut didukung sejumlah faktor, di antaranya adalah: telah ditetapkannya Pelindungan WNI di luar negeri sebagai Program Prioritas Nasional Bidang Polhukam yang berimplikasi pada dukungan anggaran, dukungan berbagai lembaga negara atas penyelesaian kasus WNI di luar negeri, serta perhatian tinggi berbagai stakeholders dalam negeri guna mendorong penyelesaian kasus WNI di luar negeri



Kinerja Perundingan Perbatasan Darat dan Maritim

*P*erundingan perbatasan merupakan agenda penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia mengingat penyelesaian masalah perbatasan membawa kepastian terhadap kontrol wilayah, termasuk pengelolaan sumber daya yang ada di wilayah Indonesia dan penegakan hukum di wilayah kedaulatan Indonesia. Dalam RPJMN 2020-2024, belum terselesaikannya perundingan batas wilayah merupakan isu yang menjadi sorotan utama, sehingga menjadi prioritas nasional yang sangat penting, termasuk pada RKP Tahun 2023.

Pada Prioritas Nasional 7, ditetapkan target *output* strategis perundingan penetapan batas darat dan maritim tahun 2023 adalah sebanyak 8 kesepakatan. Kinerja kebijakan luar negeri terkait perundingan perbatasan menunjukkan capaian 100% dengan realisasi 8 kesepakatan sesuai target tersebut. Perundingan Penetapan Batas Maritim telah dilakukan dengan Malaysia, Filipina, Palau dan Vietnam. Kementerian Luar Negeri juga telah melakukan Konsultasi Pemberlakuan Persetujuan Realignment FIR, dan Pemutakhiran Data Batas Darat dan Maritim dalam Mendukung Kebijakan Satu Peta

Tabel 8. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Perundingan Penyelesaian Perbatasan Maritim

	2020	2021	2022	2023
Target	45,03	47,17	46,32	49,99
Realisasi	43,70	44,58	46,84	50,96
Capaian	97,04	94,50	101,12	101,94

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023

Evaluasi kinerja perundingan perbatasan menunjukkan tingkat ketercapaian yang tinggi antara target dan realisasi. Pada tahun 2023, target indeks capaiannya adalah 49,99, dengan realisasi indeks sebesar 50,96, sehingga persentase capaiannya sebesar 101,94%.

Mengingat pentingnya penyelesaian perundingan perbatasan wilayah, target indeks capaian dinaikkan dari 46,32 di tahun 2022 menjadi 49,99 di tahun 2023. Sekalipun terjadi peningkatan target, kinerja perundingan perbatasan tetap lebih baik dibandingkan kinerja di tahun 2022. Persentase capaian kinerja di tahun 2022 adalah 101,12 dengan realisasi sebesar 46,84 dari target sebesar 46,32.

**Tabel 9. Jumlah Perundingan Perbatasan
Batas Maritim dan Batas Darat 2023**

Negara Perbatasan	Jumlah Pertemuan Batas Maritim	Jumlah Pertemuan Batas Darat
Malaysia	13	14
Vietnam	12	-
Palau	4	-
Filipina	3	-
Timor Leste	-	8
Papua Nugini		4

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023

Sepanjang tahun 2022-2024 terdapat 32 pertemuan yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan berbagai negara untuk membahas mengenai batas maritim dan batas darat.

Dengan berbagai pertemuan-pertemuan di atas, terdapat beberapa capaian di periode yang sama. Capaian-capaian tersebut berupa 1 perjanjian batas maritim dengan Vietnam, 2 perjanjian pengelolaan batas dengan Malaysia, dan 2 perjanjian batas maritim dengan Malaysia.



Kinerja Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional

Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional merupakan salah satu prioritas nasional dalam RKP 2023. Indikator kinerjanya mencakup: 1) Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional sejumlah 133 program/kegiatan KSST; 2) Terlaksananya Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerja Sama Pembangunan Internasional sebesar 171 miliar rupiah; dan 3) Terciptanya Lingkungan yang Mendukung (*Enabling Environment*) Peningkatan Keterlibatan Swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional yang ditandai dengan indeks Tingkat Partisipasi Aktor Nonpemerintah dalam Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional antara 2,82-2,96. Perhitungan indikator ketiga ini dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas, namun capaiannya masih merujuk pada capaian

Kementerian Luar Negeri (Laporan Kementerian Luar Negeri Tahun 2023).

	2020	2021	2022	2023
Target	86	100	115	133
Realisasi	10	30*	31	47
Capaiam	11,60&	30,00%	26,90%	35,33%

* Koreksi data KSST dari Evaluasi RKP TA 2022

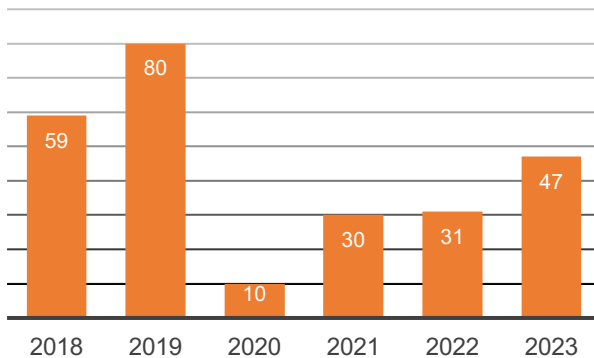
Sumber: Kompilasi data KSST Kementerian PPN/Bappenas, Oktober 2024

Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesia mengalami peningkatan di tahun 2023 dan 2024, setelah terjadi penurunan drastis di tahun 2020 akibat terjadinya Pandemi COVID-19. Dari periode 2018-2023, jumlah kegiatan Kerjasama Selatan Selatan dan Triangular (KSST) tertinggi ada di tahun 2019, yaitu 80 kegiatan. Jumlah tersebut menurun drastis menjadi 10 program kegiatan di tahun 2020. Peningkatan terjadi di tahun 2021 dan 2022, dengan jumlah 30 dan 31 kegiatan. Jumlah ini masih jauh di bawah angka 80 di tahun 2019. Jumlah kegiatan naik signifikan di tahun 2023 dimana 47 kegiatan KSST berhasil dilaksanakan.

Jika dilihat dari target rencana yang telah ditetapkan, jumlah kegiatan-kegiatan KSST memang masih di bawah rencana target, termasuk jika *baseline* didasarkan pada capaian kinerja di tahun 2019, dengan jumlah 80 kegiatan. Di tahun 2023, dari target jumlah 133 kegiatan KSST baru teralisir 47 kegiatan, yang artinya capaiannya baru sebesar 35,33%. Namun dari sisi lain, capaian ini meningkat sejak 2020 ketika terjadi pandemi COVID-19. Di tahun 2020, capaiannya hanya 11,6%, meningkat menjadi 30% pada 2021 dan 26,9% pada 2022.

Masih kurangnya realisasi jumlah kegiatan KSST dari rencana target di antaranya disebabkan karena masih banyak kegiatan KSST yang belum terdata dengan baik. Data tersebut didasarkan pada kegiatan KSST yang dilakukan budget tagging oleh Kementerian/Lembaga. Beberapa K/L melakukan kegiatan KSST, namun dengan memakai biaya komponen sehingga tidak terdata sebagai kegiatan KSST. Ini menjadi tantangan ke depan untuk memperbaiki sistem dan mekanisme pendataan dari pelaksanaan kegiatan KSST, selain perlu diberikan dorongan dan insentif bagi K/L, termasuk *Center of Excellences* (CoE) untuk mengembangkan kegiatan KSST.

Grafik 5. Jumlah Kegiatan KSST 2018-2023

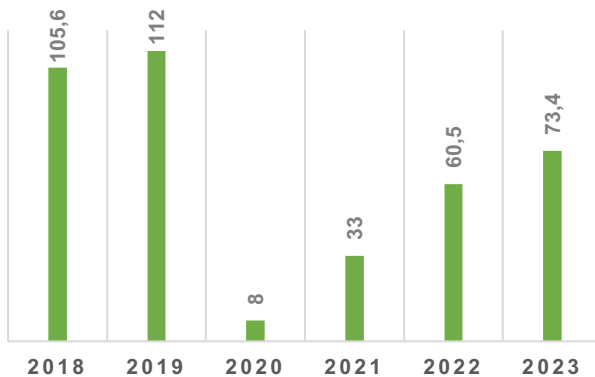


Sumber: Laporan K/L pada FGD Evaluasi KSST, 10 Oktober 2024

Dari sisi pendanaan, terjadi peningkatan (indikatif) jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan KSST di tahun 2023 sebesar 73,4 miliar rupiah, sekalipun jumlahnya masih jauh di bawah rencana target anggaran sebesar 171 miliar rupiah di RKP Tahun Anggaran 2023. Persentase capaian anggaran di tahun 2023 adalah 42,9%, meningkat signifikan dari tahun 2022 yang menyerap anggaran 60,5 miliar dan tahun 2021 yang hanya menyerap 33 miliar.

Lemahnya sistem dan mekanisme pendataan kegiatan berpengaruh pada perhitungan total jumlah anggaran untuk program dan kegiatan KSST. Data ini lebih mengacu pada *budget tagging* kegiatan KSST oleh Kementerian/Lembaga pelaksana kegiatan KSST.

Grafik 6. Indikasi Jumlah Anggaran Kegiatan KSST Tahun 2018-2024 (dalam Rp miliar)



Sumber: Laporan K/L pada FGD Evaluasi KSST, 10 Oktober 2024

Selain dari sisi jumlah kegiatan, kinerja kerjasama pembangunan internasional dapat juga dilihat dengan melihat jumlah kementerian dan lembaga yang menjadi pelaksana kegiatan KSST. Di tahun 2023, terdapat peningkatan jumlah kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan KSST, baik secara individu maupun melalui kerjasama dengan kementerian/lembaga lain dan mitra-mitra donor kerjasama pembangunan internasional. Kementerian dan lembaga tersebut adalah: Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan

Keluarga, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jumlah tersebut meningkat dari 5 di tahun 2020, menjadi 6 di 2021 dan 10 di 2023.

Tabel 10. Jumlah Kegiatan KSST per K/L 2023 dan 2024

No.	Kementerian/Lembaga	2020	2021	2022	2023
1	Kemensekneg	5	10	10	13
2	Kemen PPN/Bappenas	1	-	2	1
3	Kemenlu	1	9	4	4
4	Kemen ESDM	2	-	2	1
5	BMKG	1	-	-	-
6	Kementan	-	6	2	5
7	B POM	-	1	3	4
8	Kemendikbud	-	1	3	-
9	Kemendag	-	3	-	3
10	BKKBN	-	-	1	1
11	Kemenkeu	-	-	3	5
12	KKP	-	-	1	-
13	Kemenhub	-	-	-	1
14	Kemen Perindustrian	-	-	-	3
15	BNN	-	-	-	6
	J u m l a h	10	30	31	47

Sumber: Laporan yang disampaikan K/L pada FGD Evaluasi KSST tanggal 10 Oktober 2024

Sebagai wujud dari pemenuhan kinerja mendorong keterlibatan pihak swasta, pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas melakukan sejumlah upaya untuk terus mendorong keterlibatan pihak swasta dalam program/kegiatan KSST dengan menciptakan lingkungan yang mendukung (*Enabling Environment*) bagi peningkatan keterlibatan swasta dalam Kerja Sama Pembangunan Internasional, diantaranya:

- **Penerbitan Buku Panduan Praktis Kemitraan Multipihak (2019)**
 Panduan tersebut berisi petunjuk praktis bagi para pembuat keputusan, praktisi, dan para pemangku kepentingan lain untuk membangun, memperkuat dan mengimplementasikan kemitraan multipihak.
- **Side Event KTT G20: “Enabling Inclusive Development through South-South and Triangular Cooperation” (2022)**
 Menjadi forum penting bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta untuk berbagi praktik baik pengalaman mereka dalam menjalankan KSST untuk mempercepat agenda pembangunan melalui pendekatan yang lebih inklusif.
- **Kick-Off Meeting Keketuaan Indonesia pada GPEDC (2023)**
 Mendorong kemitraan multipihak yang lebih efektif di antara berbagai pemangku kepentingan seperti Kementerian/Lembaga terkait, mitra pembangunan bilateral dan multilateral, CSO, sektor swasta, serikat buruh dan *think tanks*.
- **High Level Forum on Multi-stakeholders Partnership/HLF MSP (2024)**
 Mendorong Komitmen dan Inisiatif Baru dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk swasta, filantropi, dan organisasi masyarakat sipil, untuk berkolaborasi dalam proyek pembangunan yang berfokus pada inovasi dan solusi alternatif.
- **Dukungan bagi Center of Excellences pelaksana KSST (2024)**
 Pendataan dan pemetaan Center of Excellences yang aktif terlibat dalam program dan kegiatan KSST.



Kinerja Peningkatan Citra Indonesia di Luar Negeri

*M*enjaga citra positif Indonesia di dunia internasional sangatlah penting untuk mendukung kebijakan luar negeri yang efektif, terutama untuk mewujudkan kepentingan nasional, termasuk kepentingan ekonomi, kepentingan menjaga kedaulatan NKRI dan dukungan pencalonan Indonesia di organisasi internasional. Menjaga dan meningkatkan citra positif dilakukan dengan mengelola aset-aset nasional termasuk identitas nasional sebagai aset strategis.

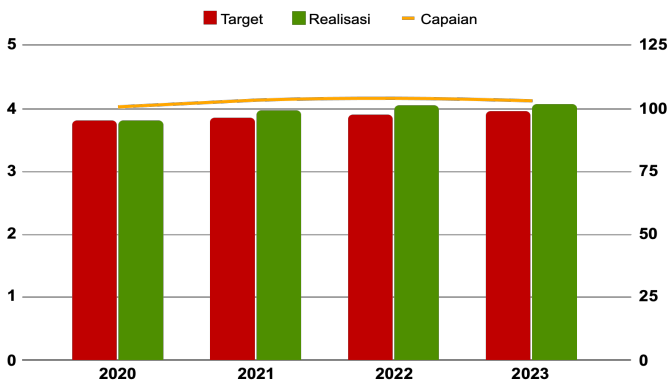
Dalam upaya menjaga citra positif, Indonesia perlu menjaga dan terus membangun kepercayaan masyarakat Internasional terhadap Indonesia dengan menunjukkan pola perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang diyakini masyarakat internasional. Diplomasi Indonesia diarahkan untuk terus dapat mendukung peningkatan citra positif Indonesia di mata dunia internasional.

Diplomasi tersebut memperhatikan sejumlah faktor yang berpengaruh secara langsung terhadap citra, yaitu pengelolaan isu-isu di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Indonesia juga terus memanfaatkan aset-aset nasional untuk dapat meningkatkan daya tarik Indonesia di mata masyarakat internasional sehingga masyarakat internasional mendukung perwujudan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia.

Realisasi indeks citra Indonesia di mata masyarakat internasional terus meningkat dalam periode 2020-2023. Di tahun 2020, realisasinya mencapai 3,82, yang meningkat menjadi 3,98 di tahun 2021 dan 4,07 di tahun 2023. Di tahun 2023, realisasinya mencapai 4,07 atau 103,04% dari target (3,95). Raihan indeks ini merupakan yang tertinggi sejak survei citra mulai dibuat di tahun 2017.

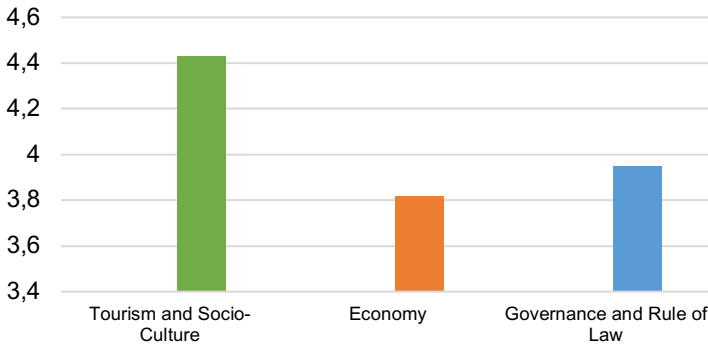
Jika dihitung dalam persentase, peningkatan citra mengalami peningkatan yang selalu di atas 100%. Di tahun 2020, capaiannya mencapai 100,53%, meningkat menjadi 103,3% di 2021, 104,10% di tahun 2022. Perkecualian terjadi di tahun 2023, dimana target indeks ditingkatkan dari 3,90 (di 2022) menjadi 3,95, dengan persentase capaian sebesar 103,04% atau turun sebesar 0,1 poin.

Grafik 7. Target, Realisasi, dan Capaian IKU Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023, diolah

Grafik 8. Rata-rata Indeks per Dimensi di Perwakilan RI



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023

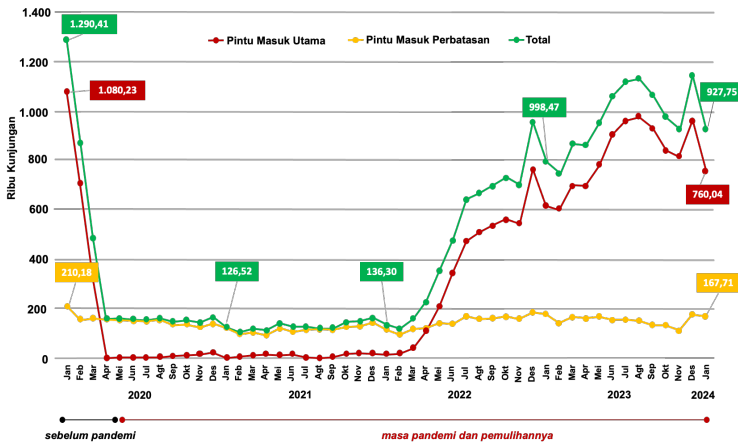
Indeks citra positif tertinggi adalah pada persepsi masyarakat internasional terhadap turisme dan sosial budaya Indonesia dengan indeks sebesar 4,43, sementara persepsi terhadap tata kelola dan aturan hukum Indonesia menduduki peringkat kedua yaitu 3,95. Persepsi terhadap perekonomian Indonesia mencapai indeks 3,82.

Ini menunjukkan bahwa responden melihat kekayaan budaya dan pariwisata sebagai salah satu aset terbesar Indonesia yang dapat meningkatkan citra positif Indonesia. Responden juga mengapresiasi semakin baiknya tata kelola pemerintahan seperti ditunjukkan dengan peraturan-peraturan terkait keimigrasian. Sementara itu, responden masih belum sepenuhnya melihat ekonomi Indonesia secara positif, terutama terhadap ketersediaan produk Indonesia sebagai salah satu parameter dimensi ekonomi.

Peningkatan nilai indeks citra Indonesia di mata masyarakat internasional didukung oleh berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Kementerian Luar Negeri di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia maupun di negara-negara mitra Indonesia di luar negeri. Pemberitaan media massa internasional yang positif terhadap kebijakan luar negeri Indonesia juga menjadi faktor pendukung

terciptanya persepsi positif terhadap Indonesia. Di tahun 2023, media massa mempublikasikan 7.167 berita dan perbincangan positif tentang hubungan luar negeri Indonesia. Sebanyak 6.748 pemberitaan tersebut mengandung informasi yang dapat membangun sentimen positif terhadap Indonesia.

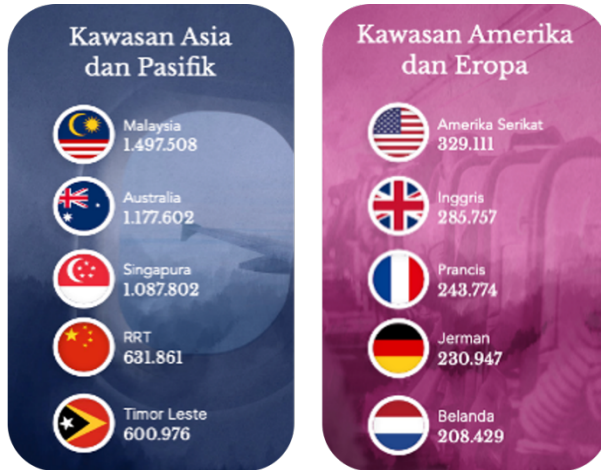
Grafik 9. Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2020-2024



Sumber: BPS. Perkembangan Pariwisata Januari 2024 BRS No. 18/03/Th. XXVII, 1 Maret 2024

Salah satu dampak langsung dari peningkatan citra positif Indonesia di mata internasional adalah meningkatnya kunjungan jumlah wisatawan asing ke Indonesia. Pada periode Januari-Desember 2023 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 11,68 juta, atau naik 98,3 persen dibandingkan jumlah kunjungan di Januari-Desember 2022. Jumlah ini melebihi target capaian yang direncanakan, yaitu 8,5 juta. Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia di bulan Desember 2023 didominasi oleh warga Malaysia (18,45 persen), Singapura (16,41 persen) dan Australia (11,87 persen).

Gambar 7. Negara Asal Wisata Mancanegara Terbanyak



Sumber: Laporan Kinerja Kemenlu 2023



Kinerja Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Regional dan Global

Sesuai dengan perspektif konseptual, negara *emerging power* perlu memiliki *diplomatic ambition*, yang membuatnya diperhitungkan dan diakui oleh negara-negara *emerging power* lain, serta negara-negara *major power* yang ada dalam sistem internasional. Peran dan kepemimpinan Indonesia di tingkat regional dan global menjadi indikator penting untuk membuat Indonesia dapat menunjukkan dirinya sebagai *emerging power* yang patut diperhitungkan dalam tata kelola global.

Dalam konteks ini, capaian kinerja diplomasi diukur juga dengan hasil peran/kontribusi Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional di forum multilateral baik di tingkat regional maupun global. Keberhasilan ini dapat dilihat dengan kemampuan Indonesia mempengaruhi pengambilan kebijakan isu-isu di tingkat regional dan global dan partisipasi dan keikutsertaan aktif Indonesia di forum-forum multilateral.

Indikator untuk melihat peran Indonesia yang pertama adalah **kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral** dimana Indonesia memimpin atau mengarahkan forum regional dan multilateral dengan memainkan peran sebagai *chair*, *co-chair*, *host*, *co-host*, ataupun *member of bureau*. **Keberhasilan pencalonan Indonesia pada Organisasi Internasional (OI)** juga menjadi salah satu indikator kinerja. Peran tersebut dapat ditunjukkan di level regional yang mencakup lingkup wilayah kawasan Aspasaf (Asia, Pasifik, dan Afrika) dan wilayah Amerop (Amerika dan Eropa), ataupun di level global yang meliputi banyak negara secara luas yang tidak dibatasi oleh kawasan tertentu. Kinerja ini menunjukkan tingkat kewibawaan Indonesia dan sekaligus tingkat kepercayaan dunia internasional terhadap kedudukan Indonesia, sehingga pengaruhnya dalam pembuatan kebijakan di forum regional dan multilateral diakui.

Indikator kedua adalah diterimanya prakarsa dan rekomendasi Indonesia dalam pertemuan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral. Wakil-wakil Indonesia telah berupaya menyuarakan kepentingan nasional Indonesia dapat diwujudkan dalam bentuk diterimanya prakarsa dan rekomendasi Indonesia dalam pertemuan di ASEAN dan forum multilateral.

Tabel 11. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional

Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional	Target	88,7%	93,6%	4,85	4,95
	Realisasi	96,58%	112,06%	4,98	4,97
	Capaian	108,89%	119,63%	102,68%	100,61%
Indeks Kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan multilateral	Target	86%	92,67%	4,84	4,93
	Realisasi	95,38%	117,2%	4,97	4,96
	Capaian	110,9%	120%	102,69%	100,65%
Indeks Prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral	Target	95%	96%	4,88	4,94
	Realisasi	98,9%	100%	5	5
	Capaian	104,11%	104,17%	102,46%	101,21%

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023

Tabel 12. Kepemimpinan Indonesia pada Forum Regional dan Multilatera

LEVEL FORUM	JUMLAH
Forum Regional Asia, Pasifik dan Afrika	10 pertemuan
Forum Regional Eropa dan Amerika	5 pertemuan
Forum Multilateral	76 pertemuan
Pencalonan dalam organisasi internasional	14 dari 15 pencalonan berhasil dimenangkan Indonesia

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023

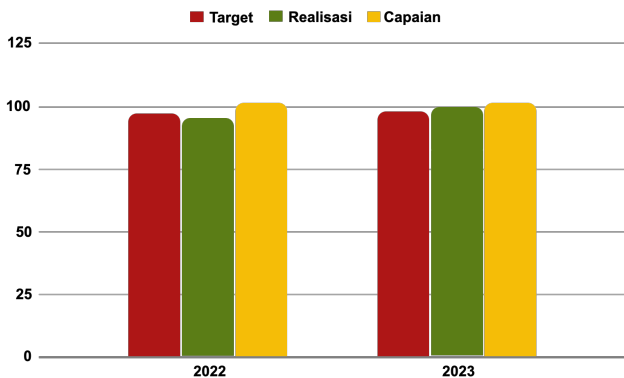
Tabel 13. Prakarsa dan Rekomendasi yang Disampaikan dan Diterima pada Pertemuan Tingkat ASEAN dan Multilateral Tahun 2023

Forum	Prakarsa yang diterima	Rekomendasi yang diterima
ASEAN	78	67
Forum Multilateral	24	96

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023

Di tahun 2023, sebanyak 265 rekomendasi dan prakarsa Indonesia telah diterima baik di forum ASEAN maupun di forum multilateral. Yang diterima sebanyak 265 dengan jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan sebanyak 265. Di level ASEAN, jumlahnya mencapai 145, sementara di forum multilateral jumlahnya mencapai 120.

Grafik 10. Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima pada forum multilateral di bidang ekonomi, sosial, dan budaya



Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri 2023, diolah

Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022, kinerja Indonesia untuk mengupayakan prakarsa dan rekomendasinya diterima di tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 101,21%.



PENINGKATAN KINERJA KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN KERJA SAMA PEMBANGUNAN INTERNASIONAL DI TENGAH POLIKRISIS

Bagian ini memaparkan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional supaya dapat lebih mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional. Rekomendasi didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja, analisis kesenjangan capaian realisasi dan target, analisis dampak kinerja, dan identifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kinerja



Mewujudkan Transformasi Indonesia menjadi Negara Maju pada 2045

*A*nalisis kesenjangan yang didasarkan pada hasil evaluasi kinerja diplomasi ekonomi sebagai instrumen Kebijakan Luar Negeri untuk mendukung Prioritas Nasional 1 menunjukkan adanya disparitas negatif antara realisasi target Rencana Output dengan Outcome yang dihasilkan oleh capaian. Pada tahun 2023, realisasi kinerja tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor perdagangan yang ditunjukkan dengan jumlah komitmen perdagangan adalah sebesar 102,41% dari target sebesar 92,54%, sehingga capaian target kinerjanya sebesar 110,67%. Capaian komitmen perdagangan didominasi sektor komoditas unggulan Indonesia lainnya seperti otomotif, bumbu, kopi, dan bahan mentah

dengan jumlah sebesar 153 komitmen dari total 381 komitmen yang berhasil disepakati dengan negara akreditasi. Jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022, terdapat peningkatan jumlah dimana di tahun 2022 diperoleh 347 komitmen.

Sekalipun capaian perolehan komitmen melebihi target output yang direncanakan, capaian kinerja diplomasi ekonomi untuk **peningkatan nilai perdagangan dengan negara akreditasi masih di bawah target yang direncanakan** (Laporan Kinerja Kemenlu 2023). Di tahun 2023, nilai perdagangan dengan negara akreditasi adalah sebesar USD 214,186,705,192.86 dari target sebesar USD 260,647,134,702.00, sehingga capaian kinerja peningkatan nilai perdagangan adalah sebesar 82,17%. Ini menunjukkan bahwa **peningkatan perolehan komitmen tidak serta merta mendorong peningkatan nilai perdagangan dengan negara-negara akreditasi secara positif**. Masih perlu dilakukan diplomasi ekonomi secara lebih efektif untuk membuat korelasi positif antara jumlah komitmen perdagangan sebagai *output* dengan nilai perdagangan sebagai *outcome*. Di antaranya adalah dengan memastikan implementasi kesepakatan kerja sama ekonomi.

Evaluasi kinerja diplomasi ekonomi di sektor investasi menunjukkan hasil yang lebih positif jika dibandingkan dengan capaian outcome di sektor perdagangan. Capaian ini ditunjukkan dengan indikator perolehan komitmen investasi dan realisasi nilai investasi. Capaian tingkat efektivitas diplomasi ekonomi di sektor investasi adalah 118,99% dari target sebesar 94,40%, sehingga persentase capaiannya sebesar 126,05%. Sementara realisasi nilai investasi mencapai USD 36,940,989,200.00 dari target sebesar USD33,967,340,279.00, sehingga persentase capaiannya sebesar 108,75%. Keberhasilan capaian target efektivitas di sektor investasi didukung oleh realisasi jumlah komitmen investasi in-bound yang tinggi, dengan valuasi komitmen yang berhasil diidentifikasi mencapai USD60,728,032,000.00 dari 190 komitmen yang berhasil disepakati. Ini didukung oleh aktivitas promosi investasi dan penjangkangan dan fasilitasi komitmen investasi di sektor-sektor prioritas.

Tabel 14. Signifikansi Dampak Kinerja Diplomasi Ekonomi terhadap Prioritas Nasional 1

Capaian Rencana Output	Outcome	Impact (Dukungan pada PN 1 dan Tema RKP 2023)
Komitmen perdagangan internasional	Peningkatan nilai perdagangan	Peningkatan produk nasional bernilai ekspor yang berdaya saing tinggi di pasar global
Komitmen investasi asing di Indonesia	Peningkatan nilai investasi asing ke Indonesia	Pengembangan industri nasional & penciptaan lapangan kerja
Promosi komoditas dan investasi di luar negeri	Ekspansi dan pendalaman pasar global	Peningkatan investasi outbound ke negara-negara mitra
Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia	Pertumbuhan ekonomi kreatif dan UMKM	Transformasi ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan

Analisa dampak kinerja kebijakan luar negeri terhadap pencapaian Prioritas Nasional **menunjukkan tingkat signifikansi yang sangat tinggi**. Kesepakatan kerja sama ekonomi internasional yang dibuat melalui diplomasi ekonomi memfasilitasi naiknya nilai ekspor produk-produk nasional, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan industri nasional yang berorientasi ekspor. Kesepakatan internasional di sektor investasi memberi peluang besar bagi pembangunan industri dan sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja di Indonesia.

Diplomasi ekonomi juga dapat mendorong transformasi ekonomi nasional yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan:

- Industri nasional perlu lebih berorientasi pada pengembangan kapasitas untuk mengisi *supply* di pasar global, dan sekaligus

menjawab sisi demand pasar global yang tinggi, selain memiliki daya saing di tingkat global.

- Promosi produk-produk Indonesia di luar negeri menjadi sarana untuk memperluas dan memperdalam pasar bagi komoditas Indonesia di negara-negara mitra.
- Meningkatnya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dapat mendorong tumbuhnya industri kreatif dan UMKM untuk menopang perekonomian nasional.

Analisis Tantangan

Dalam meningkatkan kinerja diplomasi ekonomi, terdapat sejumlah tantangan eksternal dan internal yang menghambat optimalisasi kinerja diplomasi ekonomi untuk dapat mendukung Prioritas Nasional 1. Tantangan-tantangan tersebut diantaranya adalah:

Tantangan Eksternal

- **Kebijakan proteksionis** berbagai negara untuk melindungi kondisi ekonomi domestiknya. Kebijakan ini menghambat pelaku usaha Indonesia untuk menembus pasar ekspor. Di antaranya adalah dengan standarisasi produk impor di negara-negara akreditasi yang membuat para pelaku usaha Indonesia kesulitan untuk dapat memenuhi syarat kualitas, prosedur, dan administrasi dari negara importir.
- **Kesepakatan kerja sama ekonomi internasional tidak serta merta dapat diimplementasikan** pada tahun yang sama sehingga *outcome* dalam bentuk peningkatan nilai perdagangan dengan negara-negara mitra dapat segera diwujudkan.
- Masih tidak menentukannya situasi **geopolitik dan kondisi ekonomi global**, yang diperburuk dengan **trend *friendshoring* dalam perdagangan dan investasi global** di mana negara-

negara cenderung mengembangkan perdagangan dan investasi dengan negara-negara yang memiliki posisi yang sama dalam geopolitik dan geoekonomi.

- **Keterbatasan konektivitas** yang membuat biaya logistik yang tinggi, termasuk konektivitas dengan negara-negara pasar non tradisional baru yang secara geografis letaknya jauh dari Indonesia.

Tantangan Internal

- **Kendala pembiayaan** karena masih terbatasnya skema pembiayaan yang dapat membantu pelaku usaha dalam negeri untuk mengatasi keterbatasan modal dalam menembus pasar ekspor supaya dapat bersaing dengan produk pesaing yang memperoleh akses pembiayaan. Kendala pembiayaan mencakup belum adanya skema pembiayaan, belum efektifnya penggunaan mekanisme *local currency settlement* (LCS) dan belum terbentuknya kerjasama antara perbankan nasional dan perbankan di negara akreditasi.
- Masih **rendahnya kesadaran pelaku usaha** dalam negeri untuk melakukan ekspor produk di luar negeri.
- **Perlu eksposur lebih banyak produk-produk manufaktur berkualitas** dan sesuai dengan prinsip ESG yang dapat memenuhi sisi *demand* pasar global.
- **Pembangunan industri di dalam negeri** yang belum betul-betul berorientasi pada ekspor dan sesuai dengan kaidah norma internasional seperti ESG.
- **Peringkat *Ease of Doing Business Indonesia*** berada pada ranking 73 dari 190 negara, di bawah sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam (peringkat 70), Thailand (21), Malaysia (12), dan Singapura (2).

Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan yang menghambat optimalisasi kinerja diplomasi ekonomi dalam mendukung Prioritas Nasional 1, diperlukan suatu pendekatan yang komprehensif, mulai dari perumusan kepentingan yang jelas, arah dan strategi kebijakan, strategi-strategi kunci dan operasional, dan pelibatan pemangku-pemangku kepentingan, serta penguatan mekanisme koordinasi. Hal ini tertuang dalam *Grand Design* Diplomasi Ekonomi (GDDE) Indonesia.

1. Penetapan Kepentingan Utama Diplomasi Ekonomi

Kepentingan tersebut mencakup daya saing untuk tujuan perdagangan dan investasi, diversifikasi nilai tambah, mencari solusi atas kebijakan diskriminatif dan pendekatan inovatif untuk pendanaan dan kemitraan.

2. Arah dan Strategi

Arah dan Strategi diplomasi ekonomi mencakup integrasi ekonomi global di sektor-sektor prioritas, peningkatan akses pasar dan penguatan industri, *Indonesia Go Global*, pengembangan ekonomi hijau, biru dan industri bernilai tambah tinggi, peningkatan kesempatan kerja tenaga terampil dan profesional dan perlindungan pekerja, peningkatan peran kerja sama pembangunan internasional, dan penguatan infrastruktur diplomasi.

3. Strategi Kunci Penetrasi dan Perluasan Pasar

Strategi-strategi kunci penetrasi dan perluasan pasar meliputi:

- *Market Intelligence*
- Promosi dan *Branding*
- Perluasan Perjanjian Ekonomi dan Perdagangan
- Penanggulangan Hambatan Tarif dan Non Tarif
- Akses Pembiayaan
- Keterlibatan Indonesia dalam Pembentukan Arsitektur Ekonomi

4. Penetapan Sektor Prioritas

Sektor-sektor yang menjadi prioritas meliputi:

- Ekonomi Hijau, yaitu ekosistem EV dan EBT
- Ekonomi Biru, yaitu Perikanan dan Hilirisasi
- Ekonomi Digital, yaitu digitalisasi, produktivitas, dan rantai pasok
- Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, termasuk peningkatan wisatawan, perbaikan konektivitas, dan penguatan peran UMKM
- Pangan yang mencakup pasokan, pertanian, dan pupuk
- Kesehatan yang mencakup farmasi dan alat kesehatan dan transfer teknologi

5. Optimalisasi Peran Pemangku Kepentingan

Peran masing-masing pemangku kepentingan perlu didorong untuk terlibat secara lebih optimal. Pemangku kepentingan mencakup pemerintah, perwakilan RI, dunia usaha, lembaga pembiayaan, lembaga riset dan masyarakat.

6. Penguatan Peran Koordinasi di Antara Pemerintah, BUMN/Sektor Swasta dan Lembaga Pembiayaan dan Masyarakat Diaspora

- Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait
- Melakukan koordinasi, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan GDDE; dan
- Melakukan koordinasi untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan GDDE.

Gambar 8. Peran Pemangku Kepentingan dalam Diplomasi Ekonomi



Sumber: Bahan Paparan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kementerian Luar Negeri pada FGD Evaluasi Dukungan KLN pada Prioritas Nasional, 20 September 2024

Untuk mengatasi tantangan terkait polikrisis, perlu strategi diplomasi ekonomi yang bersifat pro-aktif dengan mengoptimalkan semua jalur diplomasi yang tersedia:

- **Di level global**, Indonesia dapat mengoptimalkan perannya di forum ekonomi multilateral, seperti G20 untuk menyuarakan pentingnya negara-negara membuat kebijakan yang kondusif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi global, termasuk menghindarkan diri dari kebijakan-kebijakan proteksionis maupun ke cenderung *friendshoring* dalam perdagangan dan investasi.
- **Di level regional**, Indonesia dapat mengoptimalkan perannya di forum ekonomi regional, seperti ASEAN dan APEC untuk menyuarakan pentingnya negara-negara memenuhi komitmennya pada kesepakatan kerjasama ekonomi regional,

termasuk menghindarkan diri dari kebijakankebijakan proteksionis.

- **Di level bilateral**, Indonesia dapat mengoptimalkan peran perwakilanperwakilan RI di luar negeri, untuk mendorong segera diimplementasikannya kesepakatan-kesepakatan kerjasama ekonomi yang telah disetujui secara bilateral maupun multilateral. Pendekatan bilateral juga dapat dilakukan untuk memastikan berlanjutnya kerjasama ekonomi, sekalipun terjadi trend *friendshoring* akibat kondisi geopolitik yang berpengaruh terhadap geoekonomi.
- **Di level nasional**, Indonesia terus mengembangkan industri berorientasi ekspor yang berdaya saing, mengembangkan strategi ekspansi dan pendalaman pasar global, termasuk eksposur produk unggulan di luar negeri, dan menyiapkan instrumen-instrumen untuk penerapan kesepakatan internasional yang telah disetujui dengan negara mitra/akreditasi.



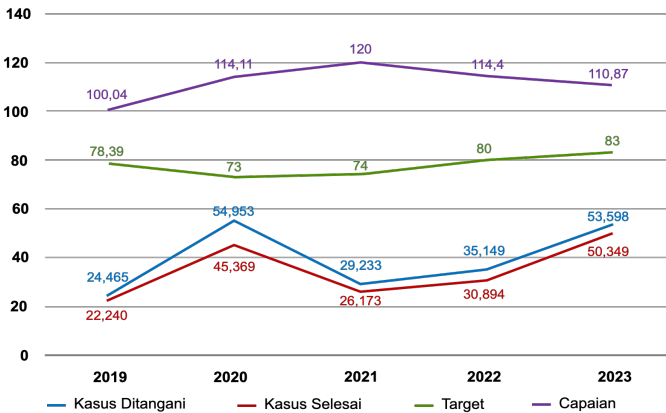
Penguatan Pelindungan WNI di Luar Negeri

Evaluasi kinerja Pelindungan WNI di luar negeri menunjukkan tingkat ketercapaian target dan persentase realisasi yang positif di tahun 2023. **Analisis gap menunjukkan adanya disparitas negatif** antara capaian target Rencana Output dan kondisi di lapangan terkait dengan terus munculnya potensi ancaman bagi WNI yang tinggal di luar negeri pada tahun 2023 dan 2024. Ancaman-ancaman tersebut seringkali di luar kontrol pemerintah Indonesia. **Pencapaian target** dan persentase realisasi yang positif tersebut ternyata **tidak sepenuhnya mencerminkan penyelesaian masalah Pelindungan WNI secara menyeluruh.**

Indikator kinerja untuk melihat capaian pelindungan WNI adalah penyelesaian kasus WNI di luar negeri, baik kasus umum maupun kasus khusus. Secara umum, di tahun 2023 persentase penyelesaian Kasus WNI di Luar Negeri mencapai target dengan capaian sebesar 110,87% atau telah terealisasi sebesar 92,02% dari target 83,00%. Kasus khusus yang diselesaikan sebesar 90,04% dari target 82,00% dengan capaian sebesar 109,80%. Penyelesaian kasus umum

mencapai 94,44% dari target 85,00%, yang artinya persentase capaian sebesar 111,11%.

Grafik 11. Capaian Pelindungan WNI 2019-2023



Sumber: Bahan Paparan Direktur Pelindungan WNI Kemenlu pada FGD Evaluasi Dukungan KLN pada Prioritas Nasional, 20 September 2024

Sekalipun evaluasi kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian target dan realisasi, namun **pelindungan WNI di luar negeri merupakan agenda yang tidak mudah**. Kasus-kasus baru muncul sementara kasus-kasus WNI yang sudah berlangsung lama masih belum terselesaikan seluruhnya. Demikian pula potensi ancaman seperti konflik di sejumlah negara dan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan transnasional tetap belum dapat diatasi sepenuhnya.

Analisis Dampak

Pelindungan Warga Negara Indonesia memiliki dampak sangat signifikan bagi perwujudan Prioritas Nasional 7 mengingat di tahun 2023 dan 2024 terdapat peningkatan potensi ancaman, baik

akibat konflik internal/antar negara, bencana, kejahatan lintas negara, tuntutan hukum, maupun permasalahan keimigrasian.

Penyelesaian kasus khusus dan umum dapat memberikan perlindungan keselamatan bagi WNI di luar negeri. Kinerja tersebut berkontribusi pada penguatan legitimasi dan kepercayaan kepada pemerintah, dan pada akhirnya mendukung stabilitas politik dan memperkuat fungsi penegakan hukum. Dalam rangka meningkatkan kinerja perlindungan WNI di luar negeri diperlukan perbaikan sistem layanan publik yang responsif dan akuntabel, Kinerja di aspek ini memperkuat sistem layanan publik yang menjadi unsur penting pada Prioritas Nasional 7. Perlindungan WNI juga dapat mendukung tema utama RKP 2023 dan 2024 yaitu transformasi ekonomi yang inklusif, dengan semakin sejahteranya PMI.

Tabel 15. Signifikansi Dampak Perlindungan WNI di Luar Negeri terhadap Prioritas Nasional 7

Aspek Capaian dari Rencana Output	Outcome	Impact (Dukungan bagi Indikator PN 7 dan Tema RKP 2023)
Penyelesaian Kasus Khusus dan Umum*	Dilindunginya keselamatan WNI di luar negeri	Penguatan legitimasi Pemerintah memperkuat stabilitas politik dan penegakan hukum
Penguatan fungsi Perwakilan RI di luar negeri	Diperbaikinya system layanan yang responsif dan akuntabel	Perbaikan system layanan kepada public
Penimngkatan kinerja pekerja migran di luar negeri	Peningkatan remitansi dari pekerja migran Indonesia	Peningkatan kesejahteraan masyarakat mendukung transformasi ekonomi yang inklusif

Sumber: Hasil Analisis Tim Penyusun berdasarkan hasil FGD FGD Evaluasi Dukungan KLN pada Prioritas Nasional, 20 September 2024

Keterangan:

* **Kasus Khusus** termasuk *high profile case*, seperti hukuman mati, pelaku atau korban pembunuhan, korban penyiksaan fisik berat, korban TPPO, kasus narkoba, evakuasi WNI (perang, bencana alam, kecelakaan pesawat/ kapal laut, amnesti) serta kasus yang bersifat insidental dan/atau masif yang memiliki ramifikasi yang cukup luas secara politis, ketertiban masyarakat, dan keselamatan jiwa WNI.

* **Kasus Umum** termasuk antara lain kasus perdata, keimigrasian, ketenagakerjaan, klaim asuransi, meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, pencurian, pencucian uang, pemerkosaan dan pelanggaran hukum. Penanganan kasus WNI di Luar Negeri dilaksanakan sesuai dengan prosedur/SOP, peraturan nasional, peraturan negara setempat dan ketentuan internasional.

Analisis Tantangan

Teridentifikasi sejumlah masalah internal dan eksternal yang dihadapi dalam meningkatkan dukungan kinerja perlindungan WNI di luar negeri terhadap Prioritas Nasional 7, seperti ditunjukkan di Tabel 5.3.

Tabel 16. Tabel Tantangan Pelindungan WNI

Akurasi Data Migrasi	Tata Kelola Migrasi	Policy Coherence	Kondisi Publik Domestik
Sistem Pencatatan Instansi Berbeda-beda	Overlapping tugas dan fungsi antar pemangku kepentingan	Kebijakan negara pengirim dan negara penerima yang berbeda	Tingkat pendidikan calon PMI masih rendah
Integrasi belum mencakup seluruh K/L kunci	Penegakan hukum belum optimal	Implementasi standarisasi perlindungan migran di kawasan belum optimal	Tingkat kesadaran publik akan migrasi masih rendah

Akurasi Data Migrasi	Tata Kelola Migrasi	<i>Policy Coherence</i>	Kondisi Publik Domestik
Pengembangan sistem masih sektoral	Kapasitas pemerintah daerah belum maksimal		Publik masih belum memahami tanggung jawabnya sebagai pelaku migrasi

Sumber: Bahan paparan narasumber pada FGD Evaluasi Dukungan Kebijakan Luar Negeri terhadap Prioritas Nasional, 20 September 2024

Tantangan pertama terkait **lemahnya akurasi data migrasi** dimana masing-masing instansi memiliki sistem pencatatan yang berbeda-beda, pengembangan sistem masih sektoral dan belum terintegrasi.

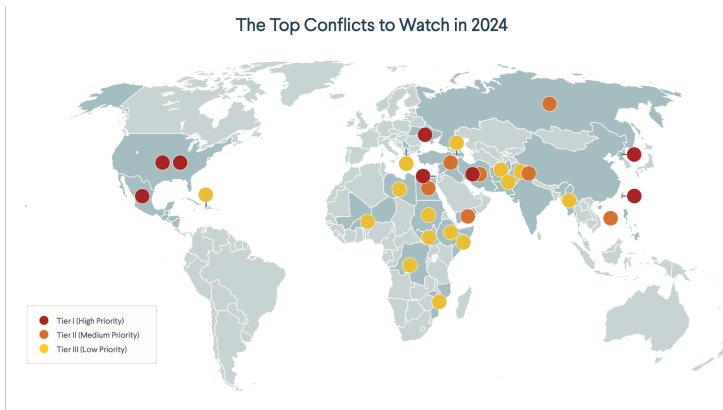
Tata kelola migrasi juga masih lemah di mana terjadi tumpang tindih tugas dan fungsi di antara pemangku kepentingan, sementara kapasitas pemerintah daerah masih belum optimal dan penegakan hukum belum optimal.

Policy coherence juga merupakan tantangan yang sulit diatasi. Terdapat perbedaan kebijakan negara pengirim dan penerima. Implementasi standardisasi perlindungan migran di kawasan belum optimal.

Kluster tantangan keempat terkait **kondisi publik domestik yang belum memiliki kesadaran terhadap ise migrasi dan belum memahami tanggung jawa sebagai pelaku migrasi**. Calon PMI memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah.

Tantangan lain yang sulit adalah **masih terjadinya konflik di banyak negara di berbagai kawasan**. Pemerintah Indonesia harus selalu mempersiapkan diri melakukan evakuasi warga negara yang tinggal di wilayah-wilayah konflik jika perang terbuka terjadi di antara faksi-faksi yang berkonflik.

Gambar 9. Peta Negara-negara Yang Rentan Terjadi Konflik (2024)



Sumber: Council on Foreign Relations, 2024

Selanjutnya, terdapat **kejahatan transnasional** yang melibatkan aktor-aktor lintas batas negara, seperti **perkembangan *online scam*** yang banyak melibatkan warga negara Indonesia di dalamnya. Bisnis serupa yang beroperasi di daerah Myawaddy, Myanmar, misalnya, sebagai salah satu sentra di Asia Tenggara. Selama periode 2021-2023, dilaporkan ada lebih dari 4000 warga negara Indonesia terlibat dalam bisnis penipuan daring tersebut.

Tantangan-tantangan tersebut menyebabkan tanggung jawab perlindungan WNI di luar negeri menjadi seolah tidak pernah terselesaikan. Sekalipun pencapaian kinerja perlindungan WNI selalu melebihi realisasi di atas 100%, dampak dari kinerja tersebut tidak sepenuhnya terlihat. Kasus-kasus yang muncul pun kerap berulang, bahkan melibatkan oknum-oknum yang sama.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan kinerja perlindungan yang lebih berdampak, pemerintah Indonesia perlu melakukan serangkaian upaya yang komprehensif. Rekomendasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.3.

- Perlunya **penguatan regulasi perlindungan WNI**, yang didukung dengan edukasi dan pencegahan hasrat moral kepada para calon PMI maupun PMI
- **Diplomasi perlindungan WNI dan infrastruktur perlindungan juga perlu diperkuat** supaya semakin responsif dalam mengatasi masalah yang dihadapi WNI di luar negeri
- **Standar pelayanan dan perlindungan WNI** perlu dilakukan perbaikan. Perlu dibangun interkoneksi di antara sistem pelayanan dan perlindungan yang telah dikembangkan oleh instansi-instansi terkait supaya terjadi **interoperabilitas antar sistem**.
- Konsepsi perlindungan bagi pelindung juga dirumuskan dengan tepat dan jelas supaya mempermudah proses perlindungan dan tidak terjadi dampak negatif bagi pelindung.
- Diperlukan anggaran kedaruratan yang memadai dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksikan, seperti konflik atau bencana alam.

Gambar 10. Strategi Pelindungan WNI di luar negeri



Sumber: Bahan Paparan Direktur Pelindungan WNI Kemenlu pada FGD Evaluasi Dukungan KLN pada Prioritas Pembangunan Nasional, 20 September 2024.

Beberapa rekomendasi lain adalah pentingnya **penguatan koordinasi di antara instansi pemerintah pusat dan daerah, dan pelibatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat**. Peran Pemerintah Daerah penting dalam memberikan penjelasan terkait prosedur melalui edukasi terkait bagaimana prosedur bekerja di luar negeri, dan membuat pelatihan-pelatihan sehingga mampu mulai mengurangi pengiriman PMI sektor informal. LSM yang sudah aktif dalam membantu PMI, dapat didorong untuk lebih aktif dalam membangun kesadaran kepada calon PMI di dalam negeri maupun PMI yang sedang bekerja di luar negeri.



Percepatan Penyelesaian Perundingan Perbatasan

Evaluasi kinerja kebijakan luar negeri dalam penyelesaian perundingan perbatasan menunjukkan hasil yang positif. Realisasi terhadap target (49,99) mencapai indeks 50,96, yang berarti persentasenya mencapai 101,94%. Persentase capaian ini meningkat dari 101,12% di tahun 2022. Realisasi Indeks Perundingan Batas Maritim di tahun 2023 meningkat sebesar 4,12 poin, melampaui kenaikan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya. Indikator-indikator capaian kinerja PBM ini ditandai dengan keberhasilan dalam menyepakati 2 (dua) perjanjian batas laut wilayah di Laut Sulawesi dan di Selat Malaka bagian Selatan dengan Malaysia. Faktor pendukung keberhasilan ini diantaranya adalah kondusifnya kondisi internal dan eksternal dalam proses perundingan, kerja sama yang kuat dalam Tim Teknis Batas Maritim Indonesia, dan dukungan dari pimpinan kedua negara.

Sekalipun capaian kinerja perundingan perbatasan telah memenuhi target dengan persentase realisasi di atas 100%, penyelesaian perundingan seluruh perbatasan (baik darat maupun maritim) dengan negara-negara tetangga masih sangat jauh untuk diwujudkan. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk menuntaskan seluruh perundingan perbatasan, diantaranya mengingat banyaknya jumlah isu dan karakteristik perundingan yang berjangka panjang.

Seperti ditunjukkan pada Gambar 5.4. Indonesia harus menegosiasikan perbatasan darat sepanjang kurang lebih 3.151 km dengan Timor Leste, Malaysia dan Papua Nugini. Perundingan batas maritim lebih kompleks lagi karena Indonesia harus merundingkan kurang lebih 99.093 km pajang perbatasan maritim dengan sepuluh negara, yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Papua Nugini, Timor Leste, Australia, Palau, Pilipina, India dan Thailand.

Gambar 11. Batas Darat dan Maritim Indonesia



- Batas Darat dengan 3 Negara
- Batas Laut dengan 10 Negara
- Batas Udara dengan 10 Negara

BATAS DARAT: PANJANG 3.151 KM;
 Di Kalbar dan Kaltara: 2 *Unresolved Segment* dan 1 *Unsurveyed Segment* DI NTT

BATAS LAUT: jg garis pantai 14.993 km; FPKT 111 Pulau
 Batas Laut teritorial dgn negara: Malaysia, RDTL, PNG, Singapura.
 Batas Laut Yurisdiksi (ZEE dan Landas Kontinen) dgn 9 negara: Malaysia, RDTL, PNG, India, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Australia

Sumber: Data Badan Nasional Pelindungan Perbatasan

Analisis Dampak

Capaian kinerja perundingan perbatasan memiliki **potensi dampak yang sangat signifikan** bagi perwujudan Prioritas Nasional 7. Pelaksanaan perundingan perbatasan harus dilanjutkan dan diselesaikan untuk **memberikan kepastian hukum batas negara dan menjamin pengelolaan perbatasan**.

Capaian kinerja tersebut memperjelas kewenangan negara untuk memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia di wilayah hingga perbatasan yang telah disepakati. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi penduduk di seluruh wilayah kedaulatan, dan menegakkan hukum yang berlaku di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia.

Capaian kinerja perundingan perbatasan juga dapat mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nelayan-nelayan Indonesia mendapat manfaat untuk menangkap ikan dan meningkatkan kesejahteraan mereka dengan lebih aman dan maksimal.

Tabel 17. Signifikansi Dampak Kinerja Perundingan Perbatasan pada Prioritas Nasional 7

Capaian berdasarkan Rencana <i>Output</i>	<i>Output</i>	<i>Impact</i> (Dukungan pada PN 7 dan Tema RKP 2023)
Penyelesaian perundingan perbatasan maritim	Kewenangan negara memanfaatkan sumber daya hingga batas maritim secara optimal	Stabilitas politik, kepastian hukum, pertahanan wilayah kedaulatan dan jaminan keamanan dalam pengelolaan sumber-sumber maritim
Penyelesaian perbatasan darat	Kewenangan negara dalam mengelola wilayah darat, penegakan hukum dan jaminan keamanan bagi penduduk yang tinggal hingga wilayah perbatasan	Stabilitas politik, kepastian hukum, pertahanan kedaulatan dan jaminan keamanan bagi penduduk dan pengelolaan sumber-sumber maritim

Capaian berdasarkan Rencana <i>Output</i>	<i>Output</i>	<i>Impact</i> (Dukungan pada PN 7 dan Tema RKP 2023)
Kesepakatan dengan negara tetangga perbatasan untuk pengembangan teritori demi kepentingan bersama	Pengembangan kapasitas untuk mengolah sumber daya secara lebih optimal, misalnya nelayan Indonesia dan Vietnam pasca kesepakatan perbatasan maritim	Dukungan transformasi ekonomi yang inklusif bagi penduduk di wilayah perbatasan darat dan maritim, dan bagi nelayan yang mengelola sumber daya laut

Analisis Tantangan

Perundingan perbatasan adalah *long-haul process*, yaitu sebuah proses yang membutuhkan waktu sangat lama untuk membuahkan hasil. Kinerja perundingan perbatasan membutuhkan dukungan dari semua aspek terkait, termasuk SDM, anggaran dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga.

Terdapat tantangan internal dan eksternal yang menjadi penghambat kinerja perundingan perbatasan untuk mendukung prioritas nasional, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 5.5 berikut.

Tabel 18. Tantangan Perundingan Perbatasan

Tantangan Internal	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika Politik dalam negeri termasuk mandat pimpinan dan prioritas batas maritim dan darat yang harus diselesaikan • Keterbatasan anggaran dan SDM
---------------------------	---

Tantangan Eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Dinamika kebijakan politik dan situasi politik domestik negara mitra • Perbedaan pendekatan dalam mencari solusi penyelesaian perundingan batas maritimnya • Adanya pergantian pejabat atau Ketua Tim Teknis negara mitra berpengaruh terhadap pelaksanaan pertemuan, pemahaman dalam perundingan penetapan batas maritim, dan komunikasi untuk menetapkan penjadwalan/pelaksanaan pertemuan.
----------------------------	---

Sumber: Laporan Kinerja Kemenlu 2023, hal 175-179; Bahan Paparan Direktur Hukum dan Perjanjian Kewilayahan, pada FGD Evaluasi Dukungan Kebijakan Luar Negeri pada Prioritas Pembangunan Nasional, 20 September 2024.

Dari sisi internal, tantangan pertama adalah **dinamika politik Indonesia** dikarenakan prioritas dan mandat dari pimpinan berujung kepada urgensi penyelesaian perundingan dengan negara-negara tertentu. Tantangan lainnya mencakup **keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia**, seperti dalam memahami dan membaca peta.

Dari sisi eksternal juga terdapat 2 tantangan. Pertama, **kondisi politik internal di negara mitra** akan mempengaruhi sebagaimana diprioritaskannya perundingan perbatasan ini bagi negara tersebut. Hal ini menyebabkan **perbedaan dalam pendekatan dalam mencari solusi**. Tantangan eksternal kedua adalah **pergantian pejabat atau ketua tim teknis negara mitra**. Hal ini berpengaruh kepada pelaksanaan pertemuan, komunikasi sebelum dan dalam pertemuan, serta pemahaman dalam perundingan itu sendiri.

Rekomendasi

Perundingan perbatasan harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian supaya hasilnya optimal untuk mewujudkan kepentingan Indonesia. Pelaksanaan perundingan perbatasan perlu didukung dengan modalitas yang tepat, seperti mumpuninya kualitas SDM, perencanaan yang matang, anggaran yang memadai, dan kuatnya *institutional memory* dari proses perundingan yang dilakukan.

Dalam rangka peningkatan kinerja penyelesaian perundingan perbatasan, perlu dilakukan upaya internal, diantaranya:

- Penetapan prioritas perbatasan maritim dan darat yang akan diupayakan segera diselesaikan dengan negara-negara mitra.
- Perumusan strategi yang lebih efektif untuk memastikan dukungan dari negara-negara mitra untuk penyelesaian perbatasan yang telah ditetapkan sebagai prioritas bagi Indonesia.
- Peningkatan intensitas pertemuan persiapan dengan Kementerian/ Lembaga yang menjadi anggota Tim Teknis, untuk menyusun posisi dan strategi perundingan, serta untuk tercapainya kesamaan pandangan di antara Tim Teknis Batas Maritim Indonesia.
- Pentingnya pelaporan secara berkala kepada pimpinan/Tim Penasihat/Tim Pakar mengenai perkembangan negosiasi, guna memperoleh mandat dan instruksi untuk perundingan putaran selanjutnya.
- Disusunnya *institutional memory* melalui pembuatan matriks posisi Indonesia dan hasil *exercise* yang diperbarui secara berkala dan pembuatan laporan pertemuan komprehensif.

Untuk menghadapi tantangan eksternal, upaya-upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah:

- Menjaga komunikasi dengan Tim Teknis negara mitra melalui penyelenggaraan berbagai rangkaian pertemuan informal pra-perundingan guna menjaga momentum negosiasi
- Menggunakan forum-forum bilateral untuk mendorong komitmen di tingkat politis yang lebih tinggi untuk melanjutkan perundingan, dan mempercepat proses internal negara mitra.

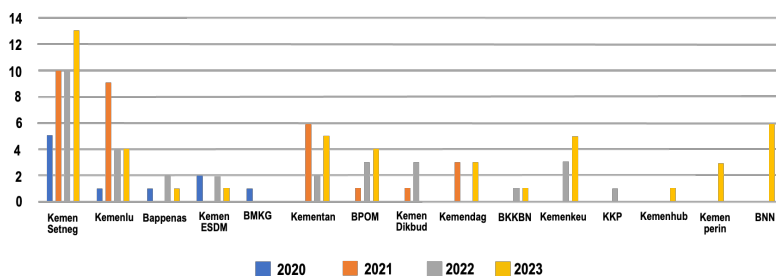


Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional

*H*asil **analisis gap** kinerja Kerjasama Pembangunan Internasional menunjukkan masih adanya kesenjangan antara target dan realisasi capaian jumlah pelaksanaan kegiatan KSST di tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023 berdasarkan data yang dikumpulkan dari K/L terlaksana sebanyak 47 kegiatan KSST, sementara target yang direncanakan di RKP berjumlah 115 kegiatan. Jumlah 47 ini naik signifikan dari penyelenggaraan kegiatan di tahun 2020 yang hanya berjumlah 10 kegiatan karena hambatan yang muncul akibat terjadinya COVID-19. Di tahun 2021, jumlah kegiatan menjadi 30, sementara di tahun 2022 jumlahnya 31. Sekalipun ada gap antara target rencana dan realisasi capaian, kinerja di tahun 2023 masih menunjukkan peningkatan jumlah yang signifikan.

Dari sisi anggaran untuk membiayai program/kegiatan KSST, jumlah anggaran sebesar 73,4 miliar rupiah masih di bawah target RKP tahun 2023, yaitu 171 miliar rupiah. Namun demikian, besarnya anggaran ini meningkat dari anggaran di tahun 2022, di mana alokasi anggaran untuk program/kegiatan KSST hanya mencapai 60,5 miliar rupiah.

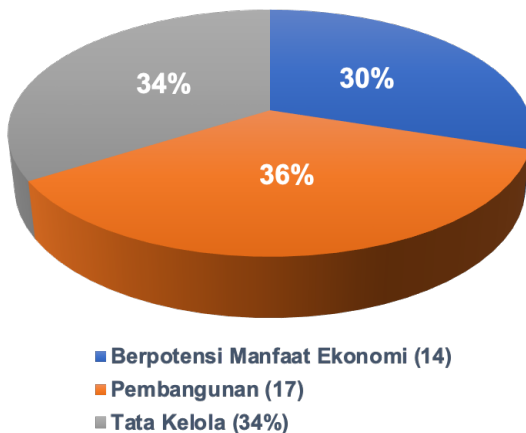
Grafik 12. Jumlah Kegiatan KSST Kementerian/Lembaga 2020-2023



Keterangan: Beberapa kegiatan KSST melibatkan 2 atau lebih K/L, dan didaftarkan sebagai satu kegiatan di salah satu K/L *focal point*.

Dari sisi jumlah K/L yang terlibat, terdapat peningkatan signifikan dalam periode 2020-2023. Kementerian Sekretariat Negara merupakan kementerian dengan jumlah kegiatan terbanyak di setiap tahunnya. Dalam pelaksanaannya, Kementerian tersebut bekerja sama dengan berbagai kementerian termasuk Kemen ESDM, Kementerian Perindustrian, BKKBN, dan lain-lain.

Grafik 13. Klasifikasi Kegiatan KSST dalam Jumlah dan Persentase (2023)



Keterangan: Total kegiatan yang Terdata: 47 Kegiatan di 2023

Analisis Dampak

Analisis dampak menunjukkan pentingnya pelaksanaan KSST yang lebih terencana dan berkelanjutan untuk mendukung prioritas nasional, termasuk transformasi ekonomi dan penguatan peran dan pengaruh Indonesia di forum internasional.

Total kegiatan KSST di tahun 2023 berjumlah 47 dengan 14 kegiatan di antaranya memiliki potensi manfaat ekonomi bagi Indonesia. Potensi ekonomi tersebut meliputi penjualan produk dan teknologi yang dimiliki Indonesia bagi negara-negara mitra pembangunan yang mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas dan *knowledge sharing*. Contoh kegiatan yang bernilai manfaat ekonomi adalah pelatihan-pelatihan budidaya pertanian di negara-negara Afrika di mana Indonesia dapat menjual alat-alat pertanian seperti traktor ke negara-negara yang mengikuti pelatihan di pusat-pusat pelatihan pertanian Indonesia di Gambia dan Tanzania. Potensi ekonomi lain dari pelatihan seperti ini adalah penjualan pesawat

produk PTDI yang dapat membantu memodifikasi cuaca untuk mendukung peningkatan hasil-hasil pertanian.

Contoh lain adalah pelatihan pembangunan kapasitas untuk diversifikasi produk kelapa dan turunannya ke negara-negara di Karibia di mana Indonesia dapat menjual teknologi pengolahan kelapa di negara-negara tersebut. Bantuan penyediaan vaksin merupakan contoh lain kegiatan KSST yang bermanfaat ekonomi dalam rangka perluasan pasar produk vaksin Indonesia untuk mendukung pembangunan kesehatan di negara-negara mitra.

Pelatihan pembangunan kapasitas di bidang energi baru dan terbarukan dan pertambangan dapat mendukung ekspansi BUMN dan Perusahaan swasta Indonesia yang bergerak di bidang energi baru dan terbarukan dan pertambangan untuk berinvestasi di negara-negara yang memiliki sumber-sumber energi baru dan terbarukan, serta sumber-sumber pertambangan..

Tabel 19. Signifikansi Kegiatan KSST bagi Prioritas Nasional Indonesia

MANFAAT	SIGNIFIKANSI
Ekonomi	Penjualan produk dan teknologi Indonesia ke negara mitra pembangunan; Indonesia dapat belajar <i>best practices</i> dari negara-negara mitra dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang kuat, inklusif dan berkelanjutan (PN1)
Peningkatan Citra Indonesia	Dukungan bagi pencalonan Indonesia untuk menduduki posisi kepemimpinan strategis di organisasi internasional (PN7)
Diplomasi Kedaulatan	Dukungan bagi keutuhan wilayah NKRI (PN7)

Selain memberikan manfaat ekonomi, pelaksanaan kegiatan KSST dapat mendukung peningkatan citra Indonesia di luar negeri yang dapat membantu penggalangan dukungan bagi pencalonan

Indonesia untuk menduduki posisi-posisi kepemimpinan strategis di organisasi-organisasi internasional. Kegiatan KSST juga bermanfaat secara politik dalam memperkuat dukungan bagi keutuhan wilayah Indonesia, dan memberikan dukungan bagi stabilitas politik dan keamanan negara-negara mitra yang pada akhirnya dapat memperkuat hubungan diplomatic Indonesia dengan negara-negara mitra Kerjasama Pembangunan internasional.

Analisis Tantangan

Analisis tantangan menemukan bahwa **sistem pendataan** belum berjalan optimal sementara pelaksanaan KSST masih bersifat **sporadis** di Kementerian/Lembaga yang beragam dan **belum terkoordinasi** dengan baik dalam satu **tata kelola** yang efektif. KSST juga masih bersifat **demand-driven** dan **belum terencana** secara berkelanjutan untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan nasional, yaitu transformasi ekonomi, peningkatan perdagangan dan investasi Indonesia.

Hasil evaluasi kerjasama pembangunan internasional menunjukkan bahwa jika ditinjau dari jumlah, capaian kegiatan KSST masih tergolong rendah bila dibandingkan dengan target yang tertera pada Indikator Kinerja Kegiatan Prioritas Penguatan KPI (35.33%). Sinergitas belum maksimal antara aktor negara dan non-negara (swasta, LSM, dsb.) Kementerian/Lembaga pelaksana KSST perlu mengukur/menilai jenis kerja sama yang dapat memberikan dampak positif bagi prioritas pembangunan. Kerja sama masih *demand driven*, perlu penyesuaian kerja sama menjadi *balancing supply and demand*. Business process KSST belum terpetakan dengan baik.

Sistem informasi terintegrasi belum tersedia. Dari sisi kelembagaan penyelenggaraan kerja sama pembangunan internasional juga masih perlu diperkuat. Tim Kornas KSS belum maksimal dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan KSST Indonesia (regulator, koordinator antar *stakeholder*). Dari sisi

kerangka legal, masih belum terdapat pengaturan lingkup Hibah dan KSST dikarenakan isu keduanya saling beririsan satu sama lain.

Tabel 20. Tantangan Pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Internasional

NO.	TANTANGAN
1	Jumlah Kegiatan Kerjasama Pembangunan masih di bawah target rencana kerja pemerintah (per tahun 2023, hanya tercapai 47 dari 133 target kegiatan - menghasilkan pencapaian yang hanya mencapai 35,33%). Realisasi pendanaan pun masih bersifat indikatif karena sistem pelaporan yang tidak terintegrasi
2	Belum maksimalnya sinergitas antar aktor pelaksana kegiatan kerjasama pembangunan internasional (K/L, CoEs, CSOs, Sektor Swasta, dll)
3	Belum ada pengukuran jenis kerja sama yang berdampak pada prioritas pembangunan nasional, khususnya peningkatan perdagangan dan investasi dengan negara mitra kerja sama pembangunan internasional
4	Sebagian besar kerja sama berorientasi pada proyek/kerja sama teknik yang belum direncanakan jangka panjang dan berkelanjutan.
5	Masih bersifat demand driven, belum menyeimbangkan antara supply dan demand,
6	Belum ada pemetaan business process secara optimal
7	Belum terintegrasinya sistem informasi
8	Masih lemahnya kerangka kelembagaan pelaksanaan KSST
9	Masih belum kuatnya kerangka regulasi yang mengatur lingkup Hibah dan KSST

Tantangan-tantangan lain bersifat eksternal menyangkut kondisi dan kesiapan negara-negara mitra untuk terlibat dalam kegiatan KSST, Kesulitan berkomunikasi seringkali menghambat penandatanganan General Agreement yang menjadi syarat kegiatan yang didanai oleh LDKPI. Jika kegiatan KSST diselenggarakan di

negara mitra, hambatannya adalah kesiapan jasa konsultan dan prosedur birokratik yang rumit, dan ketersediaan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan *workshop dan capacity building*.

Rekomendasi

Untuk mewujudkan manfaat ekonomi, peningkatan citra dan dukungan bagi peran Indonesia di forum multilateral, serta menjaga keutuhan kedaulatan Indonesia dan hubungan diplomatik dengan negara-negara mitra, kegiatan KSST perlu untuk direncanakan dengan lebih baik dan bersifat keberlanjutan.

Sejumlah rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan KSST Indonesia yang strategis dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perlunya perbaikan sistem pendataan kegiatan K/L yang lebih terintegrasi
2. Dorongan dan dukungan bagi K/L untuk meningkatkan program dan kegiatan KSST yang berkaitan langsung dengan Prioritas Nasional, termasuk transformasi ekonomi dan penguatan peran Indonesia di forum internasional
3. Identifikasi, pemetaan, dan penguatan kapasitas *Center of Excellences* yang aktif melaksanakan kegiatan KSST yang bernilai ekonomi
4. Penguatan kerangka kelembagaan dan regulasi/legal serta proses bisnis pelaksanaan KSST
5. Penguatan koordinasi antar K/L pelaksana KSST dan mekanisme Monitoring & Evaluation
6. Pengembangan infrastruktur KSST untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk platform sistem digital
7. Fasilitasi komunikasi dengan negara mitra pembangunan

Gambar 12. Penguatan Kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular





Peningkatan Citra Positif Indonesia di Dunia Internasional

Evaluasi kinerja terkait upaya meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri menunjukkan pemenuhan target yang telah ditetapkan. Target nilai Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah 3,95 (kategori “Baik”), dan terealisasi sebesar 4,07 (kategori “Baik”) dengan capaian persentase kinerja sebesar 103,04%. Jika dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya di tahun 2020-2023, realisasi Indeks kinerja Citra Indonesia di Dunia Internasional terus mengalami peningkatan. Di tahun 2020, capaian realisasi sebesar 3,82, sementara di tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 3,98 dan 4,06. Realisasi pada tahun 2023 yang mencapai indeks 4,07 merupakan perolehan nilai indeks tertinggi sejak tahun 2017.

Peningkatan citra membawa dampak positif pada menguatnya dukungan bagi pencalonan keanggotaan dan kepemimpinan Indonesia di forum-forum internasional, peningkatan jumlah wisatawan Indonesia dan manfaat ekonomi seperti masuknya investasi asing ke Indonesia dan berkembangnya industri kreatif pendukung sektor pariwisata. Citra positif memperkuat kepercayaan internasional terhadap kepemimpinan dan sekaligus dukungan bagi prakarsa dan inisiatifnya di forum-forum internasional tersebut.

Tabel 21. Dampak Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional pada Prioritas Nasional

Dukungan bagi pencalonan Indonesia di organisasi internasional (PN7)	Dukungan bagi prakarsa dan inisiatif Indonesia di forum multilateral (PN7)	Dukungan bagi kepemimpinan Indonesia pada forum internasional (PN7)
Meningkatnya wisatawan manca negara ke Indonesia (PN1)	Meningkatnya investasi asing di Indonesia (PN1)	Meningkatnya industri kreatif pendukung industri pariwisata (PN1)
Meningkatnya kepercayaan pemerintah untuk melanjutkan prioritas nasional (PN7)	Menguatnya dukungan internasional terhadap penyelesaian masalah domestik (PN7)	Stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan nasional (PN7)

Identifikasi tantangan menemukan hambatan hambatan teknis terkait metode survei, dan tantangan yang bersifat eksternal dan internal yang dapat berpengaruh terhadap jatuhnya citra positif Indonesia. **Tantangan teknis terkait dengan metode survei** persepsi masyarakat internasional terhadap Indonesia. Tantangan ini terkait dengan keterbatasan fasilitas responden, kekhawatiran terkait

keamanan data, dan banyaknya pertanyaan yang diajukan dalam survei.

Tantangan eksternal di antaranya adalah **upaya negara lain dan gerakan transnasional mengangkat masalah domestik di level internasional** Misalnya, Vanuatu selalu mengangkat isu Papua di pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak 2016. Pada tahun 2023, Vanuatu tidak mengangkat isu tersebut. Namun, pada tahun 2024, negara tersebut kembali mengangkat isu Papua di Sidang Majelis Umum PBB. Cara Indonesia merespon isu tersebut berpengaruh pada citra Indonesia di dunia internasional.

Tantangan lain terkait pemberitaan media massa internasional terhadap perkembangan domestik di tanah air yang menyoroti **menurunnya sejumlah indeks dalam tata kelola yang baik**. Misalnya, dalam laporan Democracy Index 2023 yang dipublikasikan oleh Economist Intelligence Unit (EIU), peringkat Indonesia menurun ke 56 dengan skor 6,53 dari skor di tahun 2022 sebesar 6,71. V Democracy Index menempatkan Indonesia pada ranking 87 di tahun 2024, atau turun dari ranking 79 di tahun 2023. Freedom House menilai indeks demokrasi Indonesia 57/100 di tahun 2024, turun dari 58/100 di tahun 2023. Turunnya indeks demokrasi telah menjadi pemberitaan di media masa nasional dan berpengaruh terhadap citra positif Indonesia di dunia internasional.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, rekomendasi yang dapat diusulkan adalah:

- Indonesia perlu memperkuat infrastruktur survei supaya memudahkan responden untuk memberikan evaluasi. dan menyesuaikan periode survei supaya lebih banyak responden terlibat dalam menyampaikan pandangannya tentang Indonesia.
- Terkait dengan kondisi domestik, strategi peningkatan citra akan tergantung pada perkembangan kondisi domestik Indonesia.

Upaya untuk menjaga demokratisasi akan mendukung kebijakan luar negeri dalam menjaga citra positif Indonesia di dalam negeri.

- Perlu strategi komunikasi yang tepat untuk merespon pemberitaan negatif oleh media-media massa internasional, termasuk dengan memperluas publikasi terkait penyelenggaraan event di Indonesia dan luar negeri.
- Penyelenggaraan kegiatan promosi oleh perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat diaspora Indonesia.



Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

*A*nalisis gap tetap menunjukkan **disparitas positif** antara rencana target dan realisasi di tahun 2023, sekalipun terdapat penurunan capaian jika dibandingkan capaian di tahun 2022. Evaluasi kinerja kebijakan luar negeri terkait pengaruh dan peran Indonesia menunjukkan bahwa capaian Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional di tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2022, indeks realisasi 4,98 dari target 4,84 sementara di tahun 2023 indeks realisasi capaiannya adalah 4,96 dari target 4,94. Penurunan ini dipengaruhi karena peningkatan target di tahun 2023 dari 4,85 ke 4,98. Namun sekalipun terjadi penurunan indeks capaian realisasi tersebut, jumlah rencana maupun realisasi pertemuan yang dipimpin Indonesia serta total prakarsa dan rekomendasi Indonesia di Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri ASEAN dan Multilateral mengalami kenaikan.

Analisis dampak menunjukkan signifikansi yang tinggi antara capaian kinerja peran di tingkat regional dengan perwujudan prioritas nasional baik terkait transformasi ekonomi (PN1) maupun politik, hukum, pertahanan dan keamanan (PN 7).

Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang sejalan dengan kepentingan nasional Indonesia, baik di bidang ekonomi (PN 1) maupun politik, hukum, pertahanan dan keamanan (PN 7). Di bawah keketuaan Indonesia, ASEAN berhasil mengadopsi ASEAN Concord IV dan ASEAN Leaders' Declaration as an Epicentrum of Growth, sebagai fondasi untuk penyusunan Visi Komunitas ASEAN 2045. Indonesia juga mengupayakan terciptanya kawasan damai dan sejahtera yang lebih luas melalui penyelenggaraan ASEAN Indo-Pacific Forum (AIPF) pada tahun 2023. Di tahun 2023, Indonesia mengundang negara-negara anggota Pacific Islands Forum (PIF) untuk hadir di pertemuan-pertemuan ASEAN.

Pada tahun 2023, **Indonesia juga menjadi ketua MIKTA** dan berhasil menyelenggarakan KTT MIKTA yang pertama. 14 joint statements disepakati pemimpin negara-negara MIKTA untuk menunjukkan posisi MIKTA sebagai *positive force* di tengah polarisasi dunia.

Peran Indonesia di kawasan juga dibuktikan dengan **penyelenggaraan KTT Forum Archipelagic and Islands States (AIS)** untuk pertama kalinya di Bali pada bulan September 2023. 32 delegasi negara partisipan hadir dan bersepakat untuk mendorong kerja sama di sektor perubahan iklim, kemaritiman, dan manajemen bencana. AIS mengembangkan 300 program akselerasi, menyediakan hibah untuk beasiswa serta riset dan pengembangan sebesar 634,550 dolar AS, dan 185.000 dolar AS untuk mendanai inisiatif solusi inovatif.

Kepemimpinan Indonesia di tingkat global memiliki dampak signifikan bagi pencapaian prioritas nasional, khususnya Prioritas Nasional 7, yaitu memperkuat stabilitas Politik, Hukum,

Pertahanan dan Keamanan, dan Transformasi Layanan Publik. Indonesia memimpin 76 pertemuan forum multilateral, 10 forum regional Asia, Pasifik dan Afrika dan 5 forum regional Amerika dan Eropa. Indonesia juga berhasil memenangkan 14 dari 15 pencalonan di organisasi internasional. 145 prakarsa dan rekomendasi diterima di ASEAN dan 120 prakarsa dan rekomendasi diterima di forum multilateral tingkat global.

Tabel 22. Signifikansi Dampak Kepemimpinan Indonesia di Tingkat Regional dan Global pada Prioritas Nasional

Keketuaan di ASEAN meletakkan visi ASEAN 2045	Penyelenggaraan KTT MIKTA pertama di bawah Keketuaan Indonesia	Penyelenggaraan KTT AIS pertama di Bali, Indonesia
Kepemimpinan di 76 forum multilateral	Penguatan stabilitas Kawasan Asia Tenggara dan Indo Pasifik (PN7)	Pengakuan pengaruh Indonesia dalam 14 pencalonan di organisasi internasional
Peningkatan <i>Engagement</i> dengan Pacific Island Forum (PIF)	Kepemimpinan pada 10 forum regional Asia Pasifik dan Afrika	Kepemimpinan pada 5 forum regional Amerika dan Eropa
78 prakarsa dan 67 rekomendasi Indonesia diterima di ASEAN	24 prakarsa dan 96 rekomendasi Indonesia diterima di forum multilateral	Indonesia sebagai kontributor terbesar ke-6 Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Analisis tantangan mengidentifikasi sejumlah faktor yang berpengaruh terhadap kinerja peningkatan peran dan pengaruh Indonesia di tingkat regional dan global, baik dalam meningkatkan kinerja kepemimpinan Indonesia pada forum regional dan

internasional maupun mengupayakan prakarsa dan rekomendasi Indonesia diterima di forum-forum tersebut.

- Dinamika politik dunia membuat berbagai isu pada forum multilateral semakin bersifat multidimensional sehingga membuat pembahasan semakin rumit.
- Negara-negara mitra memiliki kebijakan dan prioritas yang bisa berubah seiring waktu. Negara-negara tersebut memiliki perbedaan pendekatan dan pandangan terhadap isu-isu tertentu sehingga mempersulit koordinasi dan pemahaman bersama.
- Mempersatukan suara seluruh pihak yang beragam dan memastikan bentuk kompromi dengan negara lain tidak kontradiktif terhadap kepentingan Indonesia dalam pertemuan/forum.
- Tidak semua Kementerian/Lembaga yang menjadi *focal point* di organisasi internasional memiliki SDM dengan kapasitas yang mumpuni untuk menjadi ketua dan memimpin negosiasi di forum regional dan global.
- Terbatasnya waktu untuk menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia di forum internasional karena terlambatnya keputusan pengajuan pencalonan Indonesia, sementara calon lain sudah menggalang dukungan dari anggota-anggota organisasi internasional.
- Masih belum semua pemangku kepentingan nasional memahami *rules* dan *regulations*, termasuk *Rules of Procedure* (ROP) dan mekanisme pemilihan yang berkaitan dengan pencalonan di forum internasional.
- Lamanya proses untuk menggali masukan terhadap draft dokumen *outcomes* berdampak pada terhambatnya endorsement dan finalisasi dokumen.
- Semakin tajamnya persaingan antar “*major powers*” di tingkat regional dan global berdampak pada sulitnya mencapai

kesepakatan di antara anggota-anggota organisasi internasional karena pola-pola *alignment* berpengaruh terhadap posisi negara dalam proses pembuatan keputusan baik melalui konsensus maupun *voting*.

Rekomendasi

Untuk meningkatkan pengaruh dan peran Indonesia dalam forum-forum internasional, sejumlah langkah perlu dilakukan, di antaranya adalah:

- **Meningkatkan jalur komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan** di dalam negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mengatasi hambatan potensial pelaksanaan pertemuan internasional, dan menindaklanjuti prakarsa dan rekomendasi Indonesia sebagai *Host/Chair*.
- **Meningkatkan koordinasi lintas Satker** di Kemenlu, Perwakilan RI, maupun K/L pengampu isu-isu regional dan multilateral guna menyusun posisi Indonesia dan strategi untuk memastikan kepentingan Indonesia pada berbagai isu terjaga pada setiap forum regional dan global.
- **Mengembangkan strategi pemenangan pencalonan Indonesia di organisasi internasional** termasuk dengan penguatan database pencalonan yang lebih real time dan reliable, diseminasi dan pemahaman prosedur dan strategi penggalangan dukungan.
- **Mengembangkan kapasitas SDM** di Kementerian & Lembaga yang menjadi *focal point* keanggotaan Indonesia di organisasi internasional sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi, bernegosiasi dan menjalankan peran kepemimpinan sebagai *host/chair* persidangan di forum regional dan global.
- **Membuat pemetaan pola-pola *alignment*** di antara anggota organisasi internasional untuk mengidentifikasi posisi-posisi

negara dalam pengambilan keputusan di forum regional dan global, termasuk pemetaan *like-minded countries* yang dapat menjadi pendukung prakarsa dan rekomendasi Indonesia, serta pencalonan Indonesia di posisi strategis kepemimpinan organisasi internasional.

- **Memainkan peran sebagai *bridge builder* dan *trusted partner*** melalui engagement dan dialog yang konstruktif dengan negara pihak pada forum internasional guna menyamakan pandangan dan menghasilkan suatu outcome yang diharapkan yang dapat diterima oleh semua pihak.
- Meningkatkan dan **memperkuat hubungan diplomatik dan engagement serta dialog yang konstruktif** dengan negara anggota/mitra internasional untuk memahami perubahan dalam kebijakan dan prioritas mereka secara lebih baik.





Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Indikator KP7: Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/ Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi.

Pada tahun 2023, capaian kinerja di sektor investasi mencapai 126,05%, di sektor perdagangan sebesar 140,68% dan di sektor pariwisata sebesar 115,42%. Lebih dari 300 komitmen perdagangan dibuat di tahun 2023 dengan nilai komitmen sebesar USD 15,23 miliar, sementara 190 komitmen di sektor investasi telah disepakati senilai USD 60,72 miliar.

Pencapaian ini berdampak sangat signifikan pada pembangunan nasional, khususnya mendukung transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Outcome yang dihasilkan dari KP7 PN 1 ini adalah meningkatnya nilai perdagangan dan investasi, serta jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia di tahun 2023.

2. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik

Indikator KP1: Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri. Pencapaian *output* KP1 ini dalam bentuk peningkatan jumlah penyelesaian perundingan penetapan batas darat dan maritim, dan tercapainya target penyelesaian kasus khusus dan kasus umum WNI yang tinggal di luar negeri.

Penguatan integritas NKRI yang ditandai dengan penyelesaian perundingan penetapan batas darat dan maritim mencapai tingkat ketercapaian yang tinggi antara target dan realisasi. Pada tahun 2023, target indeks capaiannya adalah 49,99, dengan realisasi indeks sebesar 50,96, sehingga persentase capaiannya sebesar 101,94%. Pada Prioritas Nasional 7, ditetapkan target output strategis perundingan penetapan batas darat dan maritim tahun 2023 adalah sebanyak 8 kesepakatan. Kinerja kebijakan luar negeri terkait perundingan perbatasan menunjukkan capaian 100% dengan realisasi 8 kesepakatan sesuai target tersebut

Pencapaian realisasi target di bidang penguatan integritas NKRI berdampak signifikan pada kepastian dan kewibawaan hukum, kewenangan negara untuk mengelola sumber-sumber daya yang ada di wilayah NKRI, dan sekaligus mendukung strategi pertahanan dan keamanan nasional.

Evaluasi kinerja pada KP Pelindungan WNI di Luar Negeri tahun 2023 menunjukkan Realisasi Capaian antara target dan realisasi mencapai 92,02% dari target 83%. Di tahun 2023, target jumlah WNI yang mendapatkan pelayanan dan pelindungan oleh perwakilan RI di luar negeri adalah sebanyak 163.967 orang, sementara realisasinya mencapai 160.892 orang, sehingga persentase capaiannya sebesar 98,2%. Sementara itu, target jumlah WNI yang mendapatkan pelayanan dan pelindungan oleh Kementerian Luar Negeri Pusat adalah 22.430, dengan tingkat ketercapaian 117,9% di mana 26.439 WNI di luar negeri telah mendapatkan pelayanan dan pelindungan di luar negeri.

Pencapaian realisasi target di bidang Pelindungan dan Pelayanan WNI di luar negeri memberikan kepastian hukum bagi WNI, termasuk PMI yang tinggal dan bekerja di luar negeri. Lebih lanjut, pelayanan kepada PMI berkontribusi pada peningkatan remitansi yang dapat mendukung transformasi ekonomi yang berkeadilan bagi semua warga negara Indonesia.

Indikator KP3: Realisasi indeks citra Indonesia di mata masyarakat internasional terus meningkat dalam periode 2020-2023. Di tahun 2023, realisasinya mencapai 4,07 atau 103,04% dari target (3,95). Raihan indeks ini merupakan yang tertinggi sejak survei citra mulai dibuat di tahun 2017.

Peningkatan citra positif Indonesia tersebut berdampak sangat signifikan pada meningkatkan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, dan lebih lanjut mendukung pengembangan industri kreatif dan inovatif yang berkontribusi pada transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, termasuk bagi pelaku UMKM. Pada periode Januari-Desember 2023 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 11,68 juta, atau naik 98,3 persen dibandingkan jumlah kunjungan di

Januari-Desember 2022. Jumlah ini melebihi target capaian yang direncanakan, yaitu 8,5 juta.

Indikator KP4: Indonesia berhasil memainkan kepemimpinan di organisasi regional dan global. Prakarsa dan rekomendasi Indonesia telah diterima dalam organisasi-organisasi internasional tersebut. Di tahun 2023, 265 rekomendasi dan prakarsa Indonesia telah diterima baik di forum ASEAN maupun di forum multilateral. yang diterima sebanyak 265 dengan jumlah prakarsa dan rekomendasi yang disampaikan sebanyak 265. Di level ASEAN, jumlahnya mencapai 145, sementara di forum multilateral jumlahnya mencapai 120.

Pencapaian target KP4 PN7 ini berdampak sangat signifikan pada Prioritas Nasional 7 dalam bentuk seperti pengakuan kedaulatan Indonesia, penguatan legitimasi pemerintah yang penting bagi penegakan hukum di wilayah kedaulatan NKRI dan terjaganya stabilitas politik dan keamanan Indonesia

Di samping hal di atas, berdasarkan hasil evaluasi kinerja juga ditemukan adanya indikator yang sudah mengalami peningkatan signifikan dalam periode 2020-2023, namun belum berhasil memenuhi target realisasi capaian RKP TA 2023, yaitu **Indikator KP2 pada Prioritas Nasional 7.**

Jumlah program/kegiatan dan anggaran masih di bawah target yang direncanakan dalam RKP 2023. Di tahun 2023, dari target jumlah 133 kegiatan KSST baru terealisasi 47 kegiatan, yang artinya capaiannya baru sebesar 35,33%. Dari sisi pendanaan, terjadi peningkatan (indikatif) jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan KSST di tahun 2023 sebesar 73,4 miliar rupiah, namun jumlahnya masih jauh di bawah rencana target anggaran sebesar 171 miliar rupiah di RKP Tahun Anggaran 2023, atau 42,9%. Kelemahan sistem dan mekanisme pendataan jumlah program/kegiatan KSST dan besar anggaran yang dipakai untuk

mendanai KSST merupakan salah satu faktor kurangnya pendataan kegiatan, di samping masih perlunya diperkuat ekosistem KSST Indonesia, termasuk dengan melibatkan *Center of Excellences* dan sektor swasta dalam kegiatan KSST.

Isu dan Tantangan Peningkatan Kinerja

Sekalipun terdapat capaian-capaian rencana *output* yang positif, evaluasi ini juga menemukan sejumlah isu dan tantangan yang perlu menjadi perhatian di tahun-tahun mendatang.

Dalam kinerja peningkatan efektivitas kesepakatan kerjasama ekonomi (PTA/FTA/CEPA) dan diplomasi ekonomi, nilai perdagangan masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan, sekalipun jumlah komitmen perdagangan yang diperoleh telah memenuhi target RKP 2023. Di tahun 2023, nilai perdagangan dengan negara akreditasi adalah sebesar USD 214,186,705,192.86 dari target sebesar USD 260,647,134,702.00, sehingga capaian *outcome* kinerja peningkatan nilai perdagangan adalah sebesar 82,17%.

Dalam perundingan penetapan batas darat dan maritim, perlu dilakukan akselerasi mengingat masih banyak batas-batas yang harus diselesaikan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Dalam perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, masih muncul banyak kasus khusus dan umum baru yang perlu ditangani dan diselesaikan, sementara kasus-kasus lama masih harus diselesaikan. Di tahun 2023, terjadi penurunan capaian realisasi

khususnya pada persentase penyelesaian kasus khusus yang ditangani. Capaian penyelesaian kasus khusus yang ditangani menurun dari 132,86% di tahun 2022, menjadi 109,8% di 2023. Selain karena disebabkan oleh dinaikkannya target di tahun 2023, penurunan ini mencerminkan meningkatnya kasus-kasus khusus di tahun 2023.

Indonesia perlu menindaklanjuti kesepakatan-kesepakatan yang telah dihasilkan forum-forum internasional di bawah kepemimpinan Indonesia, seperti G20, ASEAN, MIKTA, AIS, dan World Water Forum supaya *outcome* dan dampaknya bagi perwujudan Prioritas Nasional optimal.

Kondisi polikrisis terkait geopolitik dan geoekonomi, *friendshoring* dan deglobalisasi dalam kerjasama perdagangan dan investasi, pemulihan ekonomi global pasca Pandemi COVID 19, perubahan iklim, misinformasi dan disinformasi, kejahatan transnasional dan disrupsi teknologi masih menciptakan ketidakpastian global.

Kebijakan proteksionisme negara-negara mitra dagang dan investasi untuk melindungi produk-produk dalam negeri

Rekomendasi

Untuk merespons isu-isu, tantangan-tantangan, dan mendukung peningkatan kinerja Kebijakan Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional secara optimal, dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi di masing-masing bidang/indikator, di antaranya adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Rekomendasi Indikator KP7: Peningkatan Efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/*Free Trade Agreement* (FTA)/*Comprehensive Economic Partnership Agreement* (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi.

Untuk meningkatkan efektivitas PTA/ FTA/CEPA diperlukan upaya-upaya strategis sebagai berikut:

- Perlu diperkuat pendekatan diplomasi ekonomi yang holistik dan komprehensif melalui *Grand Design* Diplomasi Ekonomi. Kepentingan utama ekonomi perlu dirumuskan secara tegas; perumusan arah dan strategi; strategi kunci dalam penetrasi dan perluasan pasar; penetapan sektor-sektor prioritas; optimalisasi peran para pemangku kepentingan; dan penguatan peran koordinasi di antara seluruh pemangku kepentingan.
- Strategi diplomasi yang proaktif dan inovatif di level global, regional dan nasional perlu diperkuat, sementara fungsi dan peran perwakilan RI di luar negeri harus dioptimalkan.

2. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik

Rekomendasi Indikator KP1: Penguatan Integritas NKRI dan Pelindungan WNI di Luar Negeri.

Untuk mengakselerasi penyelesaian perundingan penetapan batas darat dan maritim, perlu dilakukan sejumlah upaya strategis

- Penetapan prioritas perbatasan maritim dan darat yang akan diupayakan segera diselesaikan dengan negara-negara mitra.

- Perumusan strategi yang lebih efektif untuk memastikan dukungan dari negara-negara mitra untuk penyelesaian perbatasan yang telah ditetapkan sebagai prioritas bagi Indonesia.
- Peningkatan intensitas pertemuan persiapan dengan Kementerian/ Lembaga yang menjadi anggota Tim Teknis, untuk menyusun posisi dan strategi perundingan, serta untuk tercapainya kesamaan pandangan di antara Tim Teknis Batas Maritim Indonesia.
- Untuk menghadapi tantangan eksternal, upaya-upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah: Menjaga komunikasi dengan Tim Teknis negara mitra melalui penyelenggaraan berbagai rangkaian pertemuan informal pra-perundingan guna menjaga momentum negosiasi; dan menggunakan forum-forum bilateral untuk mendorong komitmen di tingkat politis yang lebih tinggi untuk melanjutkan perundingan, dan mempercepat proses internal negara mitra.
- Pentingnya pelaporan secara berkala kepada pimpinan/Tim Penasihat/Tim Pakar mengenai perkembangan negosiasi, guna memperoleh mandat dan instruksi untuk perundingan putaran selanjutnya.
- Disusunnya *institutional memory* melalui pembuatan matriks posisi Indonesia dan hasil exercise yang diperbarui secara berkala dan pembuatan laporan pertemuan komprehensif

Untuk memperkuat perlindungan dan pelayanan WNI di luar negeri, perlu dilakukan upaya-upaya strategis berikut:

- Perlunya penguatan regulasi perlindungan WNI, yang didukung dengan edukasi dan pencegahan hasrat moral kepada para calon PMI maupun PMI
- Penguatan Diplomasi perlindungan WNI dan infrastruktur perlindungan supaya semakin responsif dalam mengatasi masalah yang dihadapi WNI di luar negeri

- Perbaiki Standar pelayanan dan perlindungan WNI
- Perlu dibangun interkoneksi di antara sistem pelayanan dan perlindungan yang telah dikembangkan oleh instansi-instansi terkait supaya terjadi interoperabilitas antar sistem.
- Konsepsi perlindungan bagi pelindung juga dirumuskan dengan tepat dan jelas supaya mempermudah proses perlindungan dan tidak terjadi dampak negatif bagi pelindung.
- Diperlukan anggaran kedaruratan yang memadai dalam rangka mengantisipasi kejadian-kejadian yang tidak dapat diprediksikan, seperti konflik atau bencana alam.
- Pentingnya penguatan koordinasi di antara instansi pemerintah pusat dan daerah, dan pelibatan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Rekomendasi Indikator KP2: Penguatan Kerja Sama Pembangunan Internasional

Untuk memperkuat kerjasama pembangunan internasional yang berdampak pada Prioritas Nasional, rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

- Perlunya perbaikan sistem pendataan kegiatan K/L yang lebih terintegrasi
- Dorongan dan dukungan bagi K/L untuk meningkatkan program dan kegiatan KSST yang berkaitan langsung dengan Prioritas Nasional, termasuk transformasi ekonomi dan penguatan peran Indonesia di forum internasional
- Identifikasi, pemetaan, dan penguatan kapasitas *Center of Excellences* yang aktif melaksanakan kegiatan KSST yang bernilai ekonomi
- Penguatan kerangka kelembagaan dan regulasi/legal serta proses bisnis pelaksanaan KSST

- Penguatan koordinasi antar K/L pelaksana KSST dan mekanisme Monitoring & Evaluation
- Pengembangan infrastruktur KSST untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk platform sistem digital
- Fasilitasi komunikasi dengan negara mitra pembangunan

Rekomendasi Indikator KP3: Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional Untuk meningkatkan citra Indonesia di dunia internasional, rekomendasi yang dapat diusulkan adalah:

- Indonesia perlu memperkuat infrastruktur survei supaya memudahkan responden untuk memberikan evaluasi. dan menyesuaikan periode survei supaya lebih banyak responden terlibat dalam menyampaikan pandangannya tentang Indonesia.
- Terkait dengan kondisi domestik, strategi peningkatan citra akan tergantung pada perkembangan kondisi domestik Indonesia. Upaya untuk menjaga demokratisasi akan mendukung kebijakan luar negeri dalam menjaga citra positif Indonesia di dalam negeri.
- Perlu strategi komunikasi yang tepat untuk merespon pemberitaan negatif oleh media-media massa internasional, termasuk dengan memperluas publikasi terkait penyelenggaraan event di Indonesia dan luar negeri.
- Penyelenggaraan kegiatan promosi oleh perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk masyarakat diaspora Indonesia.

Rekomendasi Indikator KP4: Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global

Untuk meningkatkan pengaruh dan peran Indonesia dalam forum-forum internasional, sejumlah langkah perlu dilakukan, di antaranya adalah:

- Meningkatkan jalur komunikasi yang efektif dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri dan perwakilan

Indonesia di luar negeri untuk mengatasi hambatan potensial pelaksanaan pertemuan internasional, dan menindaklanjuti prakarsa dan rekomendasi Indonesia sebagai *Host/Chair*.

- Meningkatkan koordinasi lintas Satker di Kemenlu, Perwakilan RI, maupun K/L pengampu isu-isu regional dan multilateral guna menyusun posisi Indonesia dan strategi untuk memastikan kepentingan Indonesia pada berbagai isu terjaga pada setiap forum regional dan global.
- Mengembangkan strategi pemenangan pencalonan Indonesia di organisasi internasional termasuk dengan penguatan database pencalonan yang lebih *real time* dan *reliable*, diseminasi dan pemahaman prosedur dan strategi penggalangan dukungan.
- Mengembangkan kapasitas SDM di Kementerian & Lembaga yang menjadi *focal point* keanggotaan Indonesia di organisasi internasional sehingga memiliki kemampuan untuk melakukan intervensi, bernegosiasi dan menjalankan peran kepemimpinan sebagai *Host/Chair* persidangan di forum regional dan global.
- Membuat pemetaan pola-pola *alignment* (perkubuan/koalisi) di antara anggota organisasi internasional untuk mengidentifikasi posisi-posisi negara dalam pengambilan keputusan di forum regional dan global, termasuk pemetaan *like-minded countries* yang dapat menjadi pendukung prakarsa dan rekomendasi Indonesia, serta pencalonan Indonesia di posisi strategis kepemimpinan organisasi internasional.
- Memainkan peran sebagai *bridge builder* dan *trusted partner* melalui *engagement* dan dialog yang konstruktif dengan negara pihak pada forum internasional guna menyamakan pandangan dan menghasilkan suatu outcome yang diharapkan yang dapat diterima oleh semua pihak.
- Meningkatkan dan memperkuat hubungan diplomatik dan *engagement* serta dialog yang konstruktif dengan negara anggota/mitra internasional untuk memahami perubahan dalam kebijakan dan prioritas mereka secara lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Australian Public Service Academy. (2024). *Policy Impact Analysis Resources to Support New Policy Development*. <https://www.apsacademy.gov.au/policy-impact-analysis-resources-support-new-policy-development#:~:text=Impact%20analysis%20is%20a%20tool,complete%20various%20impact%20analysis%20requirements>
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). *Pada Januari 2023, perubahan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Umum Nasional tahun ke tahun sebesar 5,59 persen*. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/02/01/2004/pada-januari-2023--perubahan-indeks-harga-perdagangan-besar-ihpb--umum-nasional-tahun-ke-tahun-sebesar-5-59-persen.html>
- Bouri, C., & Roy, D. (2024, February 9). *The Israel-Hamas War: The Humanitarian Crisis in Gaza*. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/in-brief/israel-hamas-war-humanitarian-crisis-gaza>
- BSSN Identifikasi Pusat Data Nasional Sementara Diserang Ransomware. (2024, June 24). *Badan Siber Dan Sandi Negara*.
- Center for Preventive Action. (2024, October). *Global Conflict Tracker: War in Ukraine*. *Council on Foreign Relations*. <https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/conflict-ukraine>
- Chang, A., Elemia, C., & Xiao, M. (2024, September 15). *China's Risky Power Play in the South China Sea*. *New York Times*. <https://www.nytimes.com/interactive/2024/09/15/world/asia/south-china-sea-philippines.html>
- Chief Investment Office. (2024, September 2). *Safe-haven Assets in Focus as Israel- Hamas War Continues*. *UBS Insights*. <https://www.ubs.com/global/en/wealthmanagement/insights/chief-investment-office/house-view/daily/2023/latest-16102023.html>
- Climate Action Tracker. (2023). *No Change to Warming as Fossil Fuel Endgame Brings Focus Onto False Solutions*. <https://climateactiontracker.org/publications/no-change-to-warming-as-fossil-fuel-endgame-brings-focus-onto-false-solutions/>

- Cyrill, M. (2024, October 15). The 2024 US Presidential Election: Impact on Southeast Asia Markets. *ASEAN Briefing*. <https://www.aseanbriefing.com/news/the-us-election-2024-impact-on-southeast-asia-markets/>.
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. (2024). *Laporan Kinerja 2023*. [https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAPORAN %20TAHUNAN%202023.pdf](https://tanamanpangan.pertanian.go.id/assets/front/uploads/document/LAPORAN%20TAHUNAN%202023.pdf)
- Ellerbeck, S. (2024, September 10). What's the Difference between 'Friendshoring' and Other Global Trade Buzzwords? *World Economic Forum*. <https://www.weforum.org/agenda/2023/02/friendshoring-global-trade-buzzwords/>.
- Euronews. (2024, September 25). China test-fires intercontinental ballistic missile into Pacific Ocean as tensions with US mount. *Euronews*. <https://www.euronews.com/2024/09/25/china-test-fires-intercontinental-ballistic-missile-into-pacific-ocean-as-tensions-with-us>
- Fonseca, P. C. D., De Oliveira Paes, L., & Cunha, A. M. (2016). The concept of emerging power in international politics and economy. *Revista de Economia Política*, 36(1), 46–69. <https://doi.org/10.1590/0101-31572016v36n01a04>
- Gordon, J. (2024, September 30). Kamala Harris and trade: Better than the alternative, but not much. *The Interpreter*. <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/kamala-harris-trade-better-alternative-not-much>.
- Guo, E., & Renaldi, A. (2022, April 6). Deception, exploited workers, and cash handouts: How Worldcoin recruited its first half a million test users. *MIT Technology Review*. <https://www.technologyreview.com/2022/04/06/1048981/worldcoin-cryptocurrency-biometrics-web3/>
- Indonesia Research Institute for Decarbonization. (2024). *Menghadapi Ancaman Kehilangan dan Kerusakan Akibat Perubahan Iklim pada Sektor Pangan di Indonesia*. <https://irid.or.id/en/publication/menghadapi-ancaman-kehilangan-dan-kerusakan-akibat-perubahan-iklim-pada-sektor-pangan-di-indonesia/>.

- International Energy Agency. (2024, July 24). Global Coal Demand is Set to Remain Broadly Flat Through 2025. *IEA50*. <https://www.iea.org/news/global-coal-demand-is-set-to-remain-broadly-flat-through-2025>.
- Kim, S., & Ji, Y. (2018). Gap Analysis. In *The International Encyclopedia of Strategic Communication* (pp. 1–6). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0079>
- Mahrenbach, L. C. (2019). Conceptualizing Emerging Powers. In *The Palgrave Handbook of Contemporary International Political Economy* (pp. 217–231). Palgrave Macmillan UK. https://doi.org/10.1057/978-1-137-45443-0_14
- Melani, A. (2023, September 29). Jokowi: Indonesia Impor 11 Juta Ton Gandum, Hampir 30 Persen dari Ukraina dan Rusia. *Liputan6.Com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5410560/jokowi-indonesia-impor-11-juta-ton-gandum-hampir-30-persen-dari-ukraina-dan-rusia?page=2>.
- Okthariza, N. (2024, September 10). Questioning Indonesia's approach to the Taiwan Strait. *Indonesia at Melbourne*. . <https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/questioning-indonesias-approach-to-the-taiwan-strait/>
- Paes, L. de O., Cunha, A. M., & Fonseca, P. C. D. (2017). Narratives of Change and Theorisations on Continuity: the Duality of the Concept of Emerging Power in International Relations. *Contexto Internacional*, 39(1), 75–95. <https://doi.org/10.1590/s0102-8529.2017390100004>
- Patton, S. (2024, October 3). Kamala Harris and the Indo-Pacific: Correcting the attention deficit. *The Interpreter*. , <https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/kamala-harris-indo-pacific-correcting-attention-deficit>.
- Pusat Data Nasional Sementara Lumpuh Akibat Ransomware, Mengapa Instansi Pemerintah Masih Rentan Terhadap Serangan Siber? (2024). *BBC News Indonesia*. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxee2985jrvo>
- Sandi, F. (2024, February). Ekspor Sawit RI ke Eropa Ambruk di 2023, Apa Penyebabnya? *CNBC Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240227182841-4->

518088/parah-eksport-sawit-ri-ke-eropa-ambruk-di-2023-apa-penyebabnya.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2023, October 16). President Jokowi Applauds Indonesia-China Partnership. *Setkab.Go.Id*.

Setuningsih, N. (2024, January 4). Jokowi Sebut Pupuk Subsidi Langka Karena Perang Rusia-Ukraina. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/04/12220811/jokowi-sebut-pupuk-subsidi-langka-karena-perang-rusia-ukraina-ganjar-ada>.

Soni, P., & Coi, G. (2024, March 4). By the Numbers: How Conflict in the Red Sea Disrupts Global Trade. *Politico*. <https://www.politico.eu/article/how-conflict-red-sea-disrupts-global-trade-by-the-numbers-houthis-shipping/>.

The 2024 Candidates on Foreign Policy. (2024). Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/election2024/candidate-tracker>.

Wishnick, E. (2023, January 30). Ukraine's Ripple Effect on Russia's Indo-Pacific Horizon. *Dansk Institut for International Studier*.

Wolff, A. (2024, May). Trump's Proposed Blanket Tariffs Would Risk a Global Trade War. *Peterson Institute for International Economics*. <https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/2024/trumps-proposed-blanket-tariffs-would-risk-global-trade-war>.

World Economic Forum. (2023). *The Global Risks Report 2023: 18th Edition*. [www.weforum.org. https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/digest/](https://www.weforum.org/publications/global-risks-report-2023/digest/).





Wisnu Utomo

Perencana Ahli Utama di Kementerian PPN/Bappenas. Sepak terjangnya di Bappenas diawali sebagai Staf Perencana di Biro Pembiayaan Proyek-Proyek Pembangunan pada tahun 1991. Pengalaman karirnya di Bappenas sebagai Kepala Biro Umum, Direktur Pertahanan dan Keamanan, dan Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional.

Pendidikan Sarjana Pertanian di Jurusan Ekonomi Pertanian pada Fakultas Pertanian UNS. Gelar Magister di Bidang Manajemen Strategi Pertahanan diperoleh pada Sekolah Pasca Sarjana UGM. Pendidikan doctoral Ilmu Administrasi Publik ditempuh pada Fisipol UGM.

Mengikuti berbagai konferensi internasional, diantaranya UN High Level Conference on SSC BAPA+40 (Argentina), Development Forum OECD (Portugal), Global Partnership for Effective Development Summit (Jenewa), Global Meeting of Development Providers (Paris), Special Think-20 Programme (India), Least Development Cooperation 5 Summit (Qatar), United Nation High Level Political Forum (New York)

Menulis buku Kebijakan Publik Jokowi Menjawab Kebutuhan Masyarakat (2019), Polugri KPI Berdiplomasi (2023), Menakar Kebijakan Luar Negeri Pasca Pandemi (2024), Mengukur Asa Diplomasi (2024).



Tri Azmi Khairunnisa

Perencana Ahli Pertama di Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas. Mengenyam pendidikan sarjana di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan, di antaranya Learning and Acceleration Programme for Effective Development

Cooperation oleh KOICA Korea Selatan, Pelatihan Foresight oleh Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG), serta Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan di UI dan ITB.



Adzraa Shaffa Andira

Tenaga Substansi Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas. Lulus dari program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2023, Adzraa aktif terlibat perlombaan dan penelitian – dengan beberapa kajian yang telah dipublikasikan di jurnal akademik. Adzraa juga memiliki pengalaman akademik internasional melalui program pertukaran di Universiteit Maastricht dan Hiroshima University, dengan fokus pembelajaran diantaranya mencakup pembangunan berkelanjutan, keamanan kontemporer, serta studi media dan teknologi. Dalam pengalaman profesionalnya selama dua tahun terakhir dengan lembaga pemerintahan serta organisasi internasional dan non-pemerintah, Adzraa terlibat dalam berbagai proyek berkaitan dengan isu diplomasi ekonomi, kerja sama selatan-selatan, pengembangan pendanaan inovatif, dan efektivitas pembangunan internasional.



Yulius P Hermawan

Ketua Parahyangan Center for International Studies (PACIS), Universitas Katolik Parahyangan dan konsultan kebijakan luar negeri dan kerja sama pembangunan internasional. Dosen pada program studi Hubungan Internasional Unpar tersebut menyelesaikan Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Master pada Monash University Australia dan Doktor pada University Of Leeds, Inggris. Selain aktif mengajar, juga melakukan riset-riset tentang kebijakan luar negeri, tata kelola global dan kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular. Mendampingi delegasi Indonesia dalam negosiasi di forum-forum internasional juga menjadi salah satu aktivitas yang semakin mendekatkan dirinya sebagai akademisi dengan praktik diplomasi internasional.

